SKRIPSI NASYWA ZULHASIDA (301221010031).pdf

by Turnitin LLC

Submission date: 30-Sep-2026 04:00PM (UTC+0800)
Submission ID: 3046388934
File name: SKRIPSI_NASYWA_ZULHASIDA_301221010031_.pdf (2.03M)
Word count: 32155
Character count: 207650

IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HAK *MUT'AH* DAN NAFKAH *IDDAH* PADA PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA)

SKRIPSI

Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Syarat
Melanjutkan Penulisan Skripsi Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

DISUSUN OLEH

NASYWA ZULHASIDA

301221010031

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), teruslah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah pada Penulis sampaikan atas rahmat dan hidayah kepada Allah SWT dikarenakan telah memudahkan dan melancarkan dalam menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan Universitas Islam Indragiri. Penulis telah melakukan penelitian dengan judul : "Implementasi Hukum Islam Terhadap Pemberian Hak *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 20198 (Studi di Pengadilan Agama Tembilahan) ", tentunya berkat dari dukungan, sebagai berikut :

1. Dr. H. Najamuddin, Lc., MA, selaku Rektor Universitas Islam Indragiri;
2. Dr. Ali Azhar, S.Sos., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
3. Bambang Sasmita Adi Putra, S.E., S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri
4. Dr. Triyana Syahfitri, SH., MH, selaku Pembimbing I telah memberikan arahan dan teknik analisa regulasi pembahasan menjadi skripsi yang baik selama pembimbingan.
5. Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH, selaku sebagai Pembimbing II yang banyak memberikan masukan, kritikan dan pengkutipan penulisan sesuai dengan etika penulisan yang seharusnya.
6. Para Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
7. Para Tata Usaha Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Unisi serta Perpustakaan Universitas Islam Indragiri yang telah banyak membantu dalam memperoleh proses administrasi selama perkuliahan.

8. Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar Penulis yang banyak memberikan dukungan dan semangat untuk selama studi hingga meraih kesarjanaan Penulis.
9. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada para aparatur dan pegawai Pengadilan Agama Tembilahan, atas kerjasama, keterbukaan, and bantuan mereka selama proses penelitian yang sangat berharga bagi penyelesaian skripsi ini.
10. Finally, my deepest and most sincere gratitude goes to the special person who has always stood steadfastly by my side, offering endless patience, unwavering emotional support, prayers, and boundless encouragement through every single challenge from the very beginning of this academic journey until its completion.

Tembilahan, 12 Juni 2026

Penulis,

NASYWA ZULHASIDA

IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HAK *MUT'AH* DAN NAFKAH *IDDAH* PADA PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA)

Oleh: Nasywa Zulhasida

Pembimbing 1: Dr. Triyana Syahfitri, S.H., M.H,
Pembimbing 2: Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum mengenai hak finansial perempuan pasca-perceraian dalam perkara cerai gugat. Hukum positif sebelumnya membebankan nafkah iddah dan mut'ah eksklusif pada cerai talak, merugikan istri yang menggugat cerai akibat kelalaian suami. Untuk mengatasi ketidakadilan ini, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa istri dalam cerai gugat berhak memperoleh mut'ah dan iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Namun, penerapannya di Pengadilan Agama Tembilahan kerap berbenturan dengan asas formal hukum acara perdata, khususnya larangan memutus melebihi tuntutan (*ultra petita*).

Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) bagaimana implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan, (2) kendala apa saja yang dihadapi hakim dan upaya penyelesaiannya, serta (3) bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan sifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tembilahan. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* pada dokumen putusan dan informan dari unsur hakim serta staf Posbakum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif yang mengonfrontasikan norma hukum dengan realitas empiris di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan belum optimal dan masih berorientasi pada asas *ultra petita*, di mana hakim cenderung tidak memberikan hak mut'ah dan iddah secara *ex officio* jika tidak dimohonkan dalam petitum. Kendala utamanya meliputi rigiditas hukum acara, rendahnya literasi hukum perempuan, serta hambatan eksekusi putusan *verstek*. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini sejalan dengan *maqashid syariah* untuk melindungi hak ekonomi perempuan, namun memerlukan penguatan progresivitas hakim serta optimalisasi peran edukasi hukum Posbakum.

IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW ON THE GRANTING OF MUT'AH AND IDDAH MAINTENANCE RIGHTS IN WIFE-INITIATED DIVORCE CASES PERSPECTIVE OF SEMA NUMBER 3 OF 2018 (A STUDY AT THE RELIGIOUS COURT)

By: Nasywa Zulhasida

Advisor 1: Dr. Triyana Syahfitri, S.H., M.H,
Advisor 2: Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H

ABSTRAK

This research is motivated by the legal void regarding women's financial post-divorce rights in wife-initiated divorce (cerai gugat). Positive law previously imposed iddah and mut'ah maintenance exclusively on husband-initiated divorces (cerai talak), disadvantaging wives forced to sue for divorce due to spousal negligence. To address this injustice, the Supreme Court issued SEMA No. 3 of 2018, ruling that wives in cerai gugat are entitled to mut'ah and iddah unless proven disobedient (nusyuz). However, its implementation at the Tembilahan Religious Court often collides with formal civil procedural principles, particularly the restriction against ruling beyond demands (ultra petita).

The problems examined include: (1) how SEMA No. 3 of 2018 is implemented at the Tembilahan Religious Court, (2) the obstacles faced by judges and their resolution efforts, and (3) the Islamic law analysis of this practice.

This empirical study utilizes a descriptive qualitative approach at the Tembilahan Religious Court. Purposive sampling was applied to judgment documents and key informants consisting of judges and Posbakum staff. Data analysis was conducted qualitatively using deductive reasoning, confronting legal norms with empirical realities.

The findings indicate that the implementation of SEMA No. 3 of 2018 remains suboptimal and oriented toward the ultra petita principle, as judges tend not to grant mut'ah and iddah ex officio without an explicit petitum. Key obstacles comprise procedural rigidity, low legal literacy among women, and execution barriers in verstek rulings. From an Islamic law perspective, this protection aligns with maqashid syariah to safeguard women's economic rights, yet it requires judicial progressiveness and optimized legal education via Posbakum.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI iii

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI x

BAB I 1

PENDAHAULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Kerangka Teori 12

F. Kerangka Konseptual 32

G. Metode Penelitian 34

H. Analisis Data 42

BAB II 43

TINJAUAN UMUM 43

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian dalam Perkawinan 43

B. Tinjauan Umum Hak *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* 73

C. Tinjauan Tentang SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai Pedoman Hakim 80

BAB III 94

HASIL DAN PEMBAHASAN 94

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tembilahan 94

B. Implementasi Pemberian Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Tembilahan 98
C. Kendala Yang Dihadapi Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Dalam Memberikan Hak Tersebut Dan Bagaimana Upaya Penyelesaiannya 115
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat Berdasarkan Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Tembilahan 132
BAB IV 149
PENUTUP 149
A. Kesimpulan 149
B. Saran 154
DAFTAR PUSTAKA 156
LAMPIRAN 163

DAFTAR TABEL

Tabel 1 36

Tabel 2 37

Tabel 3 37

Tabel 4 38

BAB I

PENDAHAULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan tegas menyatakan identitasnya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebuah komitmen konstitusional yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta penegakan keadilan bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi. Prinsip fundamental ini tertuang secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*. Komitmen konstitusional tersebut semakin dipertegas melalui jaminan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menitikberatkan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam paradigma negara hukum modern yang beraliran sosiologis dan progresif, pemaknaan terhadap hukum telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Hukum tidak lagi dipahami sekadar sebagai kumpulan teks normatif yang kaku (*law in books*), melainkan harus bertindak aktif dan responsif sebagai instrumen perlindungan (*legal protection*) dan rekayasa sosial (*social engineering*) bagi masyarakat yang berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan wajib melakukan afirmasi dan mengambil peran protektif, terutama bagi kelompok marginal seperti perempuan, agar mereka

tidak menjadi korban dari kekakuan prosedur yang acap kali mengabaikan keadilan materiil.[1]

Perlindungan hukum yang humanis dan berkeadilan tersebut harus ditegakkan secara saksama, terutama dalam ranah hukum keluarga dan institusi perkawinan yang menjadi fondasi terkecil dari sebuah negara. Perkawinan idealnya dibangun sebagai sebuah ikatan lahir batin yang sakral untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sebagaimana diamanatkan oleh kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Kendati demikian, realitas sosiologis menunjukkan dinamika yang jauh lebih kompleks; tidak jarang bahtera rumah tangga didera oleh berbagai konflik berkepanjangan, kekerasan, hingga krisis ekonomi yang tak kunjung usai. Dalam kondisi yang sudah tidak dapat dipertahankan tersebut, perceraian pada akhirnya terpaksa diambil sebagai jalan keluar darurat atau pilihan terakhir (*ultimum remedium*) demi menyelamatkan kemaslahatan fisik dan mental para pihak yang terlibat di dalamnya.

Putusnya ikatan perkawinan secara normatif melahirkan berbagai rentetan akibat hukum yang sangat kompleks, khususnya yang menyangkut jaminan kelangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak finansial mantan istri pasca-perceraian. Jaminan hak-hak tersebut meliputi nafkah *iddah* yang berfungsi sebagai biaya masa tunggu dan adaptasi, nafkah *mut'ah* sebagai bentuk pemberian penghibur atau kenang-kenangan dari mantan suami untuk

---

[1] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38

Suryanandana, D., Bakri, & Putra, BSA, "*Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*." Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, Volume 4, Nomor 2, 2024, hlm. 59

meringankan beban psikologis, hingga nafkah *madhiyah* yang merupakan utang nafkah masa lalu yang belum tertunaikan. Pemenuhan hak-hak finansial ini secara filosofis dan syariat merepresentasikan bentuk tanggung jawab moral, rekonsiliasi, serta penghargaan atas pengabdian panjang istri selama masa perkawinan. Lebih dari itu, instrumen finansial ini merupakan perisai pelindung utama yang diamanatkan oleh hukum agar kaum perempuan tidak serta-merta terperosok ke dalam jurang pemiskinan instan (*instant impoverishment*) atau fenomena feminisasi kemiskinan pasca-kehilangan sosok pencari nafkah utama.[2]

Meskipun nilai-nilai agung hukum Islam dan prinsip keadilan sosial secara inheren sangat berpihak pada pelestarian martabat dan perlindungan kaum perempuan, tataran hukum positif di Indonesia pada kenyataannya sempat menyisakan celah ketidakpastian (*rechtsonzekerheid*) yang cukup merugikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, beserta Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tekstual lebih dominan membebankan kewajiban pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara eksklusif pada perkara Cerai Talak, yakni perceraian yang diinisiasi oleh pihak suami. Konstruksi hukum klasik ini secara tidak langsung memberikan jaminan lebih besar kepada istri yang dicerai, namun justru menciptakan ambiguitas dan kekosongan norma ketika dihadapkan pada realita bahwa banyak istri yang terpaksa mengambil inisiatif untuk menggugat cerai karena

[2] Ahmad Zaenal Fanani, *"Keadilan Gender dalam Putusan Hakim Peradilan Agama Terhadap Hak Perempuan Pasca Perceraian,"* Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, 2019, hlm. 530

kondisi rumah tangga yang sudah hancur. Sementara itu, untuk perkara Cerai Gugat, yakni perceraian yang diajukan oleh pihak istri, nstrumen regulasi awal tidak mengatur secara tegas maupun imperatif mengenai kewajiban suami untuk tetap memberikan hak-hak finansial tersebut pasca-putusan. Kekosongan dan kelemahan norma ini pada akhirnya kerap melahirkan penafsiran hukum yang sangat bias gender, di mana sistem peradilan cenderung mendiskriminasikan kaum perempuan pencari keadilan. Terdapat sebuah dogma dan asumsi hukum yang keliru bahwa istri yang berani menggugat cerai suaminya dianggap secara otomatis telah melakukan pembangkangan (*nusyuz*), sehingga ia dinilai telah merelakan dan kehilangan seluruh hak keperempuanannya. Paradigma kaku ini gagal melihat akar permasalahan sosiologis secara jernih, di mana mayoritas cerai gugat justru diajukan karena sang suami terlebih dahulu melalaikan kewajiban ekonominya, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan istri.[3]

Menyikapi ketidakadilan substantif dan memecah kebuntuan perlindungan hukum tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga kehakiman tertinggi melakukan sebuah terobosan hukum yang sangat progresif melalui jalur legislasi yudisial. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memvalidasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018. Di dalam

[3] Muhammad In'am, *"Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia,"* Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 8, Nomor 2, 2019, hlm. 215

Rumusan Peraturan Kamar Agama Nomor (3) SEMA No. 3 Tahun 2018 secara revolusioner ditegaskan bahwa: *"Istri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz."* Lahirnya instrumen hukum ini mengemban misi sakral untuk menjamin kesetaraan gender dan memberikan jaminan perlindungan ekonomi bagi perempuan pasca-cerai gugat, sekaligus memutus dogma usang bahwa dalam situasi perceraian, pihak istri yang mengajukan tuntutan pembubaran pernikahan tidak akan memperoleh bagian finansial apa pun dari mantan suami.[4]

Melalui aturan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini, Mahkamah Agung memberikan legitimasi yuridis yang kuat bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama secara implisit mendorong para hakim di lingkungan peradilan agama untuk tampil lebih proaktif dalam menggali fakta dan menegakkan keadilan materiil di ruang sidang. Sebagai manifestasi dari sikap proaktif tersebut, hakim diberikan ruang dan legitimasi di mana mereka dapat menggunakan hak *ex officio*-nya apabila dipandang perlu, guna memastikan terpenuhinya hak-hak finansial istri meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit dituntut dalam surat gugatannya. Langkah progresif ini sejalan dengan konsep hukum progresif yang dikonsep oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum diciptakan demi kemaslahatan manusia, bukan sebaliknya, sehingga institusi peradilan wajib melakukan penemuan hukum

[4] Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*, hlm. 15

(*rechtsvinding*) yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan materiil, melampaui formalitas teks undang-undang yang rigid.[5]

Namun demikian, secara dogmatik hukum dan teori hukum acara, implementasi kebijakan progresif SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di meja persidangan ternyata memicu perdebatan teoretis yang sangat pelik dan bersinggungan langsung dengan asas-asas rigid dalam hukum acara perdata formal. Penggunaan hak *ex officio* oleh majelis hakim untuk memutus perkara dan membebankan kewajiban finansial yang sama sekali tidak dicantumkan dalam tuntutan (*petitum*) dinilai berbenturan dengan asas *iudex ne procedat ex officio* (hakim bersifat pasif) serta larangan keras memutus melebihi apa yang dituntut (*ultra petita*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (3) RBg. Benturan paradigma antara formalisme hukum acara klasik yang menuntut hakim bertindak layaknya wasit pasif dengan prinsip *dominus litis* dan semangat progresivitas untuk melindungi kelompok rentan, pada akhirnya menciptakan ketegangan dogmatis yang membingungkan para hakim di berbagai lingkungan peradilan.[6]

Perdebatan ini semakin meruncing ketika dihadapkan pada karakteristik Hukum Acara Peradilan Agama yang memiliki asas-asas kedisiplinan tersendiri. Meskipun Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa aturan acara yang digunakan sama dengan aturan acara perdata yang berlaku di pengadilan umum, baik HIR maupun RBg, yang juga diterapkan di peradilan

[5] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 121

[6] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 801

agama sejatinya memiliki kekhasan hukum formal yang bersumber dari hukum Islam. Dalam hukum acara peradilan agama, hakim didorong untuk bertindak sebagai *dominus litis* (aktif memimpin persidangan) guna menegakkan kebenaran materiil dan mencegah kemudaratan. Benturan paradigma antara formalisme HIR/RBg yang menuntut hakim pasif dengan prinsip dominus litis dan semangat progresivitas SEMA Mahkamah Agung inilah yang menciptakan ketegangan teoritis di meja hijau.[7]

Persoalan benturan norma, asas, dan paradigma hukum tersebut ternyata bukan sekadar wacana di atas kertas, melainkan benar-benar terjadi dalam praktik di Pengadilan Agama Tembilahan. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi di Kabupaten Indragiri Hilir, Pengadilan Agama Tembilahan setiap tahunnya menangani perkara perceraian dalam jumlah yang cukup besar. Ditambah lagi dengan wilayah hukum yang luas serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang beragam, faktor-faktor inilah yang menjadikan Pengadilan Agama Tembilahan sebagai lokasi yang tepat untuk diteliti lebih lanjut, terutama untuk melihat sejauh mana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 benar-benar berjalan efektif, serta hambatan apa saja yang muncul dalam penerapannya di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian mendalam yang peneliti lakukan secara langsung dengan Bapak Zulfikar, S.H.I. (yang pada saat wawancara tersebut menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Tembilahan), terungkap fakta empiris bahwa penerapan SEMA Nomor 3

[7] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 45

Tahun 2018 tidak dapat berjalan secara otomatis dan mulus. Keengganan hakim sering kali bukan disebabkan oleh ketidakinginan membela perempuan, melainkan akibat kekhawatiran melanggar batas kewenangan formal (*ultra petita*) serta ketakutan menghasilkan putusan yang *non-executable* (mandul) jika diputus secara *verstek*. Hambatan struktural ini semakin diperparah oleh kondisi sosiologis di mana literasi hukum para istri di daerah tersebut masih sangat rendah, sehingga mayoritas dari mereka datang ke Posbakum hanya dengan satu tujuan pragmatis, segera bercerai akibat lelah dengan konflik tanpa menyadari apalagi menuntut hak-hak finansial yang sejatinya dilindungi hukum.[8]

Ketidaksinkronan antara semangat perlindungan perempuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan rigidnya penerapan hukum acara di Pengadilan Agama Tembilahan ini menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang merugikan serta mereduksi nilai keadilan materiil bagi kaum perempuan. Kehadiran Tergugat dan kemampuan menyusun petitum formal seolah bergeser menjadi syarat mutlak, yang pada kenyataannya justru mengabaikan sifat imperatif dari tujuan diterbitkannya SEMA itu sendiri. Mengingat perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan pasca-perceraian merupakan pengejawantahan dari asas kemaslahatan (*al-maslahah al-mursalah*) dan perlindungan hukum dalam negara hukum, maka

[8] Wawancara dengan Bapak Zulfikar, S.H.I. (yang pada saat wawancara tersebut menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Tembilahan), 19 Februari 2026.

eksistensi problem hukum (*legal problem*) ini sangat urgen untuk diteliti secara mendalam dan komprehensif.[9]

Guna menjawab urgensi tersebut sekaligus mengurai kompleksitas masalah yang melingkupi teks hukum dan realitas lapangan secara objektif, penelitian ini tidak akan berhenti pada sekadar pengujian asumsi teoretis normatif semata. Penelitian ini dirancang secara khusus melalui pendekatan studi empiris dengan melakukan perbandingan terhadap tiga kategori perkara cerai gugat yang secara nyata terjadi di Pengadilan Agama Tembilahan. Kategori pertama menyoroti perkara cerai gugat murni tanpa tuntutan hak sama sekali (sebagaimana terepresentasikan dalam Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Tbh) untuk melihat sejauh mana kekuatan asas pasif hakim dipertahankan. Kategori kedua meneliti perkara cerai gugat di mana istri hanya menuntut hak asuh dan biaya anak, namun secara ironis mengabaikan tuntutan hak *mut'ah* dan *iddah* untuk dirinya sendiri (sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Tbh). Sedangkan kategori ketiga menganalisis perkara cerai gugat dengan tuntutan hak utuh melalui pendampingan Penasihat Hukum (sebagaimana diputus dalam Perkara Nomor 376/Pdt.G/2026/PA.Tbh) guna mengukur efektivitas keberhasilan SEMA No. 3 Tahun 2018. Melalui pembedahan komparatif pada ketiga variasi putusan ekstrem ini, dinamika, benturan, dan hambatan implementasi hukum dapat dipetakan dengan presisi yang sangat tinggi.

---

[9] Standarda Al-Farisi, *"Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2018,"* Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 9, Nomor 1, 2021, hlm. 75-78

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang, benturan teoritis asas hukum, serta data konkret hasil pra-penelitian lapangan di atas, peneliti memandang perlu untuk menuangkan problematika ini ke dalam sebuah penelitian skripsi ilmiah. Penelitian ini diharapkan mampu mengurai solusi teoretis dan praktis atas dilema penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul proposal penelitian skripsi ini: **"Implementasi Hukum Islam Terhadap Pemberian Hak Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Studi di Pengadilan Agama Tembilahan)".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran uraian latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana implementasi pemberian hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkara cerai gugat berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan?
2. Apa kendala yang dihadapi Hakim Pengadilan Agama Tembilahan dalam memberikan hak tersebut dan bagaimana upaya penyelesaiannya?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat berdasarkan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah tersebut di atas maka yang menjadi tujuan-tujuan pokok dalam pembahasan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui konsep dan dasar pengaturan hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi pemberian hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada istri dalam perkara cerai gugat serta kesesuaiannya dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat berdasarkan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan penelitian ini bisa menyumbangkan gagasan baru untuk ilmu hukum perdata, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan perempuan dalam persoalan hukum.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi oleh praktisi hukum, masyarakat umum, ataupun pertimbangan dalam melakukan penelitian yang lebih berbobot khususnya tentang implementasi hukum

Islam terhadap pemberian hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "perlindungan" diambil dari kata dasar "lindung", yang memiliki makna mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sementara itu, perlindungan diartikan sebagai bentuk penjagaan, pemeliharaan, atau upaya melindungi dari bahaya, baik terhadap kepentingan, benda, maupun seseorang.[10] Perlindungan juga mengandung makna adanya pengayoman, khususnya dari pihak yang memiliki kuasa lebih besar kepada pihak yang memiliki kuasa lebih kecil. Secara hukum, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya perlindungan yang diberikan melalui perangkat dan mekanisme hukum. Artinya, segala tindakan yang dilakukan secara sadar oleh individu, lembaga pemerintah, maupun pihak swasta untuk menjamin keamanan, penguasaan, dan kesejahteraan hidup harus sesuai dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[11]

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang ditujukan untuk menjamin dan menjaga hak asasi manusia yang dirugikan akibat perbuatan orang lain. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah agar setiap warga

---

[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/perlindungan, Diakses pada 18 April 2026

[11] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh sistem hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, perlindungan hukum mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman maupun gangguan.[12]

Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum pada awalnya bersumber dari teori hukum alam. Aliran hukum alam ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles (yang merupakan murid Plato), dan Zeno sebagai pendiri aliran Stoik. Dalam pandangan aliran ini, hukum diyakini berasal dari Tuhan, bersifat universal dan berlaku sepanjang masa. Selain itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari moral, karena keduanya saling berkaitan. Para penganutnya melihat bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dari aturan kehidupan manusia, baik dalam aspek batin (internal) maupun dalam hubungan sosial (eksternal), yang diwujudkan dalam bentuk norma hukum dan nilai-nilai moral.[13]

Fitzgerald, dengan merujuk pada pemikiran Salmond, menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah menyelaraskan dan mengatur berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting karena dalam kehidupan sosial sering terjadi benturan kepentingan, sehingga melindungi sebuah kepentingan dapat tercapai dengan cara membatasi kepentingan lainnya.Kemanfaatan hukum tersendiri berhubungan dengan hak dan

[12] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 74
[13] *Ibid*,. hlm 53

kebutuhan insan, sehingga hukum mempunyai kekuasaan paling utama untuk menetapkan kemanfaatan mana yang mesti diatur dan dijaga. Selain itu, perlindungan hukum tidak muncul begitu saja, tetapi melalui tahapan yang berawal dari adanya ketentuan dan peraturan hukum yang dibentuk dalam masyarakat.[14]

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan bentuk perlindungan hukum secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama:

1. Sebagai bentuk pencegahan, perlindungan hukum preventif memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pandangan mereka sebelum adanya aturan hukum atau keputusan pemerintah mendapat bentuk yang tetap atau sah. Tujuan dari pencegahan ini adalah mencegah terjadinya perselisihan. Kehadiran perlindungan hukum yang bersifat preventif memegang peranan penting bagi jalannya roda pemerintahan yang mengandalkan kebebasan bertindak. Dengan adanya mekanisme ini, pemerintah didorong untuk bersikap lebih cermat ketika menetapkan keputusan yang bertumpu pada asas diskresi. Sayangnya, hingga saat ini regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum preventif tersebut belum tersedia di Indonesia.
2. Pada prinsipnya, perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang telanjur timbul. Akar sejarah perlindungan ini bermula dari pemikiran hukum Barat

[14] *Ibid,*. hlm. 54

yang menekankan pengakuan HAM guna membatasi ruang gerak pemerintah serta menetapkan batas kewajiban warga negara. Di samping itu, landasan berikutnya yang menopang perlindungan hukum bagi tindakan aparatur pemerintah adalah konsep negara hukum. Dengan kata lain, perlindungan hak-hak dasar manusia merupakan tujuan esensial yang berkelindan erat dengan cita-cita negara hukum.[15]

Teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk menganalisis kedudukan istri dalam perkara cerai gugat sebagai pihak yang rentan kehilangan hak ekonominya. Sebagaimana dijelaskan oleh Fitzgerald, hukum berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan yang saling berbenturan dan memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih lemah. Dalam konteks ini, istri sering kali berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang tidak menguntungkan saat menghadapi perceraian. Penggunaan teori ini bertujuan untuk membedah apakah perangkat hukum yang ada telah berfungsi sebagai "perisai" yang membentengi hak-hak istri dari potensi kesewenang-wenangan atau pengabaian, sejalan dengan prinsip *equality before the law*.

Selain itu, teori ini relevan untuk mengevaluasi efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat represif. Sesuai dengan klasifikasi Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan

[15] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 40

memulihkan hak-hak asasi manusia yang terganggu. Dalam penelitian ini, SEMA tersebut dipandang sebagai upaya Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan nyata bagi perempuan pasca-perceraian tanpa harus terjebak dalam formalitas petitum. Teori ini akan membantu peneliti mengukur sejauh mana hakim di Pengadilan Agama Tembilahan telah menjalankan fungsi perlindungan tersebut secara aktif.

Terakhir, penerapan teori perlindungan hukum ini mendasari argumen bahwa pemenuhan hak mut'ah dan nafkah iddah bukan sekadar urusan administratif, melainkan manifestasi dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Mengingat tujuan utama perlindungan hukum adalah agar setiap warga dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh sistem hukum, maka pengabaian terhadap hak istri karena alasan efisiensi durasi persidangan dapat dianggap sebagai kegagalan negara dalam memberikan perlindungan. Dengan demikian, teori ini menjadi alat analisis kritis untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi yang progresif dengan realitas praktik peradilan di lapangan.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Dengan demikian, keadilan memiliki makna bahwa setiap keputusan dan tingkah laku harus didasarkan pada norma-norma yang objektif.[16] Pada hakikatnya, konsep keadilan memiliki sifat yang subyektif dan tidak mutlak. Penilaian mengenai suatu tindakan atau keputusan yang adil sering kali bergantung pada perspektif masing-masing individu, sehingga apa yang dipandang adil oleh satu pihak bisa saja dinilai tidak adil oleh pihak yang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan telah berlaku adil, penilaian tersebut harus dikaitkan dengan ketertiban umum yang berlaku, di mana suatu standar keadilan diakui. Standar keadilan sendiri dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat memiliki nilai, norma, dan ketertiban umum yang menjadi dasar dalam menentukan apa yang dianggap adil.

Dalam konteks tersebut, keadilan dapat dipahami sebagai suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keseimbangan ini pada praktiknya diwujudkan melalui pemberian perlakuan yang sama terhadap setiap orang dalam situasi yang setara. Konsep ini sejalan dengan apa yang dikenal sebagai keadilan formal, yaitu perlakuan yang sama terhadap setiap orang tanpa membedakan latar

[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/keadilan, Diakses pada 18 April 2026

belakang. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, perlakuan yang berbeda justru diperlukan untuk mencapai keadilan yang lebih hakiki. Hal ini dikenal sebagai keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berfokus pada persamaan perlakuan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan situasi konkret yang dihadapi oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, perbedaan perlakuan tersebut harus didasarkan pada alasan yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[17]

Berdasarkan pemahaman tersebut, keadilan yang diharapkan oleh masyarakat kemudian diwujudkan dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), yang berfungsi melindungi dan mengayomi seluruh hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara hukum, keadilan tidak hanya menjadi konsep abstrak, tetapi harus diimplementasikan secara konkret melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai instrumen utama dalam menentukan apa yang dianggap adil dan tidak adil, sekaligus menjadi pedoman dalam mewujudkan keadilan dalam praktik kehidupan bermasyarakat.[18]

Pemikiran tentang keadilan juga telah lama dikaji oleh para filsuf, salah satunya adalah Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics*. Aristoteles mengenai keadilan terletak pada prinsip pemberian hak yang menjunjung tinggi aspek persamaan, namun secara tegas membedakannya

---

[17] Farkhani dkk, *Filsafat Hukum: Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme,* Kafilah Publishing, Solo, 2018, hlm. 102

[18] *Ibid*

dari konsep persamarataan. Beliau mengonstruksikan keadilan melalui dua sudut pandang, yakni kesamaan hukum yang memposisikan setiap warga negara sebagai entitas yang setara di hadapan aturan (*equality before the law*), serta kesamaan proporsional yang jauh lebih dinamis. Dalam dimensi proporsional ini, distribusi hak tidak dilakukan secara dipukul rata, melainkan disesuaikan secara spesifik dengan kapasitas, kontribusi, serta prestasi nyata yang telah dedikasikan oleh masing-masing individu, sehingga keadilan diwujudkan melalui keseimbangan antara hak yang diterima dengan tanggung jawab yang dijalankan.[19]

Dengan demikian, keadilan menurut Aristoteles tidak hanya menekankan persamaan, tetapi juga mempertimbangkan proporsi yang adil dalam pembagian hak dan kewajiban.

Dalam tinjauan yang lebih spesifik, Aristoteles mengklasifikasikan konsep keadilan ke dalam dua kategori utama, yakni keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan komutatif (*commutative justice*). Keadilan distributif beroperasi dengan memberikan beban atau manfaat kepada setiap individu berdasarkan proporsi prestasi dan kontribusinya. Sebaliknya, keadilan komutatif mengedepankan prinsip kesetaraan absolut, di mana setiap orang menerima porsi yang identik tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang atau prestasi individu, yang umumnya diimplementasikan dalam ranah pertukaran barang maupun

[19] Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

jasa.[20] Dualisme konsep ini sering kali memicu perdebatan panjang karena menawarkan standar pengukuran yang berbeda dalam menentukan apa yang dianggap pantas bagi seseorang.

Memasuki akhir abad ke-20, John Rawls, seorang pemikir terkemuka asal Amerika Serikat, menghadirkan gagasan revolusioner melalui karya-karya monumentalnya seperti *A Theory of Justice, Political Liberalism,* hingga *The Law of Peoples*, yang gagasan-gagasannya terbukti sangat berpengaruh dalam membangun perdebatan seputar nilai keadilan. Dari sudut pandang *"liberal-egalitarian"*, Rawls menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi kebajikan yang paling esensial bagi setiap institusi sosial. Ia menekankan bahwa kepentingan kolektif masyarakat tidak boleh menjadi pembenar untuk mengorbankan atau mereduksi rasa keadilan yang dimiliki oleh setiap individu. Prinsip ini menjadi pembelaan moral yang sangat kuat, terutama bagi kelompok masyarakat lemah yang sedang berjuang mencari keadilan, guna memastikan hak-hak mereka tidak tergilas oleh struktur sosial yang ada.[21]

John Rawls secara mendalam merumuskan prinsip-prinsip keadilannya melalui dua instrumen konseptual utama, yaitu "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Dalam konstruksi pemikirannya, John Rawls memikirkan sebuah kondisi ideal yang disebut sebagai "posisi asali" (*original position*), di mana setiap individu berada dalam kedudukan yang sepenuhnya setara tanpa adanya

[20] *Ibid*

[21] Ahmad Zaenal Fanani, *"Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum"*, Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum, Volume 5, Nomor 2, 2017, hlm. 210–220

sekat stratifikasi sosial, status, maupun jabatan. Situasi egaliter ini memungkinkan terciptanya kesepakatan yang berimbang melalui proses *ekuilibrium reflektif* yang berlandaskan pada prinsip rasionalitas, kebebasan, serta persamaan hak demi menata struktur dasar masyarakat secara adil. Untuk menjamin kemurnian objektivitas tersebut, Rawls memperkenalkan instrumen "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), sebuah kondisi fiktif di mana setiap orang dilepaskan dari kesadaran akan identitas pribadinya, doktrin keyakinan, maupun posisi sosial mereka di masa depan. Kebutaan terhadap kepentingan diri sendiri inilah yang memaksa setiap pihak untuk merumuskan prinsip-prinsip persamaan yang imparsial, sebuah gagasan fundamental yang oleh Rawls didefinisikan sebagai "keadilan sebagai kejujuran" (*justice as fairness*).[22]

John Rawls merumuskan prinsip keadilan dalam dua pilar utama. Pertama adalah prinsip kebebasan yang setara (*equal liberty principle*), yang menjamin hak-hak fundamental setiap individu seperti kebebasan beragama, hak politik, serta kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sementara itu, kedua mencakup prinsip perbedaan (*difference principle*) yang berlandaskan pada asumsi persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Dalam pandangannya mengenai keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat, Rawls menekankan bahwa penegakan hukum wajib menjamin distribusi hak atas kebebasan dasar secara luas dan merata,

[22] Pan Mohamad Faiz, *'Teori Keadilan John Rawls"*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, April, 2009, hlm. 135

sekaligus mampu merekayasa ulang kesenjangan sosial-ekonomi guna menciptakan keuntungan timbal balik bagi seluruh lapisan masyarakat.[23]

Dengan demikian, prinsip perbedaan ini menuntut penataan struktur dasar masyarakat sedemikian rupa agar distribusi kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diprioritaskan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Implikasinya, keadilan sosial harus diperjuangkan melalui dua langkah strategis yaitu pertama, melakukan reformasi terhadap kondisi ketimpangan yang menimpa kaum lemah dengan menghadirkan institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memiliki fungsi pemberdayaan. Kedua, memastikan setiap regulasi hukum berperan sebagai instrumen pemandu dalam melahirkan kebijakan-kebijakan korektif untuk menghapuskan praktik ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat marginal.

Sementara, menurut Hans Kelsen dalam karyanya yang fenomenal, *General Theory of Law and State* merumuskan bahwa sebuah tatanan sosial dapat dikatakan adil jika mampu mengarahkan perilaku manusia melalui cara-cara yang memuaskan, sehingga setiap individu dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.[24] Sebagai penganut positivisme hukum, Kelsen berpendapat bahwa keadilan individu harus diderivasikan melalui aturan hukum tertulis yang mengakomodasi nilai-nilai umum, namun muara akhirnya tetaplah pemenuhan rasa keadilan serta kesejahteraan bagi tiap-tiap pribadi.

---

[23] *Ibid,*. hlm. 139-140

[24] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7

Lebih lanjut, Kelsen memandang keadilan sebagai sebuah pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Meskipun sebuah tatanan yang adil sering kali didefinisikan sebagai upaya mewujudkan kebahagiaan kolektif bagi sebanyak mungkin orang, seperti pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan, ia mempertanyakan prioritas kebutuhan mana yang harus didahulukan. Baginya, jawaban atas prioritas tersebut tidak bisa sepenuhnya rasional karena sangat dipengaruhi oleh faktor emosional dan subjektivitas pembuat hukum dalam menilai kebutuhan yang dianggap patut dipenuhi.[25]

Sebagai aliran posiitivisme Hans Kelsen tetap memberikan ruang bagi keberadaan keadilan mutlak yang bersumber dari hukum alam dengan mengakui adanya doktrin hukum alam yang meyakini keteraturan hubungan manusia berasal dari hakikat manusia, nalar, atau kehendak Tuhan. Doktrin ini memposisikan adanya hukum yang lebih tinggi, sahih, dan adil dibandingkan hukum positif. Hal inilah yang menyebabkan pemikiran Kelsen tentang keadilan memiliki karakteristik unik berupa dualisme, yakni persinggungan antara validitas hukum positif yang diciptakan manusia dengan aspirasi keadilan dari hukum alam.[26]

Berdasarkan kombinasi teori keadilan klasik dan kontemporer peneliti menggunakan teori tersebut guna membedah kompleksitas perlindungan hak perempuan di Pengadilan Agama Tembilahan. Teori Keadilan John Rawls, khususnya prinsip perbedaan (*difference principle*),

[25] *Ibid,*. hlm. 9
[26] *Ibid,*. hlm. 12-14

menjadi alasan utama dalam penelitian ini untuk mengevaluasi peran institusi peradilan dalam mengoreksi ketimpangan sosial. Dalam perkara cerai gugat, istri sering kali berada dalam posisi yang kurang beruntung (*least advantaged*) karena terbatasnya pemahaman hukum untuk mencantumkan hak nafkah dalam petitum. Sejalan dengan pandangan Bur Rasuanto, keadilan menuntut agar institusi publik termasuk pengadilan yang berperan sebagai instrumen pemulih atas ketidakadilan nasib melalui kebijakan yang memberdayakan.[27] Dengan demikian, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berdasar peran aktif hakim merupakan wujud nyata dari upaya institusi untuk menghadirkan keadilan bagi kelompok marginal.

Selain itu, Teori Keadilan Aristoteles mengenai keadilan distributif digunakan untuk memberikan dasar argumentasi bahwa pembagian hak ekonomi pasca-perceraian harus dilakukan secara proporsional. Alasan pemilihan teori ini adalah untuk mengkritik diskriminasi praktik di mana hak mut'ah dan iddah cenderung diberikan secara otomatis pada cerai talak, namun diabaikan pada cerai gugat jika tidak diminta. Menurut Sudikno Mertukusumo, keadilan hukum harus diwujudkan dalam pelaksanaan yang konkret agar setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya.[28] Peneliti berargumen bahwa kesamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*) mewajibkan hakim untuk memastikan bahwa setiap istri, terlepas dari

---

[27] Rasuanto, Bur. K*eadilan Sosial: Pandangan John Rawls*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 62

[28] Asshiddiqie, Jimly & Safa'at, M. Ali. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Konstitusi* Press, Jakarta, 2012, hlm. 115

jenis perkaranya, menerima porsi keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh negara.

Terakhir, Teori Keadilan Hans Kelsen diaplikasikan sebagai alasan untuk mempertegas aspek legalitas yang harus ditaati oleh para hakim. Kelsen menekankan bahwa tatanan hukum dianggap adil jika ia benar-benar diterapkan secara konsisten sesuai dengan aturan yang telah mengakomodasi nilai-nilai kepentingan umum. Alasan penggunaan teori ini adalah untuk menegaskan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bukan sekadar imbauan moral, melainkan standar legalitas yang wajib dijalankan demi kepastian hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, hukum positif harus mampu menjamin kebahagiaan individu melalui penegakan norma yang sah.[29] Melalui perspektif ini, peneliti bertujuan membuktikan bahwa sikap pasif hakim dalam menerapkan SEMA tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap tatanan hukum yang adil, yang pada akhirnya mencederai tujuan hukum dalam melindungi masyarakat.

3. Teori Kepastian Hukum

Secara konseptual, kepastian merupakan suatu kondisi yang tetap, jelas, dan tidak dapat diubah-ubah. Dalam ranah hukum, esensi utamanya adalah keharusan untuk senantiasa menghadirkan jaminan kepastian sekaligus keadilan. Mengacu pada pemikiran Hans Kelsen, tatanan hukum pada dasarnya dibangun di atas sistem norma. Norma itu sendiri mewakili dimensi *das sollen* (apa yang seyogianya terjadi), yang memuat instruksi

[29] Mertukusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,* Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 161

tentang bagaimana tindakan seseorang seharusnya dilakukan. Berbagai norma tersebut lahir dari hasil proses pertimbangan dan kesengajaan manusia. Di sisi lain, undang-undang berkedudukan sebagai panduan umum bagi interaksi setiap orang di dalam lingkungan sosialnya. Keberadaan hukum tertulis ini bertindak sebagai batasan yang mencegah masyarakat atau pihak lain memberikan tindakan yang sewenang-wenang kepada individu. Lahirnya jaminan kepastian hukum sangat bergantung pada eksistensi aturan tersebut beserta realisasi penerapannya secara nyata.[30]

Dalam dimensi normatif, kepastian hukum akan terwujud apabila suatu regulasi dibentuk dan disahkan secara tegas, rasional, serta bebas dari ambiguitas. Artinya, rumusan aturan tersebut tidak boleh menyisakan celah interpretasi ganda. Kelogisan sebuah aturan juga ditandai oleh keselarasan dengan norma-norma lainnya, sehingga potensi tumpang tindih atau benturan hukum dapat dihindarkan. Kepastian ini mewajibkan hukum untuk ditegakkan secara ajek, konsisten, dan objektif tanpa bisa diintervensi oleh faktor maupun keadaan subjektif pihak manapun. Lebih jauh lagi, kepastian maupun keadilan sesungguhnya bukan sebatas aspirasi etis, melainkan karakter faktual yang mendefinisikan keberadaan hukum itu sendiri. Tatanan yang gagal menjamin kepastian serta enggan bersikap adil tidak hanya pantas disebut sebagai produk hukum yang cacat, tetapi pada dasarnya telah kehilangan roh utamanya.[31]

---

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158
[31] Cst Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

Salah satu rujukan fundamental mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, yang mengonsepkan kepastian hukum sebagai probabilitas ketercapaian situasi-situasi berikut dalam realitas hukum:

1. Tersedianya perangkat aturan yang jernih, konsisten, serta aksesibel, yang diterbitkan dan diakui validitasnya berdasarkan otoritas kekuasaan negara.
2. Adanya komitmen dari instansi-instansi penguasa untuk mengimplementasikan peraturan tersebut secara konsisten serta tunduk sepenuhnya di bawah payung hukum yang ada.
3. Masyarakat secara prinsipil memiliki kesadaran hukum untuk menyesuaikan pola perilakunya berdasarkan tuntutan peraturan tersebut.
4. Peradilan yang mandiri dan imparsial secara konsisten menerapkan aturan hukum yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa.
5. Adanya jaminan bahwa setiap keputusan peradilan dapat dilaksanakan secara konkret (*execution*).[32]

Jan Michiel Otto menegaskan bahwa ketercapaian kepastian hukum sangat bergantung pada sejauh mana substansi regulasi selaras dengan kebutuhan riil di tengah masyarakat. Menurut pandangannya, aturan hukum baru dapat menciptakan kepastian yang hakiki apabila ia berakar dan merefleksikan nilai-nilai budaya yang hidup secara organik.

[32] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 28

Konstruksi pemikiran Otto ini sering kali diidentifikasi sebagai "kepastian hukum yang realistis" (*realistic legal certainty*). Konsep ini menekankan pentingnya harmoni antara otoritas negara dengan rakyat, di mana kedua belah pihak memiliki kesamaan visi dan pemahaman yang mendalam terhadap sistem hukum yang berlaku.

Meskipun Otto memandang bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memiliki dimensi yuridis yang kuat, ia membatasi ruang lingkupnya pada lima parameter situasional yang saling berkaitan. Lebih jauh, ia berpendapat bahwa beban tanggung jawab untuk menjaga kepastian tersebut berada pada pundak institusi penegak hukum. Bagi Otto, penegakan hukum bukan sekadar rutinitas formalitas, melainkan sebuah misi vital untuk menjamin terciptanya ketertiban sosial dan keadilan yang nyata bagi setiap lapisan masyarakat.

Pemikiran tersebut selaras dengan pandangan Sudikno Mertukusumo, yang menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan nyata bahwa hukum akan dioperasikan dengan tata cara yang semestinya. Kepastian hukum menuntut adanya formulasi aturan dalam perundang-undangan oleh otoritas yang berwenang, sehingga setiap norma memiliki kekuatan yuridis yang menjamin fungsi hukum sebagai peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh subjek hukum.[33]

Lebih lanjut, konstruksi Teori Kepastian Hukum ini bertumpu pada empat pilar konsep dasar sebagai berikut:

---

[33] Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 20

1. Kepastian dan Kejelasan Aturan, yang mana pilar ini menekankan bahwa hukum harus diformulasikan secara lugas, mudah dicerna, dan tidak mengandung kerancuan. Redaksi hukum yang kabur hanya akan melahirkan ketidakpastian bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan bahasa hukum yang presisi mutlak diperlukan guna menghindari disparitas interpretasi.
2. Konsistensi Hukum, di mana kepastian mensyaratkan adanya sinkronisasi antarperaturan agar tidak saling berbenturan. Pertentangan norma hanya akan memicu kebingungan hukum. Selain konsistensi teks, diperlukan pula konsistensi dalam penerapan hukum oleh institusi penegak hukum, termasuk lembaga peradilan, guna menjaga wibawa hukum itu sendiri.
3. Keteraturan dan Stabilitas, hukum harus berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan stabilitas sosial melalui aspek prediktabilitas. Artinya, setiap individu harus mampu memprediksi konsekuensi yuridis dari tindakan mereka. Stabilitas ini pada akhirnya memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat dalam menjalankan interaksi sosial, ekonomi, maupun pribadi.
4. Pelaksanaan dan Penegakan, epastian hukum tidak berhenti pada aspek tekstual (l*aw in books*), melainkan sangat bergantung pada aspek aplikatif (*law in action*). Proses penegakan hukum wajib dilakukan secara adil, konsisten, dan non-diskriminatif. Apabila

terjadi inkonsistensi dalam penegakan hukum, maka legitimasi hukum di mata individu dan masyarakat akan terdegradasi.[34]

Maka dari itu bagi para pencari keadilan, terwujudnya kepastian hukum merupakan tumpuan utama. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi pelindung dari potensi kesewenang-wenangan maupun sikap arogan yang tak jarang ditunjukkan oleh oknum aparat saat melaksanakan kewenangannya. Berkaitan dengan keberadaan serta peran dan tugas hakim yang selalu berada dibalik peraturan perundang-undangan (hukum), dimaksudkan tidak lain untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terciptanya kepastian hukum. Usaha menciptakan kepastian hukum senantiasa tercermin dari setiap tindakan, perbuatan dan perilaku hakim dalam penanganan dan penyelesaian suatu perkara atau persengketaan.[35]

Teori Kepastian Hukum dipilih sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini karena urgensinya dalam mengukur efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan. Penggunaan teori ini adalah untuk membedah apakah hak mut'ah dan iddah dalam cerai gugat telah mendapatkan perlindungan yang pasti secara yuridis, ataukah masih terdapat pengabaian akibat hakim yang cenderung pasif dan terpaku pada formalitas gugatan.

Alasan penerapan teori ini didasarkan pada temuan awal yang menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma (*das sollen)* dengan

---

[34] Adriaan W. Bedner, dkk. (Eds.), *Kajian Sosio-Legal,* Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 115-121

[35] Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim,* Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 13

praktik (*das sein*) di Pengadilan Agama Tembilahan. Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan aturan yang konsisten melalui SEMA, namun pada praktiknya, hakim cenderung bersikap pasif jika hak tersebut tidak dicantumkan dalam petitum gugatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum tercapai secara sempurna. Sebagaimana dijelaskan oleh Achmad Ali, kepastian hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai kepastian undang-undang (*law in books*), melainkan harus mencakup kepastian hukum dalam penerapannya (*law in action*) oleh hakim.[36] Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat pencari keadilan, di mana hasil putusan tidak dapat diprediksi (*predictability*) dan sangat bergantung pada inisiatif administratif di tingkat Posbakum, bukan pada substansi perlindungan hak perempuan yang telah diamanatkan oleh otoritas hukum tertinggi.

Melalui perspektif kepastian hukum, peneliti bertujuan untuk membedah hambatan sistemik yang menyebabkan keputusan peradilan belum dilaksanakan secara konkret sesuai mandat SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Teori ini membantu menjawab rumusan masalah mengenai kesesuaian praktik pemberian *mut'a*h dan nafkah *iddah* dengan standar kepastian hukum yang menghendaki penegakan yang adil, konsisten, dan tidak diskriminatif antara perkara cerai talak dan cerai gugat. Dengan demikian, penggunaan teori ini diharapkan dapat memberikan dasar argumentasi untuk mewujudkan standarisasi implementasi hukum yang

[36] Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2009, hlm. 295

menjamin hak ekonomi perempuan pasca-perceraian terpenuhi secara pasti, karena hukum yang memiliki kepastian haruslah memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang telah diatur.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman guna menghindari perbedaan interpretasi dan menyamakan persepsi pembaca, bagian ini akan menguraikan batasan operasional dari konsep-konsep dasar yang digunakan. Adapun beberapa istilah kunci yang perlu didefinisikan dalam studi ini meliputi:

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi kerap dikaitkan dengan suatu suatu proses yang dinamis, di mana aktivitas atau kegiatan tertentu dilakukan sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan melalui tindakan nyata sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.[37]
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui wahyu yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur tingkah laku manusia mukallaf demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.[38]

---

[37] Budi Setiyono, *Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Publik*, Lembaga Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro,Jakarta, 2017, hlm. 125

[38] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 46

3. Pemberian dalam konteks hukum perdata dan keluarga merupakan tindakan pemindahan hak atau pengalihan nilai ekonomis dari satu pihak kepada pihak lain yang didasari oleh alas hak yang sah atau perintah ketentuan perundang-undangan.[39]
4. *Mut'ah* adalah pemberian berupa uang atau barang dari mantan suami kepada istri yang dijatuhi talak sebagai bentuk kompensasi (penghibur) agar meringankan beban penderitaan istri akibat putusnya perkawinan.[40]
5. Nafkah *iddah* adalah kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya hidup (makanan, pakaian, tempat tinggal) kepada mantan istri selama masa tunggu (*iddah)*, sepanjang istri tersebut tidak dalam keadaan *nusyuz* (durhaka).[41]
6. Perkara adalah suatu sengketa atau perselisihan hukum antara dua pihak atau lebih yang diajukan ke lembaga peradilan untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[42]
7. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

---

[39] C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, PT Balai Pustaka Jakarta, 2018, hlm. 142

[40] Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit*,. hlm. 212

[41] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana Jakarta, 2010, hlm. 245

[42] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 45

kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.[43]

8. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 adalah regulasi internal Mahkamah Agung pada Kamar Agama poin 3, menetapkan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.[44]
9. Pengadilan Agama Tembilahan adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hilir.[45]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis.[46] Metode penelitian juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara. Ada beberapa aspek didalam metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

---

[43] Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

[44] Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, hlm. 14-15

[45] Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

[46] Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi,* Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2021, hlm. 13

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, disebut sebagai *empirical legal research* dalam bahasa Inggris dan *empirisch juridisch onderzoek* dalam bahasa Belanda, adalah penelitian yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap manifestasi hukum yang hidup dan berkembang di tengah dinamika masyarakat secara nyata.[47]

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dengan sifat deskriptif kualitatif merupakan menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait sikap hakim, hambatan eksekusi putusan, serta tingkat pemahaman para pencari keadilan terhadap hak-hak pasca-perceraian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Tembilahan yang beralamat di Jl. Soebrantas No. 77 Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa masih adanya permasalahan yang dialami di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan dan juga mempermudah peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan yang sesuai dengan penelitian peneliti mengenai Implementasi Hukum Islam Terhadap Pemberian Hak *Mut'ah* dan Nafkah

[47] Salim HS, dan Erlin Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20

Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Studi di Pengadilan Agama Tembilahan).

3. Populasi dan Sampel

Populasi dapat dimaknai sebagai ruang lingkup komprehensif yang mencakup semua objek atau individu dengan karakteristik spesifik. Peneliti menetapkan kelompok ini sebagai fokus kajian untuk dianalisis hingga menghasilkan sebuah kesimpulan akhir.[48] Dalam penelitian ini, populasi terbagi menjadi dua, yaitu populasi dokumen (salinan putusan) dan populasi subjek (informan manusia).

Populasi dokumen dalam penelitian ini adalah keseluruhan putusan perkara Cerai Gugat yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Pengadilan Agama Tembilahan pada periode tahun 2023-2026.

Tabel 1
Populasi Dokumen Putusan Cerai Gugat
PA Tembilahan Tahun 2023-2026

NO	Jenis Perkara	Tahun	Populasi
1	Cerai Gugat	2023	631
2	Cerai Gugat	2024	576
3	Cerai Gugat	2025	718
4	Cerai Gugat	2026	*Sedang Berrjalan*
	Total		**± 1.925**

[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Alfabeta, Bandung 2013, hlm. 80

***Sumber:** *Laporan Keadaan Perkara LIPA.1 dan Penelusuran Direktori Putusan Pengadilan Agama Tembilahan (Data diolah tahun 2026).*

Populasi subjek adalah keseluruhan aparatur penegak hukum dan petugas yang menangani perkara perceraian dan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Tembilahan pada saat penelitian ini dilakukan.

Tabel 2
Populasi Subjek (informan) PA Tembilahan Tahun 2023-2026

NO	Jenis Perkara	Populasi
1	Hakim Pengadilan Agama Tembilahan	7
2	Staf / Petugas Posbakum	3
	Total	**10**

***Sumber:** *Data Kepegawaian Pengadilan Agama Tembilahan (Data diolah tahun 2026).*

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (penarikan sampel bertujuan), yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Mengingat penelitian ini menggunakan dua jenis populasi, penarikan sampel dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

Dari ratusan populasi putusan cerai gugat yang ada, peneliti secara *purposive* menarik 3 (tiga) putusan yang mewakili tiga kriteria perihal penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Tabel 3
Sampel Dokumen Putusan Perkara Cerai Gugat

NO	Jenis Perkara	Kriteria	Alasan Pemilihan
1	783/Pdt.G/2023/PA.Tbh	Cerai Gugat Murni Tanpa Tuntutan Hak	Mewakili kriteria kasus di mana istri tidak menuntut hak apa pun,

			untuk menguji sejauh mana sikap kehati-hatian hakim terhadap asas *ultra petita* dipertahankan.
2	805/Pdt.G/2023/PA.Tbh	Cerai Gugat dengan Tuntutan Hak Anak Saja	Mewakili kriteria kasus di mana istri menuntut hak asuh dan biaya anak, namun mengabaikan hak untuk dirinya sendiri, guna memotret tingkat literasi hukum istri sekaligus kepasifan hakim.
3	376/Pdt.G/2026/PA.Tbh	Cerai Gugat dengan Tuntutan Hak *Mut'ah* dan *Iddah*	Mewakili kriteria kasus di mana istri menuntut haknya melalui pendampingan Penasihat Hukum, untuk mengukur efektivitas penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 saat syarat formil terpenuhi.

***Sumber:** *Laporan Keadaan Perkara LIPA.1 dan Penelusuran Direktori Putusan Pengadilan Agama Tembilahan (Data diolah tahun 2026).*

Populasi subjek adalah keseluruhan aparatur penegak hukum dan petugas yang menangani perkara perceraian serta layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Tembilahan pada saat penelitian ini dilakukan.

Tabel 4
Sampel Informan Pengadilan Agama Tembilahan

NO	Kategori Informan	Sampel	Alasan Pemilihan
1	Hakim Pengadilan Agama Tembilahan	4 Orang	Hakim yang pernah menangani, menyidangkan, dan memutus perkara cerai gugat, guna menggali pertimbangan yuridis dan kendala eksekusi.
2	Staf / Petugas	1 Orang	Petugas yang memiliki interaksi

	Posbakum PA Tembilahan		paling intens dan representatif dengan masyarakat di tahap awal untuk menggali motif dan realita literasi hukum istri yang mengajukan gugatan secara mandiri.

***Sumber:** *Data Kepegawaian Pengadilan Agama Tembilahan (Data diolah tahun 2026).*

4. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya di lapangan.[49] Data ini diperoleh dari Hakim dan staff Posbakum di Pengadilan Agama Tembilahan, serta para istri selaku penggugat cerai.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku literature dan studi dokumentasi untuk mendukung data primer.[50] Sumber data ini meliputi Al-Qur'an, Al-Hadist, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan salinan Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan. Literatur hukum keluarga Islam, buku metodologi penelitian hukum, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan dengan asas hukum acara, hak istri pasca-cerai, dan teori-teori hukum yang digunakan

[49] Fitri Wahyuni, dkk, *Op. Cit*,. hlm. 19-20
[50] *Ibid*,.

c. Data tersier berfungsi sebagai penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder.[51] Sumber data ini mencakup bahan hukum yang mempermudah pemahaman istilah atau konsep teknis, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, ensiklopedia hukum, serta jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel berita dari situs resmi Mahkamah Agung yang memberikan ulasan atau pembaruan mengenai perkembangan penerapan hukum keluarga di Indonesia, serta hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

[51] *Ibid,.*

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.[52]

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data sistematis yang berfokus pada penelusuran, analisis, dan interpretasi bahan tertulis atau dokumen resmi untuk memperoleh data empiris yang relevan. Dalam penelitian ini, metode tersebut diimplementasikan melalui pengumpulan, pembacaan komprehensif, dan pembedahan yuridis terhadap tiga salinan putusan perkara cerai gugat dari Pengadilan Agama Tembilahan yang mewakili tiga skenario komparasi. Analisis diarahkan secara spesifik pada sinkronisasi antara rumusan *petitum* (tuntutan Penggugat) dan *amar* putusan (ketetapan Majelis Hakim) untuk melacak pengaruh asas *ultra petita* terhadap penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Pembedahan dokumen ini berfungsi mengidentifikasi pola kepasifan maupun progresivitas hakim dalam

[52] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 95

mengakomodasi hak *mut'ah* dan *iddah* istri secara *ex officio*, serta membuktikan ada tidaknya disparitas antara hukum normatif dan putusan pengadilan di lapangan.

c. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan fakta langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Metode observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Implementasi Hukum Islam Terhadap Pemberian Hak *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Studi di Pengadilan Agama Tembilahan).

H. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Langkah analisis dimulai dengan mengkaji norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak. Selanjutnya, peneliti akan menyajikan fakta-fakta hukum yang bersifat khusus yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan kuesioner. Melalui proses konfrontasi antara aturan normatif (*das sollen*) dengan realitas empiris (das sein) tersebut, peneliti akan menarik kesimpulan.[53]

[53] Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi), UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 31

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian dalam Perkawinan

1. Pengertian Perceraian

Pada dasarnya, setiap pasangan yang memutuskan untuk menikah pasti menginginkan ikatan yang kokoh demi mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, serta penuh dengan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang *(sakinah, mawaddah, wa rahmah)*.[54] Harapan untuk terus mempertahankan keutuhan rumah tangga ini menjadi cita-cita universal bagi setiap insan yang telah mengikatkan diri dalam janji suci pernikahan. Namun dalam realitasnya, perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan mulus sesuai rencana. Ketika berbagai upaya telah dilakukan tetapi suami istri tetap tidak lagi menemukan titik temu untuk mempertahankan keharmonisan, maka putusnya perkawinan melalui jalur perceraian menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*) yang terpaksa ditempuh.[55]

Dalam ranah hukum, istilah putusnya perkawinan ialah berakhirnya ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan selama masa hidup mereka. Khazanah fikih Islam kerap kali menyebut

---

[54] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[55] Siti Nur Hakimah, *"Kondiloma Akuminata Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam"*, Rechten Student Journal, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 45

fenomena perpisahan ini dengan kata *furqah*.[56] Secara yuridis, perceraian dimaknai sebagai penghapusan ikatan perkawinan melalui putusan hakim atas dasar tuntutan dari salah satu pihak.[57] Sementara dari kacamata syariat Islam, cerai berarti terlepasnya tali akad atau putusnya hubungan lahir batin sebagai suami istri.[58] Definisi ini sejalan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mengartikan cerai sebagai berpisah atau putusnya hubungan dalam ikatan suami istri. Sementara dalam instrumen hukum positif, istilah ini diakomodasi dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa suatu ikatan perkawinan dapat dinyatakan putus karena tiga faktor utama, yaitu kematian, perceraian, serta atas dasar putusan pengadilan.[59] Mengenai ketetapan perpisahan ini, Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً

Artinya: *"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar".*

---

[56] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Cet. Ke-1, 2006, hlm. 189

[57] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 42

[58] Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H. dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi,* Prenadamedia Group, Jakarta, Cet. Ke-1, 2020, hlm. 231

[59] DR. Muhammad Syaefuddin dkk, *Hukum Perceraian,* Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke-1, 2013, hlm. 15

Ketentuan ayat tersebut pada dasarnya memuat perintah alternatif bagi seorang suami yang menghadapi kemelut rumah tangga. Suami diberikan hak memilih antara dua opsi yang sama-sama diakui, yakni memilih untuk kembali merajut tali pernikahan melalui jalur rujuk, atau memilih untuk tetap melepaskan dan membiarkan istrinya dalam status ditalak secara baik-baik.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 selaku regulasi pelaksananya, sebenarnya tidak mencantumkan definisi perceraian secara spesifik. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan hanya menegaskan bahwa perceraian menempati posisi s5ebagai salah satu faktor yang menyebabkan berakhirnya sebuah perkawinan.[60] Di sisi lain, khazanah hukum Islam memandang fenomena ini melalui konsep talak yang berakar dari kata *ithlaq*, dengan makna harfiah melepaskan atau meninggalkan. Dalam domain fikih, istilah talak ini memuat dua arti. Secara luas, talak mencakup segala bentuk putusnya perkawinan, baik karena ketetapan hakim maupun yang terjadi demi hukum seperti kematian. Sedangkan dalam arti sempit, talak murni merujuk pada tindakan pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan secara sepihak oleh suami.[61]

Secara praktis di ranah peradilan, pemisahan ini termanifestasikan ke dalam dua bentuk perkara, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai

[60] Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38
[61] H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1994, hlm. 1

talak merupakan jenis perceraian yang diinisiasi oleh pihak suami terhadap istrinya. Apabila seorang suami ingin menceraikan istrinya, ia wajib mendaftarkan permohonan resmi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal mereka. Sebaliknya, cerai gugat adalah perkara perceraian yang lahir dari tuntutan hukum yang diajukan oleh istri agar ikatan pernikahannya diputus oleh pengadilan. Sama halnya dengan suami, seorang istri yang berniat untuk berpisah juga harus melewati prosedur formil dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.[62]

Melalui berbagai batasan dan uraian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perceraian pada dasarnya merupakan berakhirnya ikatan lahir batin antara suami dan istri ketika keduanya masih sama-sama hidup. Dalam penerapannya di Indonesia, putusnya hubungan rumah tangga ini dapat terjadi melalui dua jalur hukum di pengadilan, yakni melalui mekanisme cerai talak yang diajukan oleh suami, ataupun melalui jalur cerai gugat yang ditempuh oleh istri.

2. Dasar Hukum Perceraian

Landasan yuridis mengenai berakhirnya ikatan rumah tangga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara spesifik diatur dalam Bab VIII mengenai Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Pada Pasal 38 undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa

[62] *Ibid.*, hlm. 9

terdapat tiga faktor hukum yang dapat menyebabkan putusnya suatu perkawinan, yaitu karena adanya kematian, terjadinya perceraian, serta atas dasar keputusan pengadilan.[63] Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan salah satu jalan konstitusional yang sah untuk mengakhiri hubungan suami istri apabila ruang lingkup domestik tidak lagi dapat dipertahankan.

Lebih lanjut, tata cara pelaksanaan pemutusan ikatan tersebut diatur secara spesifik di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa: *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*.[64] Penegasan pasal ini secara filosofis mengonfirmasi adanya asas bahwa perceraian di Indonesia dipersulit guna menjaga kesucian institusi pernikahan.[65] Oleh karena itu, lembaga peradilan tidak hanya berfungsi sebagai tempat memutus perkara, melainkan wajib menjalankan prosedur mediasi secara formal terlebih dahulu, sebagaimana dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai upaya hukum yang imperatif untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga sebelum hakim memeriksa pokok perkara yang diajukan.

---

[63] Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38

[64] Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1)

[65] Wilda Shofa, *"Eksistensi Asas Perceraian Dipersulit dan Implementasinya di Pengadilan Agama,"* Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 185

3. Penyebab Terjadinya Perceraian

Aturan mengenai pelaksanaan pemutusan ikatan pernikahan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".*[66] Di samping ketentuan dalam hukum positif tersebut, bagi masyarakat muslim di Indonesia, landasan mengenai alasan-alasan pembubaran rumah tangga diatur secara lebih rinci di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 116 KHI, dijelaskan secara limitatif bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya alasan-alasan sebagai berikut:[67]

1. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, atau menjadi pecandu minuman keras, pemadat, judi, serta perilaku menyimpang lainnya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, atau bukan karena situasi di luar kendali kemampuannya.
3. Salah satu pihak dijatuhi vonis hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun atau sanksi pidana yang lebih berat setelah ikatan perkawinan tersebut berlangsung.

---

[66] Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39
[67] Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

4. Salah satu pihak melakukan tindakan kekejaman fisik atau penganiayaan berat yang dinilai dapat mengancam keselamatan dan membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit tertentu, sehingga mengakibatkan dirinya tidak lagi mampu menjalankan kewajiban lahir dan batin sebagai suami atau istri.
6. Terjadi konflik, perselisihan, dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami dan istri, sehingga menutup harapan untuk mewujudkan kembali kerukunan dalam rumah tangga.
7. Pihak suami terbukti melanggar ketentuan atau janji taklik talak yang sempat diucapkan dan ditandatangani pada saat akad nikah berlangsung.
8. Terjadinya perpindahan keyakinan atau murtad oleh salah satu pihak, di mana perbedaan agama tersebut memicu ketidakharmonisan serta ketidakrukunan di dalam rumah tangga.

Dalam literatur fikih serta tata acara hukum perdata pada lingkungan Peradilan Agama, berbagai dinamika dan peristiwa di dalam kehidupan berumah tangga tersebut diklasifikasikan sebagai fakta hukum. Fakta-fakta inilah yang nantinya akan dinilai, dibuktikan di persidangan, dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara perceraian yang diajukan. Adapun poin-poin krusial yang kerap menjadi pertimbangan hakim dalam memutus gugatan tersebut meliputi:

a. Terjadi nusyuz dari pihak istri

Poin pertama yang kerap menjadi bahan pertimbangan hukum adalah terjadinya *nusyuz*, yaitu suatu bentuk pembangkangan atau pengabaian kewajiban yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Dalam konteks ini, *nusyuz* termanifestasikan ketika istri secara sengaja tidak lagi menaati perintah atau arahan sah dari suami. Sikap tidak patuh serta kelalaian dalam menjalankan peran domestik ini lambat laun akan memicu keretakan, menghambat keharmonisan, dan merusak fondasi kedamaian di dalam kehidupan berumah tangga.[68]

b. Terjadi nusyus dari pihak suami

Perlu digarisbawahi bahwa sikap *nusyuz* sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, melainkan bisa pula terjadi pada pihak suami. Dalam konteks suami, pembangkangan terhadap kewajiban rumah tangga ini tampak nyata ketika ia melakukan pelanggaran berat, seperti terjerumus dalam kebiasaan berjudi, mabuk-mabukan, atau melakukan zina tanpa ada iktikad untuk bertobat dan berubah. Mengenai fenomena ketidakpatuhan suami terhadap komitmen pernikahan ini, Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 128 menegaskan:

---

[68] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikh, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta, Cet Ke -, hlm. 209

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabirnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihata dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah maha teliti terhadap sesuatu yang kamu kerjakan."*

c. Perselisihan terus menerus

Kondisi dimana terjadi perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, sehingga menutup ruang untuk berdamai maupun mempertahankan keutuhan rumah tangga. Bahkan ketika perkara ini telah masuk ke ranah persidangan, majelis hakim pun sudah berupaya maksimal untuk meredakan konflik di antara kedua belah pihak melalui prosedur mediasi, meskipun upaya damai tersebut tetap tidak membuahkan hasil.

d. Satu dari salah satu pihak berzina

Faktor krusial lain yang kerap merusak sendi pernikahan adalah keterlibatan salah satu pihak dalam perbuatan zina (*fahisyah*), yang seketika memicu guncangan hebat di dalam rumah tangga. Apabila terjadi tuduhan zina tanpa adanya saksi yang cukup, penyelesaian hukumnya dapat ditempuh melalui ikrar *li'an* di hadapan sidang pengadilan. Konsekuensi yuridis dari sumpah *li'an* ini tidak hanya memutuskan ikatan perkawinan seketika, melainkan

juga melahirkan status *talak ba'in kubra* yang menutup rapat peluang bagi keduanya untuk rujuk kembali.

Jika menilik dari sudut pandang hukum perdata Barat, ketentuan mengenai faktor-faktor yang menjadi sebab perceraian secara yuridis diatur dalam Pasal 209 KUH Perdata, yang meliputi:[69]

a. Perbuatan Zina
b. Salah satu pihak sengaja pergi meninggalkan tempat tinggal bersama secara sepihak dengan niat atau tujuan yang tidak baik.
c. Salah satu pihak dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun atau hukuman lain yang lebih berat, di mana putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan berat terhadap pasangannya, di mana tindakan tersebut terbukti membahayakan keselamatan jiwa atau menimbulkan luka-luka yang fatal.

4. Macam-macam Perceraian

Ditinjau dari subjek yang mengambil inisiatif hukum, pengelompokan jenis perceraian pada dasarnya ditentukan oleh siapa pihak yang mendaftarkan perkara tersebut ke pengadilan. Perbedaan mengenai siapa yang mengajukan permohonan apakah dari pihak suami

[69] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 209

atau pihak istri nantinya akan menimbulkan konsekuensi serta akibat hukum yang berbeda pula. Secara yuridis, bentuk perceraian ini dapat dipetakan menjadi dua klasifikasi utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat.[70]

a. Cerai Talak

Jika merujuk pada ketentuan hukum Islam di Indonesia, Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa putusnya ikatan perkawinan akibat perceraian dapat terjadi melalui dua jalur, yakni jalur talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Lebih spesifik, Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar resmi yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, yang kemudian menjadi landasan yuridis berakhirnya hubungan pernikahan.[71] Dalam penerapannya, perkara cerai talak ini diinisiasi oleh suami sebagai pemohon, di mana bagian tuntutan atau petitumnya secara khusus meminta izin kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

Mengenai tata cara pengajuannya, Pasal 129 dan Pasal 130 KHI mengatur bahwa seorang suami yang berniat menceraikan istrinya wajib mendaftarkan permohonan, baik secara lisan maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri.[72] Permohonan tersebut tidak bisa diajukan secara asal, melainkan

---

[70] Heniyatun dkk, *"pemberian muat"ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, PROFETIKA"*, Jurnal Studi Islam, Volume, 21, Nomor 1, 2020, hlm. 39-59

[71] Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, P*edoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, hlm. 147

[72] Kompilasi Hukum Islam pasal 129 dan 130

harus disertai dengan alasan-alasan perceraian yang sah menurut hukum serta memohon agar pengadilan menggelar persidangan untuk memeriksa perkara tersebut. Prosedur formil ini menunjukkan bahwa di Indonesia, hak talak suami tidak dapat dijatuhkan secara sepihak di luar pengadilan, melainkan harus melewati kontrol lembaga peradilan.

Meskipun secara hukum positif prosedur talak telah diatur sedemikian rupa, konsep *talak* ini tetap tidak luput dari kritik para pemikir Islam modern. Salah satunya adalah Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī, yang mengkritisi pandangan fikih klasik karena dinilai memberikan kemutlakan hak talak di tangan laki-laki tanpa kontrol yang seimbang, sehingga berpotensi merugikan serta merendahkan posisi perempuan. Menurutnya, Islam sejatinya sangat memuliakan perempuan dan memberikan kedudukan yang setara dengan laki-laki, baik saat membangun komitmen pernikahan maupun ketika menghadapi perceraian. Oleh karena itu, konsep *talak* klasik yang bias gender tersebut dipandang sebagai bentuk ketimpangan relasi suami-istri, sehingga pemikiran hukum sudah sepatutnya bertransformasi mengikuti dinamika zaman demi mengedepankan nilai kemaslahatan dan keadilan yang substantif.[73]

[73] Ali Imron, "*Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga, BUANA GENDER"* Jurnal Studi Gender Dan Anak, Volume, 1, Nomor, 1, 2016, hlm. 25-27

1. Hukum Talak

Secara tekstual, di dalam Al-Qur'an sebenarnya tidak dijumpai ayat yang secara eksplisit memerintahkan atau melarang keberadaan perceraian itu sendiri, sebuah hal yang berbanding terbalik dengan institusi perkawinan yang memiliki beberapa ayat perintah yang jelas. Kendati banyak ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai *talak*, substansi hukum di dalamnya lebih menitikberatkan pada regulasi teknis dan tata cara penjatuhannya apabila perceraian tersebut memang terpaksa harus terjadi. Salah satu ketentuan yang diatur adalah keharusan bagi suami untuk menjatuhkan talak ketika istri berada dalam kondisi yang siap untuk langsung menjalani masa *iddah*, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surah At-Talaq ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

Artinya *"Hai nabi bila kamu menalaq istrimu, maka talaklah dia sewaktu masuk kedalam iddahnya"*.[74]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ketiadaan perintah atau larangan eksplisit di dalam Al-Qur'an

[74] Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Azhar Al-Qur"an dan Terjemah, hlm. 558

memosisikan talak pada hukum asal mubah (boleh), perbuatan ini pada hakikatnya sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Atas dasar itulah, mayoritas ulama mengategorikan hukum dasar perceraian sebagai makruh. Kendati demikian, status makruh ini tidaklah bersifat mutlak, melainkan dapat bergeser secara kasuistik. Tergantung pada situasi, kondisi, dan latar belakang yang melingkupi hubungan suami istri tersebut, hukum menjatuhkan talak dapat berubah menjadi beberapa klasifikasi berikut:[75]

a. Sunnah, jika *talak* dijatuhkan ketika keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dan jika dipaksakan justru akan menimbulkan dampak buruk (*kemudaratan*) yang lebih besar bagi kedua belah pihak.
b. Mubah, jika perceraian dilakukan apabila memang terdapat alasan yang mendesak, prosesnya tidak merugikan pihak mana pun, serta terdapat kemaslahatan atau manfaat yang jelas di dalamnya.
c. Wajib yaitu *talak* harus diputuskan oleh hakim jika suami melakukan sumpah *ila'* (bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu), namun ia menolak membayar denda (*kafarah*) untuk membatalkan sumpah tersebut sehingga tindakannya menyengsarakan istri.

[75] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Kencana, Cet. Ke-1, Jakarta, 2006, hlm. 198-201

d. Haram yaitu perceraian dilarang secara hukum jika dilakukan tanpa adanya alasan yang sah, atau dijatuhkan saat istri sedang dalam masa haid, serta saat istri dalam keadaan suci namun telah digauli dalam masa suci tersebut.

2. Jenis-jenis Talak

a) Talak Raj`I

Talak Raj`I adalah jenis talak yang memberikan hak penuh kepada suami untuk kembali berdamai atau rujuk dengan istrinya selama masa iddah belum berakhir, tanpa perlu melakukan akad nikah ulang maupun membayar mahar baru.[76] Sejalan dengan prinsip tersebut, Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa yang termasuk dalam kategori talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami secara sah dapat langsung menyatakan rujuk sewaktu istri masih dalam masa tunggu.[77]

b) Talak Ba`in

Secara yuridis, *talak ba'in* merupakan jenis talak yang memutus hubungan perkawinan, di mana pihak suami kehilangan haknya untuk melakukan rujuk secara langsung kepada mantan istrinya, meskipun sang istri masih berada dalam masa iddah. Dalam doktrin hukum Islam, klasifikasi

[76] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, AMZAH, Jakarta, 2010, hlm. 336

[77] Kompilasi Hukum Islam Pasal 118

talak ini dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu *talak ba'in sughra* dan *talak ba'in kubra*.[78]

Pasal 119 KHI menjelaskan bahwa *talak ba'in sughra* merupakan talak yang tidak membuka ruang bagi suami untuk rujuk, namun kedua belah pihak tetap diperbolehkan untuk membina rumah tangga kembali melalui proses akad nikah yang baru tanpa harus melalui perantara mushallih atau muhallil.[79] Lebih lanjut, Pasal 119 ayat (2) KHI mempertegas bahwa jenis-jenis perceraian yang masuk dalam kelompok talak ba'in sughra ini meliputi talak yang dijatuhkan sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*), perceraian atas dasar tebusan atau gugatan khuluk, serta seluruh putusan perceraian yang dijatuhkan secara resmi oleh Pengadilan Agama.[80]

Berbeda halnya dengan kategori kedua, talak ba'in kubra memberikan konsekuensi hukum yang jauh lebih ketat. Pada jenis talak ini, mantan suami dilarang keras untuk menikah kembali dengan mantan istrinya, kecuali jika perempuan tersebut telah menikah lebih dulu dengan laki-laki lain melalui pernikahan sah yang didasarkan pada

---

[78] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, *Op. Cit,.* hlm. 337

[79] Kompilasi Hukum Islam Pasal 119

[80] Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 Ayat 2

tujuan membina rumah tangga yang benar.[81] Apabila di kemudian hari pernikahan kedua tersebut kandas secara alami dan mantan istri diceraikan secara sah oleh suami keduanya, barulah mantan suami pertama diperbolehkan untuk menikahinya kembali melalui prosedur akad dan pemberian mahar yang baru.

3. Akibat Hukum Cerai Talak (Inisiatif Suami)

Ketika pembubaran perkawinan terjadi atas inisiatif pihak pria melalui jalur cerai talak, hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan ekonomi yang ketat bagi mantan istri. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang suami yang menjatuhkan talak dibebani sejumlah kewajiban finansial dan nafkah pascacerai yang bersifat imperatif atau wajib dipenuhi di hadapan hukum.

Kewajiban yuridis yang harus dipenuhi oleh mantan suami tersebut meliputi:

1) Suami wajib memberikan *mut'ah*, baik berupa uang tunai maupun benda yang layak, sebagai hadiah penghibur untuk mantan istrinya, kecuali jika perceraian tersebut terjadi sebelum dilakukannya hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*).

[81] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, *Loc. Cit,*.

2) Selama mantan istri menjalani masa tunggu (*iddah*), mantan suami berkewajiban mencukupi kebutuhan pokoknya yang mencakup nafkah nafkah harian, pakaian (*kiswah*), serta tempat tinggal (*maskan*). Hak ini tetap berlaku selama mantan istri tidak dijatuhi *talak ba'in*, tidak dalam keadaan *nusyuz* (membangkang), atau tidak dalam kondisi hamil.
3) Mantan suami wajib membayar seluruh sisa mahar yang masih terutang saat perkawinan berlangsung. Namun, jika perceraian terjadi dalam kondisi *qabla al-dukhul*, mahar yang wajib dilunasi adalah setengah dari nilai yang diperjanjikan.
4) Mantan suami memikul tanggung jawab penuh untuk menyediakan biaya pengasuhan dan nafkah bagi anak-anaknya yang belum dewasa atau belum menginjak usia 21 tahun.

Melalui rincian normatif pada Pasal 149 KHI tersebut, dapat ditarik pemahaman teoretis yang mendalam bahwa hukum peradilan agama secara proaktif memitigasi dampak finansial negatif yang menimpa perempuan pascaperceraian. Karena suami memegang kendali penuh atas inisiatif pengajuan perkara cerai talak ini ke Pengadilan Agama, maka negara menyeimbangkannya dengan menetapkan sanksi pembebanan

hak-hak finansial mantan istri.[82] Ketentuan ini memastikan bahwa seorang istri yang diceraikan tanpa adanya kesalahan berat dari dirinya tidak kehilangan jaminan nafkah, kelayakan tempat tinggal, dan hak asuh anak yang menjadi tanggung jawab mantan suaminya.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang prosesnya dimulai dari pihak istri, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Dalam hal ini, suami sebagai pihak tergugat menyetujui gugatan tersebut, sehingga pengadilan kemudian mengabulkannya.[83] Dasar hukum yang mengatur hal ini termuat dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara tegas menyatakan bahwa gugatan cerai adalah hak yang dapat digunakan oleh istri. Melalui mekanisme ini, istri selaku penggugat meminta Pengadilan Agama untuk memutus ikatan perkawinannya dengan suami selaku tergugat.[84]

1. Cerai Gugat dalam Perspektif Fiqih

Dalam hukum Islam klasik, istilah cerai gugat sebenarnya tidak dikenal secara langsung. Perceraian pada dasarnya menjadi hak penuh suami, artinya hanya suami yang berwenang menjatuhkan cerai. Jika istri ingin berpisah dari suaminya, ia

---

[82] Najichah, Alfian Qodri Azizi, *"Implikasi nInisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Isteri"*, Journal of Islamic Studies and Humanities, Volume. 5, Nomor. 1, 2020, hlm. 42-60

[83] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Op. Cit,.* hlm. 222

[84] Heniyatun dkk, *"pemberian muat"ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat"*, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Volume. 21, Nomor. 1, 2020, hlm. 39-59

harus meminta persetujuan suami, dan biasanya permintaan itu disertai dengan pembayaran tebusan agar suami bersedia melepas haknya. Mekanisme inilah yang dalam fikih dikenal dengan istilah *khulu'*.[85] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *khulu'* diartikan sebagai perceraian atas permintaan istri dengan cara membayar sejumlah uang atau mengembalikan mahar yang pernah diterimanya.[86]

Meski demikian, bukan berarti perempuan tidak memiliki hak dalam soal perceraian. Apabila dalam pernikahan tidak lagi ditemukan kecocokan, hubungan suami istri tidak berjalan dengan baik, dan ikatan itu sudah tidak bisa dipertahankan hingga berpotensi menelantarkan hak-hak Allah dalam pernikahan, maka perempuan pun memiliki jalan untuk mengakhiri pernikahan tersebut. Hak ini sejajar dengan hak *talak* yang dimiliki laki-laki, sehingga keduanya pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dalam perkara perceraian. Allah SWT bahkan menegaskan hal ini dalam Surah al-Nisā': 130.[87]

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"*. (QS. An-Nisa : 130).

---

[85] Yayan Sopyan, *Islam-Negara "Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional"*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 187

[86] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 1, ed. 3, hlm. 565

[87] Lathifah Munawaroh, Suryani, *"Menelisik Hak-Hak Perempuan"*, KAFA"AH JOURNAL, Volume 10, Nomor. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 25-38

Ayat tersebut memberikan landasan hak bagi perempuan untuk bercerai dari suaminya bila ada alasan yang mendasarinya. Penggunaan kata ganti untuk keduanya, yakni suami dan istri, dalam redaksi *"...keduanya bercerai..."* menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki dalam keputusan bercerai. Allah juga mengingatkan dalam ayat ini bahwa karunia-Nya Maha Luas, dan boleh jadi Ia akan menggantikan keduanya dengan pasangan yang lebih baik. Karena itu, keduanya dianjurkan untuk tetap berprasangka baik kepada Allah.[88]

2. Cerai Gugat Menurut Perundang-Undangan

Berkaitan dengan berakhirnya ikatan perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian tidak menimbulkan persoalan hukum yang berarti, sebab hal itu bukan kehendak salah satu pihak melainkan ketentuan Tuhan. Adapun putusnya perkawinan melalui putusan pengadilan dapat terjadi akibat pembatalan perkawinan atau perceraian.[89] Khusus mengenai perceraian, Pasal 39 undang-undang yang sama menetapkan tiga ketentuan pokok:

[88] *Ibid,*. hlm. 30
[89] *Ibid,*. hlm. 188

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan, setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil.
2. Perceraian harus didasari alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri sudah tidak dapat hidup bersama secara rukun.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Melanjutkan ketentuan di atas, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa perceraian dilakukan melalui lembaga pengadilan agama, yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan wilayah hukumnya mencakup daerah kabupaten setempat. Pasal 65 undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa prosedur perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan.[90]

Dalam konteks ini, cerai gugat secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya istri untuk memutus ikatan perkawinannya melalui jalur hukum. Kata "gugat" (gugatan) sendiri merujuk pada cara menuntut hak melalui putusan pengadilan.[91] Maka, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri pada dasarnya merupakan bentuk penuntutan hak atas kerugian yang dialaminya dalam pernikahan. Istri yang mengajukan

[90] M. Khoirur Rofik, *Hukum Acara Peradilan Agama, Op. Cit,.* hlm. 126
[91] Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik,* Angkasa, Bandung, 1993, hlm. 8

gugatan ke pengadilan berarti sedang meminta perlindungan hukum yang adil dan pasti dari lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.[92]

Dengan demikian, cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas tuntutan dari pihak istri kepada pengadilan dan diakhiri dengan putusan pengadilan. Ketentuan mengenai cerai gugat ini diatur dalam beberapa regulasi, yaitu Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975.

Dalam UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, gugatan cerai dapat diajukan oleh suami maupun istri. Sedangkan menurut KHI, cerai gugat secara khusus merujuk pada gugatan yang diajukan oleh istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 132 ayat (1) : *"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami."*

KHI juga membedakan antara cerai gugat dan *khulu'*, meskipun keduanya sama-sama datang dari pihak istri. Perbedaan pokoknya terletak pada uang *iwadh*. Dalam cerai gugat, tidak ada kewajiban membayar *iwadh*, sedangkan dalam *khulu'*, *iwadh* merupakan bagian inti dari penyelesaiannya. Jika

---

[92] Sudikno Mertokususmo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 53

iwadh tidak dipenuhi, maka terjadi pelanggaran terhadap perjanjian *taklik talak*. Besaran *iwadh* sendiri ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Berbeda halnya dengan UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak membedakan antara *khulu'* dan cerai gugat.[93]

Selain itu, KHI juga membedakan antara cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami ke pengadilan agama, sementara cerai gugat diajukan oleh istri. Perbedaan ini berimplikasi pada hak hukum masing-masing pihak. Dalam perkara perdata, suami memiliki upaya hukum berupa hak banding dan kasasi, sedangkan istri tidak memiliki upaya hukum yang sama dalam hal ini.[94]

3. Alasan-Alasan Cerai Gugat

Meskipun perceraian tidak dilarang dalam perkawinan, bukan berarti seseorang dapat begitu saja memutus ikatan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Hal ini berlaku pula bagi seorang istri yang ingin mengajukan gugatan cerai. Undang-undang telah menetapkan alasan-alasan tertentu yang harus dipenuhi sebagai dasar pengajuan gugatan tersebut. Adapun alasan-alasan yang diakui secara hukum adalah sebagai berikut:

---

[93] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 237

[94] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 232

1) Suami melakukan zina atau memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk, pemadat, dan berjudi yang sulit disembuhkan, PP No. 9/1975 Pasal 19(a) dan KHI Pasal 116(a).

2) Suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, PP No. 9/1975 Pasal 19(b) dan KHI Pasal 116(b). Gugatan baru bisa diajukan setelah dua tahun sejak suami pergi, dan dapat diterima bila suami menyatakan tidak mau kembali (KHI Pasal 133).

3) Suami dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung, PP No. 9/1975 Pasal 19(c) dan KHI Pasal 116(c).

4) Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan terhadap istri, PP No. 9/1975 Pasal 19(d) dan KHI Pasal 116(d).

5) Suami mengalami cacat fisik atau penyakit yang membuatnya tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami, PP No. 9/1975 Pasal 19(e) dan KHI Pasal 116(e).

6) Terjadi perselisihan terus-menerus antara suami dan istri tanpa harapan untuk rukun kembali, PP No. 9/1975 Pasal 19(f) dan KHI Pasal 116(f).

7) Suami melanggar sighat taklik talak yang diucapkan saat akad nikah , KHI Pasal 116(g).

8) Suami murtad sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, KHI Pasal 116(h).

9) Suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, UU No. 1/1974 Pasal 34(3) dan KHI Pasal 77(5).

4. Akibat Hukum Cerai Gugat

Ketika sebuah perkawinan berakhir, kedua pihak harus siap menghadapi berbagai konsekuensi hukum yang mengikutinya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, akibat dari cerai gugat secara khusus memang tidak diatur secara rinci. Namun demikian, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 mengatur akibat umum dari putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu:

a. Baik ibu maupun ayah tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka demi kepentingan terbaik si anak. Jika terjadi perselisihan soal hak asuh, pengadilan yang akan memutuskan.

b. Ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun jika ayah tidak mampu memenuhinya, pengadilan dapat menetapkan ibu untuk turut menanggung biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup kepada mantan istri, atau menetapkan kewajiban tertentu lainnya bagi mantan istri.

Ketentuan dalam Pasal 41 tersebut kemudian diperkuat oleh KHI Pasal 156 yang secara lebih spesifik mengatur akibat perceraian dalam kasus cerai gugat, di antaranya:[95]

a. Anak yang belum *mumayyiz*, yakni anak yang berusia di bawah 12 tahun, berhak mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) dari ibunya. Jika ibu telah meninggal dunia, hak asuh berpindah secara berurutan kepada:
   a) Perempuan dalam garis lurus ke atas dari ibu
   b) Ayah
   c) Perempuan dalam garis lurus ke atas dari ayah
   d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
   e) Kerabat perempuan sedarah dari pihak ibu
   f) Kerabat perempuan sedarah dari pihak ayah
b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih sendiri apakah ingin ikut ayah atau ibunya.
c. Apabila pemegang hak asuh (*hadhanah*) tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun kebutuhan nafkah sudah terpenuhi, maka pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh (*hadhanah*) tersebut kepada kerabat lain yang berhak, atas permintaan kerabat yang bersangkutan.

[95] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 232

d. Seluruh biaya pengasuhan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, setidaknya hingga anak mencapai usia 21 tahun atau sudah mampu mandiri.

e. Jika terjadi perselisihan soal hak asuh dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusan berdasarkan ketentuan pada poin (a) hingga (d) di atas.

f. Pengadilan juga dapat menetapkan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak ikut bersama ayahnya, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial sang ayah.

5. Akibat Hukum Perceraian

Berakhirnya sebuah perkawinan tidak lantas membebaskan kedua belah pihak dari segala tanggung jawab. Perceraian justru melahirkan sejumlah konsekuensi hukum yang mengikat, baik berupa hak yang perlu dipenuhi maupun kewajiban yang tetap harus dijalankan oleh suami dan istri.

Salah satu dampak yang langsung muncul ketika talak dijatuhkan, entah atas kehendak suami atau istri, adalah kewajiban bagi istri untuk melewati masa '*iddah*. Masa ini menjadi titik tolak dari berbagai hak dan kewajiban yang mengikutinya. Abu Syuja' dalam karyanya *al-Ghayah wa at-Taqrib* menguraikan bahwa istri yang beriddah akibat talak *raj'i* (bisa rujuk) berhak memperoleh nafkah sekaligus *maskan* (tempat tinggal) dari

suami. Berbeda halnya dengan istri yang ditalak *ba'in,* ia hanya berhak atas *maskan* (tempat tinggal) tanpa disertai nafkah, kecuali bila sedang mengandung. Bagi istri yang ber-*iddah* karena kematian suami, ia diwajibkan menjalani *ihdad* yakni menghindari perhiasan dan wewangian, serta tidak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan yang benar-benar mendesak.[96]

Pemberian nafkah kepada istri selama masa *'iddah* itulah yang kemudian dikenal sebagai nafkah *'iddah*. Merujuk pada pendapat Abu Syuja', nafkah *'iddah* hanya berlaku dalam dua kondisi yaitu, ketika istri dijatuhi talak *raj'i*, dan ketika istri yang ditalak *ba'in* tengah dalam kondisi hamil.

Di luar nafkah *'iddah*, ada hak lain yang tidak kalah penting, yaitu *mut'ah*. Secara harfiah, *mut'ah* berarti suatu kesenangan atau pemberian. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, *mut'ah* merujuk pada sejumlah harta yang wajib diserahkan mantan suami kepada mantan istrinya sebagai dampak dari perceraian yang ia jatuhkan. Kendati demikian, kewajiban ini tidak berlaku mutlak pada setiap jenis perceraian, meski pada dasarnya dalam mazhab syafi'i adalah wajib.[97]

Hak atas mut'ah hanya dapat diperoleh istri apabila perceraian itu diprakarsai oleh pihak suami. Sebaliknya, bila perceraian justru berasal dari pihak istri, misalnya melalui jalur *fasakh*, maka gugurnya hak *mut'ah*

---

[96] Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib,* Daar al-'TIm, Surabaya, t.th, hlm. 50

[97] Mahbub Ma'afi Ramdlan, *"Hukum Memberikan Mut'ah Setelah Perceraian",* NU Online, diakses pada 28 Juni 2026, https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-memberikan-mut-ah-setelah-perceraian-lF6Bf.

tersebut. Pandangan ini ditegaskan oleh Imam Taqiyyuddin Muhammad Abu Bakar al-Husaini dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar, yang menyatakan bahwa:

> *"Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut'ah, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki menjatuhkan talak karena adanya aib pada isterinya."*[98]

Pandangan fikih tersebut sejalan dengan apa yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 huruf (b), yang menegaskan bahwa *mut'ah* menjadi kewajiban suami hanya apabila keputusan cerai datang dari dirinya. Selain *mut'ah* dan nafkah *iddah*, KHI juga mengakui hak-hak lain yang bisa diperoleh istri setelah perceraian, meliputi nafkah *madliyah* atau nafkah yang tertunggak, mahar yang belum dilunasi, hak asuh anak, hingga pembagian harta bersama.[99]

Babak baru dalam pengaturan hak istri kemudian hadir melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung. Surat edaran ini secara khusus memuat aturan terbaru mengenai hak nafkah iddah dan mut'ah bagi istri dalam perkara cerai gugat, sebagaimana tercantum dalam Rumusan Hukum Kamar Agama yang berbunyi:

---

[98] *Ibid.,*
[99] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156

"Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz."

Hadirnya SEMA ini menandai pembaruan penting dalam regulasi hak istri pada perkara cerai gugat, sekaligus memberikan landasan yang bisa dijadikan pegangan oleh hakim dalam setiap pertimbangan dan putusan perkara serupa.

B. Tinjauan Umum Hak *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*

1. Pengertian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*

Istilah nafkah sendiri berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah bermakna biaya, belanja, atau pengeluaran uang. [100] Jika ditinjau dari sisi etimologi, nafkah dimaknai sebagai segala sesuatu yang disalurkan, diberikan, atau dibagikan kepada orang lain, sehingga dapat meringankan jalan hidup bagi pihak yang menerimanya. Konsekuensinya, karena harta tersebut diserahkan kepada orang lain, maka secara fisik jumlahnya otomatis berkurang atau bahkan hilang dari kepemilikan si pemberi. Adapun secara terminologi, nafkah merujuk pada kewajiban menyerahkan sejumlah harta guna memenuhi kebutuhan hidup seseorang, agar kelangsungan hidupnya tetap terjaga. Berdasarkan definisi ini, dapat

[100] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia,* Pustaka Progresif, Surabaya, 2002, hlm 1449

dipahami bahwa cakupan nafkah meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. [101]

Apabila ditelusuri lebih jauh dari sisi kebahasaan, kata "مُتْعَة" (*mut'ah*) berasal dari akar kata مَتَّعَ – يَمْتَّعُ – مَتْعَةً yang bermakna kenikmatan atau kesenangan yang dapat dirasakan. Pemaknaan ini turut diperkuat oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mengartikan mut'ah sebagai segala bentuk pemberian baik berupa uang, barang, maupun bentuk lainnya yang diserahkan suami kepada istri yang telah diceraikannya, sebagai tunjangan hidup sekaligus penghibur bagi mantan istri tersebut. Berdasarkan pemaknaan tersebut, dapat dipahami bahwa mut'ah merupakan bentuk pemberian dari mantan suami kepada bekas istrinya, sebagai wujud penghargaan sekaligus penghiburan pasca perceraian. Pemberian ini dapat berupa uang, barang, atau bentuk bantuan lain, yang pada dasarnya bertujuan memberikan rasa nyaman bagi mantan istri sekaligus mencegah munculnya perasaan tersakiti atau perlakuan yang tidak manusiawi setelah perpisahan terjadi. [102]

Dengan kata lain, mut'ah dapat dipahami sebagai pemberian dari mantan suami yang ditujukan untuk dinikmati mantan istrinya sebagai bentuk penghiburan. Bentuk pemberian ini dapat berupa uang tunai maupun dukungan lain, yang berperan membantu mantan istri agar terhindar dari perlakuan kejam pasca perceraian. Kehadiran mut'ah pasca

---

[101] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 75

[102] Titin Triana, Suhar, Ishaq, *Urgensi Pemberian Mut'ah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, CV. Aduna Abimata, Indramayu, 2024, hlm. 177

perceraian ini pada dasarnya mencerminkan prinsip Imsak bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan, yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan cara yang baik, atau mengakhirinya dengan cara yang baik pula. Prinsip ini menegaskan bahwa mantan istri beserta keluarganya harus tetap diperlakukan secara baik, meskipun pernikahan pada akhirnya tidak dapat dipertahankan.[103]

Selain *mut'ah*, terdapat pula dua istilah lain yang tidak kalah penting untuk dipahami dalam konteks hak perempuan pasca perceraian, yaitu *iddah*. Istilah *iddah* memiliki akar kata tersendiri. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Arab "adad", yang menurut Kamus al-Munawwir bermakna "hitungan".[104] Kata iddah sendiri merupakan bentuk turunan dari 'adda-ya'uddu-'iddatan, dengan bentuk jamak 'idad, yang keduanya bermakna menghitung atau sesuatu yang berkaitan dengan hitungan. [105] Dengan demikian, secara bahasa, iddah dapat dipahami sebagai masa hitungan yang dijalani seorang perempuan untuk menghitung hari-hari haid maupun masa sucinya. [106]

Di luar makna bahasa tersebut, sejumlah ulama juga memberikan definisi tersendiri mengenai makna *iddah*, dengan penekanan yang berbeda-beda. Menurut Abu Zahrah, *iddah* adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan guna mengakhiri berbagai akibat hukum yang timbul dari

---

[103] Afifudin Muhajir, *Fath Al-Mujîb Al-Qarîb, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb* Ibrahimy Press, Situbondo, 2020

[104] Ahmad Warson Munawwir, *Op. Cit.,* hlm. 904

[105] Amir Syarifuddi, *Op. Cit.,* hlm. 303

[106] Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz 4,* Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1990, hlm. 451

sebuah ikatan perkawinan.[107] Berbeda dengan itu, kitab Mughni al-Muhtaj mendefinisikan *iddah* sebagai masa tunggu bagi perempuan yang telah dicerai, dengan tujuan memastikan rahimnya bersih dari kandungan, sebagai wujud ibadah (ta'abbud), sekaligus ungkapan belasungkawa atas wafatnya suami.[108] Adapun Sayyid Sabiq memaknai iddah sebagai masa penantian yang wajib dilalui seorang perempuan, di mana selama masa tersebut ia tidak diperkenankan menikah lagi, baik akibat ditinggal wafat suami maupun karena perceraian.[109]

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *iddah* pada intinya merupakan masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan, baik setelah suaminya meninggal dunia maupun setelah terjadinya perceraian. Perhitungan masa *iddah* ini dapat didasarkan pada masa haid, masa suci, hitungan bulan tertentu, atau sejak proses melahirkan, dengan tujuan memastikan kekosongan rahim, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama, maupun sebagai wujud penghormatan atas wafatnya suami.[110]

Berkaitan dengan tujuannya, kewajiban menjalani masa iddah ini setidaknya dilandasi oleh beberapa maksud berikut:

a. Memastikan bahwa rahim perempuan tersebut telah bersih dari benih suaminya.

---

[107] Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al Syakhsiyyah,* Dar al-Fikr, Beirut, 2009, hlm. 435

[108] Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj,* Juz 5, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, t.th, hlm. 78

[109] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq,* terj. Ahmad Tirmidzi dkk, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2013, hlm. 445

[110] M. Zaenal Arifin, Muh. Anshori, *Fiqih Munakahat,* Cv. Jaya Star Nine, Madiun, 2019, hlm. 214-215

b. Sebagai bentuk ta'abbud, yakni semata menjalankan kehendak Allah, sekalipun secara logika hal tersebut mungkin dirasa tidak lagi diperlukan.[111]

c. Memberi ruang dan waktu bagi kedua belah pihak untuk berpikir ulang secara rasional, setelah sebelumnya menghadapi situasi rumah tangga yang diwarnai pertikaian hingga berujung pada putusnya perkawinan.

d. Dalam kasus perceraian akibat wafatnya suami, iddah dijalani sebagai wujud ungkapan duka atau masa berkabung atas kepergian suami.[112]

2. Maksud *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*

Mut'ah dapat dipahami sebagai nafkah penghibur yang diberikan sesuai kemampuan mantan suami. Ketika kewajiban ini dipenuhi, mantan istri akan memperoleh semacam kelegaan atau rasa senang atas apa yang telah dialaminya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemberian mut'ah oleh suami kepada istri yang diceraikannya bertujuan untuk menghibur dan menenangkan hati sang mantan istri. Pemberian ini semestinya berfungsi sebagai penawar luka batin, menjernihkan hati perempuan yang bersangkutan, sekaligus menghapus kekhawatirannya akan direndahkan oleh laki-laki.

Berbeda dengan *mut'ah*, nafkah *iddah* merupakan bentuk tanggungan yang wajib diberikan mantan suami setelah perceraian terjadi. Nafkah ini juga biasa disebut nafkah cerai karena besarnya merujuk pada putusan pengadilan yang telah menetapkan perceraian keduanya. Hanya

[111] Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam,* Setara Press, Malang, 2018, hlm. 60
[112] Titin Triana, Suhar, Ishaq, *Op. Cit.,* hlm. 177

saja, hingga kini belum ada ketentuan baku mengenai jumlah nafkah *iddah*, baik dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun hukum positif yang berlaku.

Adapun *mut'ah* sendiri dapat berupa harta benda atau pakaian yang diserahkan suami kepada istri yang diceraikannya, dengan tujuan meringankan kepedihan hati serta penderitaan yang dirasakan akibat perpisahan tersebut. Dengan kata lain, esensi dari nafkah mut'ah adalah untuk meredakan kesedihan dan beban batin yang dialami istri pasca perceraian. Karena itulah, mantan suami dibebani kewajiban memberikan nafkah mut'ah sebagai bentuk peringanan atas duka yang dialami mantan istrinya.Sementara itu, nafkah iddah dimaknai sebagai penghasilan yang wajib diserahkan suami kepada istri guna mencukupi kebutuhan pokoknya selama masa iddah masih berlangsung.[113]

3. Tujuan Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*

Pelaksanaan *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang berlandaskan pada keadilan ekonomi antar strata sosial pada dasarnya diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan berikut:

a. Menjamin agar nafkah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan istri sekaligus kemampuan finansial suami, sehingga kesenjangan yang muncul akibat perbedaan strata sosial dapat ditekan.
b. Menjaga kesejahteraan dan memberikan perlindungan selama masa iddah berlangsung, melalui dukungan finansial yang memadai agar

[113] Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, *"Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama"*, ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Volume. 15, Nomor. 1, 2021, hlm. 44-45

kondisi fisik maupun emosional anggota keluarga tetap terjaga dengan baik.

c. Menciptakan stabilitas, baik secara psikologis maupun sosial, bagi pihak-pihak yang terlibat.
d. Meringankan tekanan psikologis yang timbul akibat kondisi keuangan yang tidak menentu, sekaligus mempererat kembali hubungan dalam keluarga.
e. Membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber daya, sehingga setiap golongan sosial memperoleh kesempatan yang setara dalam hal keuangan, pekerjaan, layanan kesehatan, maupun pendidikan.
f. Membantu memutus rantai kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan pangan serta mut'ah yang memadai, baik untuk investasi keluarga maupun pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
g. Membangun jaringan dukungan sosial yang kuat, sehingga keluarga lebih mampu menghadapi kesulitan finansial dan menjadi lebih tangguh dalam menjalani kehidupan.[114]

[114] Friska Amelia, Sidik Sidik, Hilal Malarangan, *"Implementasi Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial"*, Comparativa, Volume. 4., Nomor. 2, 2023, hlm. 152

C. Tinjauan Tentang SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai Pedoman Hakim

Keberlakuan hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama secara eksplisit didasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana ketentuan ini menegaskan bahwa prosedur persidangan yang diterapkan pada Peradilan Agama mengacu pada pedoman hukum acara perdata di Peradilan Umum, kecuali jika terdapat regulasi spesifik lain yang dimuat dalam undang-undang terkait.[115] Konsekuesi yuridis dari ketentuan ini menciptakan dualisme wilayah berlakunya kodifikasi hukum acara warisan kolonial, yakni *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura serta *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Meskipun terpisah secara geografis, kedua regulasi tersebut pada hakikatnya memuat prinsip-prinsip hukum beracara yang seragam, terutama terkait kedudukan para pihak dan kewenangan hakim dalam memeriksa serta memutus suatu perkara perdata.

Secara dogmatis, HIR maupun RBg menempatkan asas hakim pasif (*iudex ne procedat ex officio*) sebagai pilar utama proses beracara perdata. Asas ini menegaskan bahwa ruang lingkup atau batas-batas pokok sengketa yang diajukan kepada pengadilan sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara (*partij autonomie*), sedangkan hakim hanya bertugas memeriksa fakta-fakta yang disodorkan di persidangan. Implikasi langsung

---

[115] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 12–15

dari asas pasif ini mewujud dalam norma larangan *ultra petita*, sebagaimana tertera secara identik dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Ketentuan hukum tersebut melarang keras majelis hakim untuk mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut di dalam petitum gugatan atau memutus melebihi apa yang dimohonkan oleh penggugat.[116]

Dalam ranah hukum keluarga Islam, khususnya pada perkara cerai gugat, penerapan asas pasif dan larangan *ultra petita* secara kaku (*legal-positivistic*) kerap menjadi celah yang merugikan posisi hukum kaum perempuan. Secara faktual, mayoritas istri yang bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan secara mandiri tanpa pendampingan kuasa hukum, sehingga formulasi petitum yang dibuat sering kali hanya berfokus pada tuntutan perceraian (*posita* dan *petitum* tunggal) tanpa mencantumkan hak-hak pasca perceraian seperti *mut'ah* dan *nafkah iddah*. Ketika hakim memilih berlindung di balik kekakuan Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (3) RBg dengan alasan menghindari *ultra petita*, akibat hukum yang ditimbulkan adalah terabaikannya hak-hak ekonomi mantan istri yang seharusnya dilindungi oleh hukum Islam (Cik Basir, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 210–214).

Guna menjembatani jurang antara kepastian hukum formal (*formal justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*), Mahkamah Agung merespons kondisi tersebut melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

---

[116] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2017, hlm. 798–802

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf C SEMA A quo, Mahkamah Agung memberikan terobosan hukum dengan menginstruksikan hakim agar mengoptimalkan kewenangan *ex officio*-nya dalam perkara cerai gugat. SEMA ini menegaskan bahwa hakim berwenang menetapkan kewenangan membebankan *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada suami sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*, meskipun hak-hak tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit dalam gugatan penggugat.[117]

Ditinjau dari perspektif teori hukum progresif, keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap ketidakberdayaan asas pasif dalam HIR dan RBg saat berhadapan dengan relasi kuasa yang tidak seimbang dalam hukum keluarga. SEMA ini menggeser paradigma hakim peradilan agama dari sekadar alat pengetik undang-undang atau corong peraturan (*bouche de la loi*) menjadi aktor penggerak keadilan (*social engineer*) yang responsif terhadap penderitaan manusia. Melalui diskresi *ex officio* yang dilegitimasi oleh SEMA ini, hukum tidak lagi dipahami sebagai himpunan teks mati yang kaku, melainkan sebuah institusi yang hidup dan bertujuan mengabdi pada kemanusiaan serta keadilan hakiki bagi perempuan pasca perceraian.[118]

---

[117] Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, hlm. 14-15

[118] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 45–48

1. Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung atau yang dikenal dengan singkatan SEMA merupakan salah satu instrumen hukum administratif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) guna memberikan arahan, pedoman, maupun penjelasan teknis dalam hal penerapan hukum di lingkungan peradilan Indonesia. Keberadaan SEMA pada mulanya berpijak pada Pasal 12 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalannya Pengadilan Mahkamah Agung di Indonesia. Tujuan utama diterbitkannya SEMA adalah agar penerapan hukum oleh para hakim di seluruh tingkatan peradilan dapat berjalan seragam, sehingga prinsip kepastian hukum benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik peradilan.[119]

Adapun landasan hukum yang menjadi dasar penerbitan SEMA tertuang dalam dua regulasi utama, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.[120]

2. Fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Dalam kedudukannya, SEMA juga menjalankan fungsi sebagai otoritas yang berwenang membuat peraturan. Hal ini sebagaimana

---

[119] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

[120] Siti Nur Hakimah, *"Kondiloma Akuminata Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam"*, Rechten Student Journal, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 45

ditegaskan dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur ketentuan tersebut dengan isi sebagai berikut:

"Jika ada kekurangan atau kekosongan hukum dalam masalah tertentu selama proses peradilan, Mahkamah Agung memiliki kemampuan untuk memberlakukan peraturan lebih lanjut untuk mengisi kekosongan tersebut. Undang-undang ini memberikan Mahkamah Agung kemampuan untuk memutuskan bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang belum atau tidak diatur oleh undang-undang ini. Peraturan Mahkamah Agung berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh legislator. Undang undang ini semata-mata mengatur administrasi peradilan, yang merupakan bagian dari hukum acara pada umumnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri atau melampaui kewenangannya dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara pada umumnya, serta sifat, kekuatan, pembuktian, penilaian, dan pembagian beban".[121]

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan "peraturan" dalam konteks ini mencakup segala bentuk aturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk memperjelas ketentuan hukum yang ada sekaligus mengisi celah atau kekosongan hukum di bidang hukum acara, selama tidak melampaui batas ketentuan mengenai kekuatan pembuktian serta hak dan kewajiban warga negara. Dengan begitu, PERMA dan SEMA termasuk dalam kategori peraturan yang dimaksud tersebut.[122] SEMA dapat digolongkan sebagai aturan kebijakan yang bersifat internal, mengingat penggunaannya memang ditujukan khusus bagi para Hakim, Panitera, dan pejabat lainnya yang bertugas di lingkungan pengadilan.[123]

---

[121] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

[122] Lubis, T. M., & Santosa, M. A. *"The Role of Judicial Circular Letters in Indonesian Legal System"*. Indonesia Law Review, Volume.4 Nomor. 2, 2012. hlm. 89-105

[123] Irwan Adi Cahyadi, *"Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia"*, Brawijaya Law Student Journal, Volume. 1 Nomor. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Dalam menjalankan perannya, SEMA dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fungsi utama, yaitu:

1) Sebagai sarana harmonisasi penerapan hukum. Dalam hal ini, SEMA berperan untuk menjembatani perbedaan penafsiran hukum yang terjadi antar pengadilan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat berjalan secara konsisten di seluruh tingkatan peradilan.
2) Sebagai penguat kepastian hukum. SEMA hadir sebagai pedoman dalam menangani perkara-perkara tertentu, khususnya perkara yang memerlukan penafsiran lebih mendalam atau berkaitan dengan arah kebijakan hukum yang baru.
3) Sebagai instrumen penyesuaian terhadap dinamika hukum. Melalui fungsi ini, SEMA memungkinkan dunia peradilan untuk merespons berbagai perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi yang berdampak pada hukum, tanpa harus menunggu proses perubahan undang-undang yang memakan waktu lama.[124]

3. Kedudukan dan Kekuatan Hukum SEMA dalam Hukum Positif Indonesia

Sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan tugasnya, yang berdampak signifikan terhadap sistem peradilan dan hukum

[124] Nasution, M. *"Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai Instrumen Penyeragaman Hukum dalam Perkara Perdata"*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume. 7, Nomor. 3, 2018, hlm. 112-130

nasional.[125] Kewenangan ini secara tegas diberikan melalui Pasal 24A UUD 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."

Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Agung juga diberi wewenang untuk menerbitkan peraturan tambahan guna menambal kekosongan hukum yang dibutuhkan agar jalannya peradilan tetap lancar. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum angka 2 huruf c UU No. 14 Tahun 1985 yang menyebutkan:

"Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung diberi kekuasaan dan kewenangan untuk membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan."

Sejalan dengan hal itu, Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 turut mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk menetapkan aturan lanjutan terkait hal-hal yang dibutuhkan demi kelancaran jalannya peradilan ketika terdapat kekosongan dalam undang-undang. Melalui kewenangan inilah Mahkamah Agung menghasilkan berbagai produk hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk bagi hakim, pengadilan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Salah

[125] Maulana Ridho Al Fasil, *"Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum"*, dalam Jurnal Usrah, Volume. 4 Nomor. 2, 2023, hlm. 231

satu produk hukum yang lahir dari kewenangan tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA.[126]

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pada dasarnya merupakan surat pemberitahuan resmi yang dikirimkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan di bawahnya.[127] Fungsinya adalah sebagai panduan bagi para hakim dalam menjalankan tugas, sejalan dengan fungsi kepemimpinan dan pengawasan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (4) UU Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua lingkungan peradilan.[128]

Tujuan diterbitkannya SEMA adalah untuk memberikan kejelasan sekaligus panduan dalam menafsirkan peraturan, sehingga kesalahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dapat dihindari. Ini merupakan salah satu prinsip mendasar dalam sistem hukum. Dari segi isi, SEMA memiliki ragam bentuk, ada yang berisi instruksi, ada yang sekadar memuat peringatan, dan ada pula yang menggabungkan ketiganya sekaligus yakni peringatan, perintah, dan petunjuk dalam satu dokumen.[129]

---

[126] *Ibid.*

[127] Raihan Andhika Santoso, et.al., *"Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif Indonesia"*, dalam Deposisi, Volume. 1, Nomor. 4 2023, hlm. 11

[128] *Ibid.,*

[129] *Ibid.,* hlm. 1

Ditinjau dari sudut peraturan perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan SEMA sebagai salah satu jenis peraturan yang diterbitkan oleh suatu lembaga berdasarkan kewenangannya. Pasal 7 dan Pasal 8 undang-undang tersebut mengatur:

***Pasal** 7*

1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
   d. Peraturan Pemerintah;
   e. Peraturan Presiden;
   f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
   g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 hanya mendefinisikan hierarki peraturan mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Meski SEMA tidak masuk dalam hierarki tersebut, kedudukannya tetap diakui dan bersifat mengikat selama diperintahkan

oleh peraturan yang lebih tinggi atau didasarkan pada kewenangan yang telah ditetapkan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, sebagian besar muatan SEMA memang bersifat kebijakan, namun pembentukannya berpijak pada perintah yang tertuang dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, SEMA tergolong sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.[130]

Dengan demikian, dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan SEMA berada di bawah undang-undang dan tidak dapat disejajarkan apalagi dianggap lebih tinggi darinya. Daya ikat SEMA pun tidak bersifat umum, melainkan hanya berlaku dan mengikat di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.[131]

4. Historis Pembentukan SEMA No. 3 Tahun 2018

Pada mulanya, SEMA disusun berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai badan peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengawasi seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya. Sejak tahun 1951, kewenangan menerbitkan SEMA semakin diperkuat melalui Pasal 131 UU No. 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, SEMA telah hadir sejak tahun 1950 dan

[130] Raihan Andhika Santoso, *Op.Cit.,* hlm. 10-12
[131] Maulana Ridho Al Fasil, *Op.Cit.,* hlm. 234

memiliki pijakan konstitusional yang jelas, sehingga setiap isi dan instruksi yang termuat di dalamnya wajib dipatuhi dan ditegakkan oleh seluruh hakim dan pengadilan.[132]

Adapun ketentuan mengenai dasar hukum penerbitan SEMA yang berlaku saat ini merujuk pada Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985, yang menyatakan bahwa: *"Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya."* Pasal inilah yang menjadi landasan utama lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2018, karena secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menyampaikan arahan, teguran, maupun peringatan kepada seluruh badan peradilan yang berada di bawah yurisdiksinya.

Dalam hal ini, SEMA No. 3 Tahun 2018 dipandang sebagai wujud nyata pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 32 ayat (4) tersebut. Secara substansial, kehadiran SEMA ini mencerminkan peran aktif Mahkamah Agung dalam menjaga integritas sekaligus memastikan konsistensi penegakan hukum di tingkat peradilan yang lebih rendah.

5. Isi SEMA No. 3 Tahun 2018

Secara teknis, Mahkamah Agung resmi menerbitkan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

[132] Raihan Andhika Santoso, *Op.Cit.,* hlm. 11

Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada tanggal 16 November 2018. Berdasarkan isi SEMA tersebut, sebelumnya Mahkamah Agung telah menggelar rapat pleno kamar pada 1 sampai 3 November 2018 untuk membahas berbagai persoalan teknis maupun non-teknis yudisial yang muncul di masing-masing kamar. Pertemuan itu menghasilkan enam rumusan berikut:[153]

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan.

Sehubungan dengan rumusan-rumusan tersebut, ada dua hal penting yang perlu digarisbawahi:[154] pertama, rumusan hasil rapat pleno kamar sejak tahun 2012 hingga 2018 ditetapkan sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, sehingga seluruhnya berlaku sebagai pedoman dalam penanganan perkara maupun kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding, sepanjang substansinya berkaitan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding. Kedua, rumusan pleno kamar periode 2012 hingga 2017 yang secara tegas telah direvisi, atau yang secara substansi bertentangan dengan rumusan tahun 2018, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dari sini dapat dipahami bahwa SEMA No.

3 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur penggunaan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar sebagai pedoman peradilan di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya konsistensi dan kesesuaian substansi di antara rumusan-rumusan tersebut.

Penelitian ini secara khusus hanya menyoroti bagian rumusan hukum Kamar Agama, tepatnya pada huruf A nomor 3, yang berisi ketentuan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian. Bunyi lengkap ketentuan tersebut adalah: *"Mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz"*.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian dapat diperoleh baik melalui cerai talak maupun cerai gugat. Dengan kata lain, pihak istri selaku penggugat berhak mengajukan tuntutan nafkah *iddah* maupun nafkah *mut'ah*, dengan syarat tidak terbukti *nusyuz* atau durhaka kepada suami. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Agama, sehingga putusan-putusan yang dihasilkan benar-benar mengedepankan keadilan gender, memberi kemanfaatan, dan memiliki kepastian hukum.[155]

Terjaminnya hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 ini patut menjadi catatan penting, sebab ketentuan tersebut diarahkan untuk mewujudkan hukum yang ideal,

bermoral, murni dan tulus, tidak diskriminatif, menjunjung kesetaraan gender, serta menjamin persamaan di depan hukum dan keadilan bagi semua pihak.[156]

Adapun Rapat Pleno Kamar Agama yang merumuskan SEMA No. 3 Tahun 2018 ini dihadiri oleh delapan orang peserta, yaitu:

1. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H
2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H
3. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H
4. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H
5. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.H
6. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H
7. Dr. H. Yasarudin, S.H., M.H
8. Dr. H. Abdul Manaf, M.[133]

[133] Raihan Andhika Santoso, *Op.Cit.,* hlm. 11

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tembilahan

1. Lokasi Pengadilan Agama Tembilahan

Secara administratif, Pengadilan Agama Tembilahan beralamat di Jalan Soebrantas Nomor 77, Tembilahan, dengan nomor telepon (0768) 23168 - (0768) 235553 dan nomor faksimile (0768) 23168. Adapun secara geografis, wilayah Pengadilan Agama Tembilahan berada pada koordinat 104° 10' Bujur Timur hingga 102° 32' Bujur Timur, serta 0° 36' Lintang Utara hingga 1° 07' Lintang Utara.[134]

2. Sejarah Pengadilan Agama Tembilahan

Pada mulanya, wilayah Pengadilan Agama Tembilahan merupakan bagian dari Provinsi wilayah tengah dan masih tergabung dengan Kabupaten Indragiri Hulu yang beribukota di Rengat.

Dalam penyelesaian sengketa perkara perdata agama, baik yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, maupun sedekah menurut hukum Islam, saat itu Pengadilan Agama yang pada masa itu masih disebut Mahkamah Syar'iyah dan berkedudukan di Kota Bukittinggi menjalankan sidang keliling ke berbagai daerah, termasuk ke wilayah Riau, tepatnya di Indragiri Hilir.

---

[134] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Pengailan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Tembilahan, https://pa-tembilahan.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/alamat-pengadilan

Memasuki tahun 1965, seiring dengan pemekaran wilayah kabupaten di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu tetap beribukota di Rengat, sementara Kabupaten Indragiri Hilir resmi berdiri sendiri dengan ibukota di Tembilahan.

Setelah Kabupaten Indragiri Hilir terbentuk dengan Tembilahan sebagai ibukotanya, berbagai instansi pemerintahan di tingkat kabupaten pun mulai dibentuk secara bertahap, termasuk keberadaan Pengadilan Agama Tembilahan yang kemudian menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Landasan resmi pembentukan Pengadilan Agama Tembilahan tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 16 Maret 1972, tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di wilayah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Utara, serta Aceh, yang salah satu poinnya mencakup pembentukan Pengadilan Agama Tembilahan.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Tembilahan

1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004
3. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006
4. Keputusan Presiden RI Nomor: 21 Tahun 2004.[135]

[135] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Pengailan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Tembilahan, https://pa-tembilahan.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/module-layouts

3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, salah satu tugas pokok Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk mengadili, mengkaji, dan menyelesaikan kasus tingkat pertama khusus bagi masyarakat Islam. Terdapat sembilan ruang lingkup perkara yang ditangani. Bidang-bidang tersebut meliputi pernikahan, warisan, wasiat, hibah, perwakafan, zakat, infak, sedekah, hingga masalah-masalah ekonomi syariah.

Bidang perkawinan sendiri, berdasarkan pedoman Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, esensi dari sebuah perkawinan adalah persatuan secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Ikatan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan abadi, dengan menjadikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi utamanya. Cakupan bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama ini cukup luas, meliputi antara lain izin poligami, izin menikah bagi yang belum berusia 21 tahun apabila terdapat perbedaan pendapat di antara orang tua atau wali, dispensasi kawin, pencegahan dan penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan atas kelalaian kewajiban suami istri, perceraian baik melalui talak maupun gugatan cerai, pembagian harta bersama, pengurusan dan hak asuh anak, kewajiban ibu memikul biaya pemeliharaan anak apabila ayah tidak menjalankan

tanggung jawabnya, penetapan sah tidaknya status anak, pencabutan kekuasaan orang tua maupun wali, penunjukan wali pengganti, penetapan wali bagi anak di bawah 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya tanpa penunjukan wali sebelumnya, pembebanan ganti rugi terhadap wali yang merugikan harta anak yang diasuhnya, penetapan asal usul anak, penolakan keterangan untuk perkawinan campuran, hingga penetapan keabsahan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dilaksanakan menurut aturan lain.

Selain perkawinan, kewenangan Pengadilan Agama juga mencakup bidang kewarisan, yakni pengaturan mengenai pemindahan hak atas harta peninggalan (tirkah) pewaris, termasuk penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris beserta besaran bagian masing-masing. Berkaitan dengan itu, terdapat pula bidang wasiat, yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada pihak lain atau lembaga tertentu yang baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia, serta bidang hibah, yang merupakan pemberian benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada pihak lain yang masih hidup untuk dimiliki sepenuhnya.

Selanjutnya, bidang wakaf mengatur tindakan hukum seseorang, kelompok, atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya untuk dilembagakan secara permanen guna kepentingan ibadah maupun keperluan lain sesuai ajaran Islam. Adapun bidang zakat berkaitan dengan harta kekayaan yang wajib disisihkan sesuai ketentuan syariah setelah mencapai nisab, untuk kemudian disalurkan melalui lembaga zakat kepada

pihak yang berhak menerimanya. Sementara itu, infaq dimaknai sebagai pemberian seseorang kepada orang lain guna memenuhi kebutuhannya, sedangkan shadaqah merupakan pemberian sukarela tanpa paksaan dan tanpa batasan jumlah maupun waktu, yang dilakukan semata-mata untuk mengharap ridha Allah SWT.

Terakhir, kewenangan Pengadilan Agama juga mencakup bidang ekonomi syariah, yaitu segala kegiatan atau usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, hingga bisnis syariah secara umum.

B. Implementasi Pemberian Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Tembilahan

Pemberian hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* merupakan salah satu akibat hukum dari putusnya perkawinan yang bertujuan memberikan perlindungan akan hak-hak perempuan setelah bubarnya suatu perkawinan. Dalam hukum Islam, *mut'ah* dipahami sebagai pemberian yang layak dari suami kepada bekas istri sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan atas berakhirnya ikatan perkawinan, sedangkan nafkah *iddah* didefinisikan sebagai kewajiban

materi yang secara mutlak harus diserahkan kepada pihak istri sepanjang berjalannya masa *iddah* sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Landasan hukum mengenai *mut'ah* dan nafkah *iddah* terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 241 dan Surah At-Thalaq ayat 6, yang menegaskan kewajiban suami untuk memberikan hak-hak tertentu kepada istri setelah perceraian. Ketentuan tersebut kemudian diakomodasi dalam hukum positif Indonesia melalui **Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**, serta **Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang mengatur kewajiban bekas suami memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri dalam kondisi tertentu.[136]

Sebelum diterbitkannya **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018**, praktik pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat masih menimbulkan perbedaan penafsiran di lingkungan peradilan agama. Sebagian hakim berpendapat bahwa hak tersebut hanya diberikan dalam perkara cerai talak karena Pasal 149 KHI secara eksplisit mengatur akibat hukum perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Akibatnya, istri yang mengajukan cerai gugat sering kali tidak memperoleh mut'ah dan nafkah iddah meskipun perceraian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan suami.

Untuk mengatasi perbedaan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan **SEMA Nomor 3 Tahun 2018** yang memberikan pedoman bahwa dalam

[136] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf c; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

perkara cerai gugat, istri **dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti melakukan nusyuz**. Kebijakan ini menunjukkan adanya perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih mengedepankan keadilan substantif dibandingkan hanya berpegang pada siapa yang mengajukan perceraian.[137]

Dalam konteks Pengadilan Agama Tembilahan, implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 secara normatif menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara cerai gugat. Hakim tidak hanya mempertimbangkan status para pihak sebagai penggugat atau tergugat, tetapi juga menilai penyebab perceraian, ada atau tidaknya unsur *nusyuz*, kemampuan ekonomi suami, serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* tidak semata-mata didasarkan pada aspek formal, melainkan juga pada fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Penulis akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis terhadap beberapa putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tembilahan. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberian hak mut'ah dan nafkah iddah dalam praktik peradilan serta sejauh mana pertimbangan hukum hakim telah mengakomodasi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Adapun perkara yang dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini terdiri atas tiga putusan selanjutnya akan dibahas

---

[137] Mahkamah Agung Republik Indonesia, **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

secara sistematis berdasarkan pertimbangan hukum hakim, dan implementasi pemberian hak mut'ah serta nafkah iddah.

1. Putusan Nomor 783/PDT.g/2023/PA.Tbh

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 783/Pdt.G/2023/PA.Tbh, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Tembilahan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Berbeda dengan perkara cerai gugat yang ditolak sehingga membatalkan relevansi SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dalam perkara ini perceraian benar-benar terjadi secara yuridis. Namun demikian, hak mut'ah dan nafkah iddah tetap tidak diberikan oleh pengadilan. Hal ini bukan merupakan pengabaian hakim terhadap perlindungan hak perempuan, melainkan konsekuensi logis dari ketiadaan tuntutan (petitum) mengenai hak-hak tersebut dari pihak Penggugat, yang dipadukan dengan pertimbangan hakim dalam memandang kelayakan penerapan kewenangan *ex officio*.

Apabila dianalisis dari segi hukum acara dan pembuktian, putusan ini memperlihatkan bahwa majelis hakim telah menerapkan tahapan pemeriksaan perkara secara sangat sistematis dan komprehensif. Proses pemeriksaan ini menjadi pijakan dasar dikabulkannya gugatan cerai:

Majelis hakim terlebih dahulu menguji identitas dan legalitas perkawinan melalui bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Kutipan Akta Nikah (P.2) yang membuktikan bahwa perkawinan dilangsungkan pada 26 Oktober 2007 dan pihak-pihak berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan. Hakim juga telah

berupaya mendamaikan para pihak melalui proses mediasi oleh mediator Zulfikar, S.H.I. pada 14 November 2023, yang pada akhirnya dinyatakan tidak berhasil.

Kemudian Majelis hakim secara saksama memeriksa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis sejak Januari 2023. Fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dipicu oleh faktor ekonomi di mana Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak, kebiasaan Tergugat berjudi dan mabuk, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kehadiran wanita idaman lain (WIL).

Yang selanjutnya Majelis hakim menerima kesaksian dari dua orang keluarga dekat Penggugat yang telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian. Kedua saksi mengonfirmasi di bawah sumpah bahwa mereka melihat dan mendengar sendiri perselisihan tersebut, serta memastikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sejak bulan Maret 2023 tanpa adanya komunikasi maupun pemberian nafkah.

Berdasarkan fakta persidangan, hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi secara sah. Hakim juga menggunakan pendekatan kaidah fikih *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan lebih diutamakan

daripada menarik kebaikan) untuk menegaskan bahwa mempertahankan rumah tangga tersebut hanya akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar.

Fakta paling esensial dalam menganalisis ketiadaan hak mut'ah dan nafkah iddah pada putusan ini terletak pada rumusan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2023. Dalam surat gugatan tersebut, Penggugat memformulasikan petitum secara sangat terbatas.

1. Penggugat hanya memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan secara keseluruhan.
2. Penggugat menuntut dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap dirinya.
3. Penggugat memohon agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada amar putusan ditetapkan sejumlah Rp1.410.000.

Dari rumusan petitum di atas, terlihat jelas bahwa Penggugat secara sadar atau tidak sadar melepaskan hak perdatanya untuk menuntut nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah madhiyah (nafkah masa lampau). Dalam hukum acara perdata yang berlaku di peradilan agama, asas *ultra petita* (hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut) pada dasarnya mengikat majelis hakim. Ketiadaan tuntutan ini membuat majelis hakim tidak memiliki kewajiban mutlak untuk mempertimbangkan dan menghitung besaran hak-hak finansial tersebut.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memang memberikan mendorong kewenangan *ex officio* kepada hakim Peradilan Agama untuk menghukum suami agar membayar mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, demi melindungi hak-hak perempuan. Namun, Putusan Nomor 783/Pdt.G/2023/PA.Tbh ini menunjukkan bahwa implementasi kewenangan *ex officio* tersebut bersifat diskresioner (pilihan kebijakan hakim) dan kondisional berdasarkan asas kepatutan serta kemampuan nyata Tergugat. Tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* dalam membebankan mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara ini sangat dapat dijustifikasi oleh beberapa fakta yuridis di persidangan:

Fakta persidangan secara tegas membuktikan bahwa salah satu pemicu utama kehancuran rumah tangga adalah ketidakmampuan dan ketidakmauan Tergugat dalam memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Membebankan kewajiban finansial baru (mut'ah dan iddah) secara *ex officio* kepada Tergugat yang telah terbukti gagal secara ekonomi, suka berjudi, dan gemar mabuk-mabukan justru akan melahirkan putusan yang ilusif (tidak dapat dieksekusi atau *non-executable*).

Tergugat diketahui hanya hadir pada sidang pertama dan saat proses mediasi, namun selanjutnya tidak pernah lagi hadir di persidangan maupun mengutus kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Hal ini mengakibatkan perkara diputus di luar hadirnya Tergugat. Ketidakhadiran ini menyulitkan majelis hakim untuk melakukan

pemeriksaan setempat mengenai kapabilitas riil finansial Tergugat guna menetapkan nominal mut'ah dan iddah yang berkeadilan.

Sebagai konklusi, implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam Putusan Nomor 783/Pdt.G/2023/PA.Tbh menunjukkan dinamika penegakan hukum pelindungan perempuan di Pengadilan Agama Tembilahan. Jika pada putusan perkara yang ditolak, hak mut'ah dan iddah gugur karena tidak lahirnya status janda/duda, maka dalam perkara yang dikabulkan ini, hak-hak tersebut gugur murni karena absennya tuntutan dari Penggugat dan pertimbangan rasional hakim untuk tidak menggunakan kewenangan *ex officio*-nya. Putusan ini mencerminkan sikap pragmatis majelis hakim yang lebih mengutamakan pemberian kepastian hukum atas pemutusan perkawinan yang dipenuhi oleh KDRT dan penelantaran ekonomi, dibandingkan memaksakan amar putusan mengenai hak finansial yang terbukti secara materiil mustahil untuk dipenuhi oleh Tergugat.

2. **Putusan Nomor 805/PDT.g/2023/PA.TBH**

Berdasarkan implementasi **SEMA Nomor 3 Tahun 2018** pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tembilahan, khususnya dalam **Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Tbh**, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan mengenai pemberian hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan hukum terhadap istri sebagaimana yang dikehendaki oleh Mahkamah Agung. Putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim masih berorientasi pada asas ***ultra***

petita, yaitu hanya mengabulkan apa yang dimohonkan oleh para pihak. Dalam perkara tersebut, Penggugat memang mengajukan tuntutan mengenai nafkah *madhiyah* dan nafkah anak, namun sama sekali tidak mengajukan tuntutan mengenai hak *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Akibatnya, majelis hakim hanya memeriksa dan mempertimbangkan tuntutan yang tercantum dalam gugatan, sehingga hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* tidak diberikan meskipun berdasarkan fakta persidangan terdapat indikasi bahwa Penggugat bukanlah pihak yang *nusyuz*. Hal ini terlihat dari adanya dalil dan alat bukti yang diajukan Penggugat mengenai dugaan kekerasan dalam rumah tangga serta adanya hubungan suami dengan perempuan lain yang kemudian menjadi salah satu penyebab retaknya rumah tangga.

Apabila ditelaah lebih mendalam, substansi **SEMA Nomor 3 Tahun 2018** sebenarnya memberikan ruang bagi hakim untuk lebih aktif memberikan perlindungan kepada perempuan yang mengajukan cerai gugat. SEMA tersebut menegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti melakukan *nusyuz*. Artinya, fokus utama bukan lagi semata-mata pada siapa yang mengajukan perceraian, melainkan pada siapa yang menjadi penyebab putusnya rumah tangga. Dalam perkara Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Tbh, persidangan memperlihatkan adanya saling bantah mengenai penyebab keretakan rumah tangga. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik, bersikap kasar, bahkan melakukan nikah siri dengan perempuan lain, sedangkan Tergugat

membantah tuduhan tersebut dan justru menuduh Penggugat sebagai pihak yang tidak menjalankan kewajiban sebagai istri.

Namun demikian, apabila dianalisis secara menyeluruh terhadap alat bukti yang diajukan, terlihat bahwa Penggugat telah berupaya membuktikan dalilnya melalui surat keterangan pemeriksaan fisik akibat dugaan kekerasan, bukti percakapan WhatsApp, serta bukti yang menunjukkan adanya dugaan hubungan suami dengan perempuan lain. Bukti-bukti tersebut memperlihatkan bahwa konflik rumah tangga tidak sepenuhnya disebabkan oleh Penggugat. Bahkan terdapat indikasi bahwa Tergugat memiliki kontribusi besar terhadap rusaknya hubungan perkawinan. Dengan demikian, secara substansi sulit menyatakan bahwa Penggugat merupakan istri yang nusyuz sehingga kehilangan hak-haknya sebagai bekas istri.

Akan tetapi, dalam praktiknya majelis hakim tidak menjadikan fakta-fakta tersebut sebagai dasar untuk memberikan hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* secara ***ex officio***. Hakim lebih berfokus pada batasan tuntutan yang diajukan Penggugat sehingga hanya mengabulkan hak yang diminta dalam petitum, yaitu nafkah madhiyah dan nafkah anak. Dengan kata lain, implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam putusan ini masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mengedepankan fungsi hakim sebagai pelindung hak-hak perempuan pasca perceraian.

Dari sudut pandang hukum Islam, kondisi tersebut sebenarnya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip **keadilan (*'adl*)** dan

kemaslahatan (*maslahah*). Dalam fikih, *mut'ah* diberikan sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan kepada istri setelah berakhirnya perkawinan, sedangkan nafkah *iddah* merupakan bentuk tanggung jawab suami selama masa tunggu istri. Hak tersebut lahir bukan semata-mata karena adanya permohonan, melainkan sebagai konsekuensi dari putusnya hubungan perkawinan selama istri tidak melakukan *nusyuz*. Oleh sebab itu, ketika fakta persidangan tidak membuktikan adanya *nusyuz* dari pihak istri, maka secara substansi istri masih memiliki dasar untuk memperoleh kedua hak tersebut.

Di sisi lain, putusan ini juga memperlihatkan masih adanya kendala implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di tingkat peradilan agama. Salah satu kendala yang paling nyata adalah kurangnya pemahaman para pencari keadilan mengenai hak-hak yang sebenarnya dapat dimohonkan setelah perceraian. Penggugat dalam perkara ini hanya menuntut nafkah madhiyah dan nafkah anak tanpa memasukkan tuntutan *mut'ah* maupun nafkah *iddah* ke dalam petitumnya. Akibatnya, ruang gerak hakim menjadi terbatas karena harus tetap memperhatikan asas pemeriksaan perkara perdata. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kualitas penyusunan gugatan serta keberanian hakim dalam menerapkan kewenangan ***ex officio*** demi mewujudkan keadilan substantif.

Dengan demikian, implementasi pemberian hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan, khususnya dalam Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Tbh, **belum dapat dikatakan optimal**. Secara normatif, SEMA telah membuka ruang perlindungan yang lebih luas bagi perempuan dalam perkara cerai gugat. Namun secara empiris, implementasinya masih dipengaruhi oleh pola pikir yang berorientasi pada petitum gugatan, sehingga hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* belum diberikan meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa penyebab perceraian tidak sepenuhnya berasal dari pihak istri. Oleh karena itu, putusan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dengan praktik penerapannya di pengadilan. Ke depan, implementasi SEMA tersebut memerlukan peran hakim yang lebih progresif dalam menggali nilai-nilai keadilan substantif, sekaligus meningkatkan pemahaman para pihak mengenai hak-hak yang melekat pada istri setelah perceraian agar tujuan hukum berupa **keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan** benar-benar dapat diwujudkan.

3. **Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PA.Tbh**

Dalam perkara Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PA.Tbh, Penggugat tidak hanya mengajukan tuntutan primer berupa pemutusan ikatan perkawinan (perceraian), tetapi juga melakukan manuver hukum yang komprehensif dengan secara tegas menuntut hak-hak pasca-

perceraian yang meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* (nafkah masa lalu yang dilalaikan). Konstruksi gugatan yang diajukan sangat solid karena didasarkan pada dalil-dalil yang secara eksplisit membuktikan *fault grounds* (kesalahan) pada pihak Tergugat, yakni adanya perselingkuhan, kebiasaan berjudi secara daring, pengabaian kewajiban nafkah, ketidaktransparanan finansial, serta penelantaran emosional terhadap istri dan anak-anaknya. eberhasilan Penggugat dalam mendapatkan hak *mut'ah* dan *iddah* pada perkara ini tidak lepas dari fakta bahwa ia didampingi oleh kuasa hukum (penasihat hukum). Kehadiran kuasa hukum memastikan bahwa instrumen perlindungan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 149 jo. Pasal 152 KHI diformulasikan dengan tepat ke dalam petitum gugatan.

Lebih dari itu, gugatan tersebut secara strategis memuat penegasan *negative proof* (pembuktian negatif) bahwa Penggugat bukanlah istri yang *nusyuz*. Keberhasilan perkara ini dalam memperoleh hak mut'ah dan nafkah iddah secara mutlak dipengaruhi oleh kehadiran kuasa hukum atau penasihat hukum. Kuasa hukum mampu menerjemahkan norma Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tekstual berorientasi pada cerai talak menjadi instrumen pelindung dalam cerai gugat dengan memanfaatkan ruang interpretasi yang dibuka oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Kuasa hukum juga secara cermat menyajikan alat bukti yang menguatkan dalil gugatan, seperti slip gaji Tergugat sebesar

Rp7.000.000,00 per bulan, yang memberikan pijakan objektif dan rasional bagi Majelis Hakim untuk menakar *ability to pay* (kemampuan membayar) Tergugat dalam memenuhi beban mut'ah dan iddah tersebut. Putusan ini menjadi *benchmark* (tolok ukur) bahwa penerapan asas *ex aequo et bono* dan kepatutan dapat terwujud secara maksimal apabila hakim dihadapkan pada konstruksi *petitum* (tuntutan) yang jelas, spesifik, dan didukung pembuktian yang tidak terbantahkan.

Kontras yang sangat tajam terlihat saat membedah Putusan perkara Nomor 783/Pdt.G/2023/PA.Tbh. Dalam perkara ini, Penggugat hadir murni sebagai pencari keadilan (*pro se litigant*) tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketiadaan literasi hukum yang memadai menyebabkan gugatan yang diajukan bersifat sangat minimalis dan hanya berfokus pada satu tujuan absolut: terlepas dari ikatan perkawinan. Dalam *posita* (dudukan perkara) maupun *petitum*, Penggugat sama sekali tidak menyinggung tuntutan hak mut'ah dan iddah, meskipun secara faktual dan materiil, alasan perceraiannya mungkin memiliki kemiripan bobot kesalahan Tergugat (suami) dengan perkara 376/Pdt.G/2026/PA.Tbh, dan Penggugat pun tidak dalam kondisi *nusyuz*.

Ketidakmampuan memformulasikan tuntutan hukum ini menjebak Majelis Hakim dalam dilema prosedural. Hukum acara perdata di Indonesia menganut asas *ultra petita non cognoscitur*, yang secara ketat melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang diminta. Akibatnya, esensi

perlindungan hak ekonomi perempuan yang diamanatkan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 gagal terimplementasi bukan karena hakim tidak mau memberikannya, melainkan karena pintunya tidak pernah dibuka melalui tuntutan Penggugat. Kasus ini merepresentasikan fenomena "pemiskinan struktural" pasca-perceraian yang sering dialami oleh perempuan kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki akses terhadap jasa advokat.

Dimensi sosiologis dan psikologis dari ketimpangan literasi hukum semakin tergambar jelas dalam Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Tbh. Dalam perkara ini, Penggugat yang juga maju tanpa kuasa hukum, menunjukkan pemahaman hukum yang parsial. Gugatan yang diajukan mencakup tuntutan cerai dan tuntutan pemeliharaan anak (*hadhanah*) beserta nafkah anak, namun secara ironis mengabaikan hak mut'ah dan nafkah iddah untuk dirinya sendiri.

Kondisi ini merefleksikan konstruksi sosial di mana seorang ibu sering kali memprioritaskan "penyelamatan" hak dan masa depan anak-anaknya saat terjadi krisis rumah tangga, namun mengorbankan atau abai terhadap hak-hak ekonominya sendiri sebagai mantan istri. Tanpa panduan dari penasihat hukum yang idealnya dapat merumuskan gugatan kumulasi (gabungan tuntutan) yang proporsional, Penggugat dalam perkara 805 ini kehilangan kompensasi finansial yang seharusnya sah menjadi miliknya (mut'ah sebagai bentuk *penghiburan/kenang-kenangan* dan iddah sebagai *jaminan masa tunggu*). Sama halnya dengan perkara 783, Majelis Hakim

yang pasif tidak dapat secara sepihak membebankan kewajiban mut'ah dan iddah kepada Tergugat karena terbentur asas *ultra petita*.

Perbandingan ketiga putusan tersebut menguak urgensi redefinisi atas penerapan asas *ius curia novit* (hakim dianggap tahu hukum) dalam peradilan agama, khususnya yang bersinggungan dengan kelompok rentan. Jika hanya berpegang kaku pada *nemo judex sine actore* (tidak ada hakim jika tidak ada tuntutan) dan *ultra petita*, maka keadilan substantif yang dibawa oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 hanya akan menjadi monopoli eksklusif bagi istri-istri yang mampu menyewa jasa advokat.

Secara filosofis, penyelesaian sengketa keluarga dalam hukum Islam tidak sepenuhnya tunduk pada rezim perdata murni yang individualistis, melainkan memiliki muatan *public interest* (kepentingan umum) dan perlindungan terhadap *mustadhafin* (pihak yang lemah). Oleh karena itu, pengadilan sejatinya dibekali dengan Hak *Ex-Officio* (kewenangan hakim karena jabatannya). Meskipun hak ex-officio umumnya dipahami untuk membebankan nafkah anak, perkembangannya, terutama dibaca bersamaan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, mengharuskan hakim berperan lebih proaktif.

Dalam kasus-kasus seperti Putusan 783/2023 dan 805/2023 di mana istri tidak didampingi kuasa hukum, hakim pada saat persidangan berkewajiban menggali fakta materiil terkait *nusyuz* dan kesalahan suami, serta memiliki kewajiban moral untuk memberikan *legal advising*

(penasihatan hukum) secara netral di persidangan untuk memberitahu hak-hak yang dimiliki Penggugat sebelum perkara diputus. Dengan demikian, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak lagi mensyaratkan kelihaian bermanuver dari kuasa hukum (seperti pada Putusan 376/2026), melainkan murni lahir dari kepekaan dan progresivitas *judex facti* (hakim pemeriksa fakta) yang bertindak bukan sekadar sebagai "corong undang-undang", melainkan sebagai penjaga keadilan yang hakiki bagi perempuan yang terluka oleh kezaliman institusi perkawinannya.

C. Kendala Yang Dihadapi Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Dalam Memberikan Hak Tersebut Dan Bagaimana Upaya Penyelesaiannya

1. Hakim

a. Hakim 1 Ahmad Khatib, S.H.I., M.H.,

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, **Ahmad Khatib, S.H.I., M.H.,** penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam memutus hak-hak perempuan pasca-perceraian menghadirkan dialektika antara perlindungan substantif dan kepatuhan terhadap hukum acara perdata. Berkaitan dengan esensi dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta landasan normatifnya, Hakim Ahmad Khatib, S.H.I., M.H. menjelaskan secara komprehensif:[138]

[138] Wawancara dengan Bapak Ahmad Khatib, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, bertempat di Pengadilan Agama Tembilahan, 15 Juni 2026.

"SEMA ini sebenarnya internal sifatnya, mengatur dan memandu hakim-hakim agar putusan-putusan itu konsisten, tidak liar antara satu pengadilan dengan pengadilan lain. Secara umum, pada prinsipnya untuk cerai gugat itu kan tidak ada mengenal nafkah iddah dan mut'ah, tetapi karena disesuaikan dengan konteks keindonesiaan dan perempuan sebagai pihak yang rentan dan harus dilindungi, terlebih lagi dalam hukum Islam, maka Mahkamah Agung melalui Kamar Agama ingin menyampaikan bahwa hakim itu boleh loh memberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz."

Meskipun instrumen hukum tersebut telah memberikan keleluasaan bagi hakim untuk mengabulkan hak-hak ekonomi perempuan dalam cerai gugat, realitas persidangan tetap terikat secara ketat oleh batasan formil hukum acara. Menanggapi persoalan mengenai bagaimana sikap hakim apabila seorang istri tidak secara spesifik menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam posita maupun petitumnya, Hakim Ahmad Khatib, S.H.I., M.H. menegaskan prinsip kehati-hatian yudisial:

"Dalam hal tak diminta, saya bilang tetap harus hati-hati. Hakim itu ya harus berhati-hati maksudnya jangan sampai menjadi bumerang di putusan, karena pada intinya hakim itu hanya memutus apa yang diminta. Ada istilahnya ultra petita, yaitu memutus di luar apa yang diminta atau berlebih. Jadi kalau orang

minta satu kok diputus dua, nah itu harus hati-hati karena banyak pertimbangannya, terlebih lagi dalam perkara majelis."

Selanjutnya, dinamika di persidangan menunjukkan bahwa sebagian penggugat (istri) terkadang mengajukan perceraian murni tanpa berkeinginan menuntut hak-hak finansialnya. Terkait fenomena tersebut, Hakim Ahmad Khatib, S.H.I., M.H. memberikan pandangannya:

"Kadang ya memang mereka merasa ya sudah ngurus cerai aja, ada juga yang memang tidak tahu, tapi ada juga yang tidak mau memperpanjang. Meskipun demikian, dalam semua perkara, hakim tidak boleh melanggar prinsip-prinsip peradilan dan tetap harus kasuistis."

Guna menjamin kepastian pelaksanaan putusan apabila tuntutan hak *mut'ah* dan *iddah* tersebut dikabulkan, Pengadilan Agama Tembilahan menerapkan strategi yuridis preventif melalui redaksional amar putusan. Sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Ahmad Khatib, S.H.I., M.H.:

"Di amar putusan itu akan ditambahkan bahwa harus menyerahkan kewajibannya dulu sebelum mengambil akta cerai. Jadi jikam belum diserahkan, panitera tidak boleh menyerahkan akta cerai, sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2017."

Melalui uraian tersebut, terlihat jelas bahwa Pengadilan Agama Tembilahan berupaya menyeimbangkan antara asas perlindungan hukum bagi perempuan yang bersandar pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan prinsip-prinsip formil hukum acara perdata, di mana setiap pembebanan

hak ekonomi tetap diuji melalui fakta-fakta persidangan, ketiadaan unsur *nusyuz*, serta batas-batas petitum gugatan yang diajukan para pihak.

Mala, dapat dianalisis bahwa titik temu antara perlindungan hak perempuan dan kepatuhan terhadap hukum acara perdata terletak pada optimalisasi peran aktif hakim (*active judge*) yang tetap berlandaskan pada koridor hukum formil. Meskipun hakim terikat oleh asas *ultra petita* dan tidak dapat serta-merta mengabulkan hak yang tidak dituntut, disparitas pemahaman hukum di kalangan masyarakat (khususnya perempuan yang mengajukan cerai gugat) menuntut adanya instrumen edukasi dan kesadaran hukum yang lebih masif. Oleh karena itu, konsistensi penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan tidak hanya bergantung pada kehati-hatian redaksional amar putusan semata, melainkan juga pada bagaimana hukum progresif dapat mengakomodir perlindungan substantif tanpa mencederai kepastian hukum acara, sehingga keadilan bagi perempuan pasca-perceraian dapat terwujud secara utuh dan berkeadilan.

b. Hakim 2 Nasihin, S.Sy

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, **Nasihin, S.Sy.**, implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di lingkungan peradilan agama pada dasarnya tidak menemui hambatan kelembagaan yang signifikan, melainkan sangat bergantung pada dinamika formil permohonan pihak yang berperkara.

Ketika penulis mengonfirmasi mengenai esensi perlindungan hukum dan daya ikat SEMA tersebut dalam perkara cerai gugat, Hakim Nasihin, S.Sy. memberikan penjelasan teoretis berikut:[139]

> *"Kalau untuk SEMA tersebut, esensinya bahwa ketika para pihak, terutama perempuan, ketika berhadapan dengan hukum itu tidak termarginalkan dan tidak dibedakan. Baik perempuan maupun laki-laki gendernya itu tetap sama di mata hukum, setara. Jadi biar tidak ada ketimpangan, maka PERMA dan SEMA itu ada. SEMA itu mengikatnya dari ruang lingkup Mahkamah Agung sebagai petunjuk bagi aparatur di bawahnya, di mana Mahkamah Agung mengakomodir agar perempuan yang mengajukan cerai gugat yang terkadang merupakan konklusi dari penderitaan menahun tanpa nafkah diberikan ruang untuk mendapatkan haknya."*

Kendati instrumen hukum tersebut telah memberikan ruang bagi pemenuhan hak ekonomi perempuan, Hakim Nasihin, S.Sy. menegaskan bahwa peradilan agama menganut asas pasif di mana hakim bersifat menerima dan memeriksa perkara berdasarkan apa yang didalilkan serta dituntut oleh para pihak (ultra petita principle). Menanggapi batasan kewenangan hakim apabila istri tidak mencantumkan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah, beliau menjelaskan:

> *"Pengadilan itu kita hanya menerima. Jadi bukannya proaktif yang harus 'ayo harus seperti ini'. Jadi apa yang mereka tuntut,*

[139] Wawancara dengan Bapak Nasihin, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, bertempat di Pengadilan Agama Tembilahan, 16 Juni 2026.

itulah yang kita periksa. Selama tidak ada tuntutan tentang hak-hak dari perempuan, kita fokus dengan apa yang dituntut pihak tersebut. Kalau kita memberikan tanpa ada tuntutan, itu jelas melanggar ultra petita."

Demikian, dalam memutus tuntutan *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang diajukan oleh istri, Hakim Nasihin, S.Sy. menekankan pentingnya pembuktian materiil di persidangan guna memastikan bahwa hak tersebut memang layak diberikan:

"Selama terbukti tidak melakukan nusyuz, dapat. Indikatornya ada dua ya: pertama dia menuntut, misalnya 'saya menuntut mut'ah sekian, iddah sekian', dan yang kedua terbukti dia tidak nusyuz. Selama ada tuntutannya dan terbukti tidak nusyuz, itu bisa diberikan. Jadi bukan berarti harus diberikan secara otomatis atau ex officio, melainkan bergantung pada sejauh mana pihak istri dapat membuktikan dalil gugatannya serta ketiadaan unsur nusyuz di persidangan."

Menurut penulis, pemaparan tersebut mempertegas bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan pasca-pernikahan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum (literasi hukum) para pencari keadilan itu sendiri. Karena hakim terikat oleh hukum acara perdata yang membatasi ruang lingkup pemeriksaan pada petitum gugatan, maka inisiatif awal dari pihak istri untuk mencantumkan tuntutan hak ekonomi menjadi kunci utama. Oleh karena

itu, sinergi antara optimalisasi peran SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di ruang sidang dan peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat rentan merupakan prasyarat mutlak agar tujuan perlindungan hak-hak perempuan pasca-perceraian dapat tercapai secara substansial tanpa menabrak asas-asas formil peradilan.

c. Hakim 3 Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.

Berdasarkan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Tembilahan, implementasi perlindungan hak-hak perempuan pasca-perceraian dalam perkara cerai gugat, sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, masih dihadapkan pada sejumlah kendala praktis. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pembuktian di persidangan, tetapi juga bermuara pada efektivitas eksekusi putusan.

Hal ini terungkap dalam wawancara mendalam penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, **Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.** Dalam wawancara tersebut, penulis menanyakan mengenai hambatan utama yang dihadapi majelis hakim dalam memutus pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai gugat, khususnya ketika perkara diputus secara **verstek** (suami tidak hadir).[140]

Hakim Aab Abdul Wahab: *"Masalah utamanya ada pada pembuktian dan proporsionalitas. Pada perkara cerai gugat*

[140] Wawancara dengan Bapak Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, bertempat di Pengadilan Agama Tembilahan, 15 Juni 2026.

verstek, kita hanya dihadapkan pada penggugat (istri) saja. Kita kesulitan memperoleh gambaran utuh apakah istri benar-benar tidak terbukti nusyuz, atau justru dia yang meninggalkan rumah tanpa izin. Selain itu, terkait pembuktian kemampuan ekonomi suami, sering kali penggugat hanya membawa bukti buku nikah tanpa rincian penghasilan suami. Hakim harus sangat berhati-hati menimbang kelayakannya agar nominal yang diputus tidak terlalu berat atau tidak masuk akal, mengingat asas kepatutan dan keadilan harus tetap dijaga."

Lebih lanjut, penulis juga menyoroti keengganan majelis hakim dalam menerapkan kewenangan *ex officio* (memutus tanpa adanya tuntutan) untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat, padahal instrumen hukumnya telah tersedia. Menanggapi isu ini, Hakim Aab Abdul Wahab menitikberatkan pada persoalan pasca-putusan, yakni kebuntuan dalam tahap eksekusi.

Hakim Aab Abdul Wahab: *"Kendala terbesarnya ada di eksekusi. Pada cerai talak, putusan hakim bisa dieksekusi karena ada mekanisme penahanan akta cerai sampai suami membayar kewajibannya. Sedangkan pada cerai gugat, apalagi yang suaminya tidak pernah hadir (verstek) dan tidak memiliki itikad baik, putusan pembebanan nafkah berpotensi tidak tereksekusi. Kalau kita hukum suami untuk membayar, tapi dia tidak pernah*

datang dan tidak mengambil akta cerainya, maka putusan itu akhirnya hanya menjadi putusan di atas kertas."

Menghadapi kebuntuan eksekusi hukum materiel tersebut, peradilan agama sejatinya membutuhkan terobosan progresif. Dalam dialog selanjutnya, Hakim Aab Abdul Wahab memaparkan bahwa keberhasilan penerapan *ex officio* dalam cerai gugat sangat bergantung pada sinergi antarlembaga. Beliau merujuk pada praktik progresif yang telah diterapkan di yurisdiksi lain sebagai pedoman yang ideal.

Hakim Aab Abdul Wahab: *"Ada terobosan hukum progresif yang patut dicontoh, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya. Di sana, hakim sudah mulai memutus secara ex officio dalam cerai gugat verstek. Mengapa mereka berani? Karena Pengadilan Agama di Surabaya telah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Daerah setempat. Melalui MoU tersebut, suami yang tidak membayar kewajiban nafkah pasca-cerai akan diblokir layanan publik dan administrasi kependudukannya, misalnya saat ia hendak mengurus KTP atau menikah lagi. Jika di masa depan Pengadilan Agama Tembilahan bisa terkoneksi dengan Pemda melalui skema serupa, maka aturan SEMA ini baru bisa berjalan maksimal."*

Dari kutipan wawancara di atas, penulis menganalisis bahwa pemenuhan hak *mut'ah* dan *iddah* tidak cukup hanya bersandar pada keberanian hakim memutus perkara secara *ex officio*. Putusan pengadilan

harus memiliki daya paksa (*imperatif*). Gagasan untuk mengintegrasikan sanksi administratif melalui kerja sama antara Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah merupakan solusi konkret. Langkah preventif dan represif administratif ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum secara formil, melainkan wujud perlindungan hukum yang substantif bagi mantan istri di Kabupaten Indragiri Hilir.

d. Hakim 4 AMRY SAPUTRA, S.H

Berdasarkan hasil wawancara mendalam antara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, Amry Saputra, S.H., dapat dipahami bahwa persoalan perlindungan hak-hak perempuan pasca-perceraian dalam perkara cerai gugat tidak hanya bertumpu pada aspek formil penerapan norma hukum semata, melainkan turut diwarnai oleh kompleksitas kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis para pihak yang berperkara. Sebagaimana dijelaskan oleh Amry Saputra, S.H., faktor ekonomi kerap menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian:[141]

> *"Kalau yang saya alami, kan salah satu alasan orang pisah itu kan di sini ekonomi. Berarti si suami tidak menafkahi istrinya. Tidak menafkahi dan tidak ada... Itu termasuk salah satu alasan perceraian yang paling tinggi, itu pasti biasanya ekonomi."*

Bapak Amry Saputra, S.H. menegaskan bahwa posisi institusi peradilan dalam memproses perkara perdata menganut prinsip pasif-

[141] Wawancara dengan Bapak Amrysaputra, S.H, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, bertempat di Pengadilan Agama Tembilahan, 16 Juni 2026.

receptif, di mana hakim terikat pada ruang lingkup tuntutan yang diajukan oleh para pihak tanpa kewenangan untuk bersikap intervensi secara berlebihan:

> *"Namanya pengadilan kan di sini hanya menerima ya. Jadi bukannya proaktif yang harus 'ayo, harus seperti ini-seperti ini'. Jadi apa yang mereka tuntut, itulah yang kita periksa. Selama tidak ada tuntutan tentang hak-hak dari perempuan, kita fokus dengan apa yang dituntut pihak tersebut."*

Menanggapi dinamika implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam perkara cerai gugat, di mana sebagian perempuan kerap memilih untuk melepaskan hak-hak ekonominya, Amry Saputra, S.H. memaparkan realitas empiris yang kerap ditemui di muka persidangan:

> *"Bahkan ketika dia pun ke sini enggak minta apa-apa. Memang dia nggak minta dan hanya mau pisah.... Bahkan ada, kasus tahun 2023, dibebankan laki-laki akan kewajibannya itu memberikn nafkah, yang perempuan nolak sama sekali... 'Yang penting pisah sudah, Pak. Tidak perduli saya dikasih iddah mut'ah itu'."*

Kendati instrumen hukum telah memberikan ruang bagi hakim untuk menguji pembebanan hak ekonomi secara proporsional, penolakan sukarela dari pihak istri secara yudisial tidak dapat diabaikan begitu saja. Terkait hal tersebut, Amry Saputra, S.H. menegaskan batasan kewenangan yudisial agar tidak mencederai asas hukum acara:

"Itu kalau sudah dia menolak, kita masih memaksa, itu namanya ultra petita itu."

Menanggapi fenomena tersebut, penegasan teoretis menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dan realitas sosial di masyarakat (*das sein*). Secara normatif, negara melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah berupaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Akan tetapi, keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan, melainkan juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan kehendak pihak yang menerima hak tersebut. Ketika seorang perempuan memilih untuk tidak menuntut atau bahkan menolak haknya, hakim tidak dapat memaksakan pemberian hak tersebut karena tindakan itu justru dapat bertentangan dengan asas hukum acara perdata, khususnya asas ultra petita, yakni larangan bagi hakim untuk memutus melebihi atau di luar apa yang dimohonkan oleh para pihak.

Pendapat Amry Saputra, S.H. menunjukkan adanya keseimbangan prinsipil antara perlindungan terhadap perempuan dan penghormatan terhadap hak otonomi para pihak dalam menentukan objek sengketa. Hakim memang memiliki kewajiban institusional untuk memberikan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh para pihak, baik melalui layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) maupun langsung di dalam proses persidangan. Namun, setelah informasi tersebut diberikan secara transparan, keputusan akhir untuk menuntut atau tidak menuntut hak tetap

berada sepenuhnya pada kehendak pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, hakim tidak dapat menggantikan kehendak para pihak karena hal tersebut akan menghilangkan esensi dasar bahwa perkara perdata diselesaikan berdasarkan kehendak bebas dan tuntutan murni dari para pencari keadilan.

Selain aspek kehendak para pihak, dinamika persidangan juga sangat bergantung pada pembuktian yuridis mengenai ada atau tidaknya unsur nusyuz yang menjadi variabel penentu dalam pemenuhan hak mut'ah dan nafkah iddah. Sebagaimana dijelaskan oleh Amry Saputra, S.H.:

> *"Juga dari pengakuan atau ikrar itu kan nggak sesuatu yang mengikat ya. Itu tentu kita buktikan dengan saksi juga... Kalau lah suami itu nerima gugatan, kalau dia merasa misalnya dalam gugatan itu menyatakan suaminya begini-begini, sedangkan yang nusyuz istrinya, misalnya, itu kebanyakan suami datang itu. Alasannya cuma satu, untuk membantah isi gugatannya."*

Menanggapi penjelasan tersebut, penulis melihat bahwa pembuktian mengenai ada atau tidaknya *nusyuz* merupakan aspek yang krusial. Hakim tidak dapat hanya berpegang pada pengakuan sepihak dari salah satu pihak, melainkan wajib menilai keseluruhan alat bukti secara konklusif, terutama keterangan saksi yang diajukan di persidangan. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses yudisial sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang objektif, bukan sekadar asumsi atau dalil sepihak.

Hal ini memegang peranan penting karena status *nusyuz* berpengaruh langsung terhadap ada atau tidaknya hak keperdataan yang dapat dilekatkan kepada mantan istri.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, hasil wawancara ini membuktikan bahwa hambatan utama dalam implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bukanlah terletak pada substansi aturan hukumnya, melainkan pada dinamika kondisi subjek hukum yang berperkara. Di satu sisi, masih banyak perempuan yang belum memahami secara utuh hak-hak normatifnya; namun di sisi lain, terdapat pula perempuan yang secara sadar memilih melepaskan hak tersebut demi segera mengakhiri konflik rumah tangga. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembentukan regulasi di tingkat pusat, melainkan memerlukan peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat secara masif melalui penyuluhan hukum yang terstruktur, optimalisasi peran Posbakum, serta pemberian penjelasan yang komprehensif mengenai akibat hukum perceraian di persidangan. Dengan demikian, setiap perempuan dapat mengambil keputusan secara sadar apakah akan menggunakan atau melepaskan hak yang dijamin oleh hukum, sehingga tujuan ideal perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

2. Nasyabandi Akbar (Posbakum)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Nasyabandi Akbar** selaku **Staf Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Tembilahan**, penulis berpendapat bahwa keberadaan Posbakum memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian. Hal ini karena Posbakum merupakan pihak pertama yang berinteraksi dengan masyarakat sebelum perkara didaftarkan ke pengadilan. Oleh sebab itu, kualitas informasi dan pendampingan yang diberikan oleh Posbakum sangat menentukan apakah hak-hak perempuan, termasuk hak mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, akan dimuat dalam gugatan atau tidak.[142]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara substansi Posbakum telah memahami ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, khususnya mengenai kemungkinan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Akan tetapi, dalam praktiknya Posbakum tetap berpegang pada prinsip bahwa gugatan disusun berdasarkan kehendak dan permintaan pencari keadilan. Artinya, apabila penggugat tidak meminta agar hak mut'ah dan nafkah iddah dicantumkan dalam petitum, maka Posbakum tidak dapat memasukkan tuntutan tersebut atas inisiatifnya sendiri. Menurut penulis, sikap tersebut memang sejalan dengan prinsip hukum acara perdata yang menempatkan para pihak sebagai pihak yang menentukan ruang lingkup sengketa (*dominus litis*). Namun, di sisi lain kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa perlindungan

[142] Wawancara dengan Nasyabandi Akbar, Staf Posbakum Pengadilan Agama Tembilahan, bertempat di Pengadilan Agama Tembilahan, 16 Juni 2026.

hukum terhadap perempuan masih sangat bergantung pada tingkat pengetahuan pencari keadilan mengenai hak-haknya sendiri.

Menurut penulis, temuan yang paling menarik dari hasil wawancara ini adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya perempuan yang mengajukan cerai gugat. Nasyabandi Akbar menjelaskan bahwa sebagian besar perempuan datang ke Posbakum dengan satu tujuan utama, yaitu memperoleh putusan cerai secepat mungkin. Mereka lebih banyak menceritakan alasan perceraian daripada menanyakan akibat hukum setelah perceraian ataupun hak-hak yang dapat mereka peroleh. Bahkan masih ditemukan perempuan yang menganggap tidak diberi nafkah oleh suami atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagai sesuatu yang wajar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar kurangnya aturan hukum, tetapi lebih kepada rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai hak-hak dalam perkawinan dan perceraian.

Penulis juga menilai bahwa edukasi yang diberikan oleh Posbakum masih bersifat pasif. Meskipun petugas Posbakum telah memberikan penjelasan apabila diperlukan, bentuk edukasi yang tersedia masih didominasi oleh media informasi tertulis, seperti papan pengumuman atau brosur di lingkungan pengadilan. Belum terdapat mekanisme penyuluhan hukum secara langsung atau konsultasi yang secara khusus membahas hak-hak perempuan pasca perceraian sebelum gugatan disusun. Padahal, tidak semua pencari keadilan memiliki kemampuan memahami informasi hukum hanya melalui media tertulis. Dalam kondisi demikian, penyampaian informasi secara langsung

dapat menjadi sarana yang lebih efektif untuk memastikan bahwa setiap perempuan benar-benar memahami hak yang dimilikinya sebelum memutuskan isi gugatannya.

Di sisi lain, penulis mengapresiasi adanya mekanisme evaluasi rutin yang dilakukan di Posbakum terhadap kualitas gugatan yang disusun. Evaluasi tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, evaluasi tersebut masih lebih berorientasi pada aspek teknis penyusunan gugatan, seperti ketepatan posita dan petitum, serta kesesuaian dasar hukum yang digunakan. Menurut penulis, evaluasi tersebut seharusnya juga mulai diarahkan pada peningkatan kualitas perlindungan hukum bagi kelompok rentan, khususnya perempuan, misalnya dengan mengevaluasi sejauh mana hak-hak perempuan telah diinformasikan kepada pencari keadilan atau seberapa banyak gugatan yang telah memuat tuntutan mut'ah dan nafkah iddah setelah memperoleh pendampingan dari Posbakum.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa kendala utama implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak hanya terletak pada proses persidangan atau pertimbangan hakim, tetapi sudah dimulai sejak tahap penyusunan gugatan di Posbakum. Ketika hak mut'ah dan nafkah iddah tidak dimasukkan ke dalam gugatan, maka ruang bagi hakim untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian tidak dapat hanya dibebankan kepada hakim, tetapi juga

memerlukan peran aktif Posbakum sebagai garda terdepan pelayanan hukum di pengadilan.

Menurut analisis penulis, upaya yang perlu dilakukan ke depan adalah memperkuat fungsi edukatif Posbakum, bukan hanya sebagai penyusun gugatan, tetapi juga sebagai pusat konsultasi hukum yang memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian. Penyusunan daftar periksa (*checklist*) hak-hak perempuan yang wajib dijelaskan kepada setiap penggugat, penyelenggaraan penyuluhan hukum secara berkala, serta peningkatan koordinasi antara Posbakum, hakim, dan pihak pengadilan merupakan langkah yang dapat mendukung implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 secara lebih efektif. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan Agama.

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Hak Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat Berdasarkan Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Tembilahan

Analisis yuridis menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Tembilahan cenderung masih tunduk pada formalisme hukum acara yang termaktub dalam Pasal 189 ayat (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Berdasarkan fakta empiris dari hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar selaku Hakim di Pengadilan Agama Tembilahan, terungkap bahwa keengganan

hakim dalam memutus hak-hak ekonomi perempuan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam petitum bukanlah didasari oleh ketidakinginan untuk membela kaum perempuan. Sebaliknya, sikap tersebut lahir dari kekhawatiran yang mendalam terhadap batasan wewenang formal terkait larangan memutus melebihi tuntutan (*ultra petita*) serta ketakutan akan menghasilkan putusan yang mandul dan tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) di kemudian hari.[143]

Meskipun demikian, pandangan yang berbeda disoroti dalam hasil wawancara dengan Hakim Aab Abdul Wahab, yang menyoroti langkah progresif yang telah diambil oleh Pengadilan Agama Surabaya. Hakim AAB Abdul Wahab mencatat bahwa Pengadilan Agama Surabaya mampu secara aktif membebankan kewajiban hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* secara *ex officio* kepada suami meskipun istri tidak menuntutnya dalam gugatan. Perbedaan praktik ini menegaskan bahwa keberhasilan di Surabaya bukanlah disebabkan oleh hukum acara *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang melegalkan *ultra petita*, melainkan ditopang oleh adanya faktor eksekusi struktural. Keberhasilan tersebut diwujudkan melalui adanya kerja sama yang solid dengan Pemerintah Daerah setempat terkait jaminan eksekusi putusan, sehingga intervensi struktural ini memberikan rasa aman bagi para hakim di Surabaya untuk menggunakan penalaran hukum progresif guna mengesampingkan kekakuan Pasal 178 ayat (3) HIR.[144]

---

[143] Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 412–415

[144] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 180–183

Pengadilan Agama Tembilahan saat ini belum memiliki jaring pengaman berupa kerja sama eksekusi yang optimal dengan instansi terkait di Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi ini menyebabkan para hakim cenderung memilih "bermain aman" dan berlindung di balik teks formal Pasal 189 ayat (3) RBg. Situasi tersebut semakin diperparah oleh faktor sosiologis masyarakat setempat, di mana tingkat literasi hukum para istri yang mengajukan perkara secara mandiri masih tergolong rendah, sehingga pendampingan dan terobosan yuridis melalui instrumen *ex officio* menjadi terhambat oleh keterbatasan ekosistem peradilan di daerah.[145]

1. Perlindungan hukum bersifat preventif dan Perlindungan hukum represif

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum suatu keputusan atau tindakan hukum dilakukan, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui penyelesaian sengketa dan pemberian pemulihan terhadap hak yang dirugikan.

Apabila teori tersebut dikaitkan dengan praktik pemberian hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tembilahan, terlihat bahwa implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada dasarnya merupakan upaya Mahkamah Agung untuk memperkuat

[145] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 145–148

perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Kehadiran SEMA ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang hukum yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada bentuk perceraian (cerai talak atau cerai gugat) menjadi lebih berorientasi pada substansi penyebab perceraian dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* bukan semata-mata memenuhi kewajiban materiil bekas suami, melainkan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan setelah berakhirnya perkawinan. Al-Qur'an melalui Surah Al-Baqarah ayat 241 menegaskan bahwa perempuan yang diceraikan berhak memperoleh mut'ah secara patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Surah At-Talaq ayat 6 memerintahkan agar perempuan yang berada dalam masa iddah tetap diberikan nafkah sesuai kemampuan suami. Kedua ayat tersebut memperlihatkan bahwa Islam sejak awal telah menempatkan perlindungan terhadap perempuan sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*).

a. Perlindungan Hukum Preventif

Menurut teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan perlindungan sebelum terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan preventif tercermin dari lahirnya PERMA Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang memberikan pedoman kepada hakim agar tidak lagi memandang hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* hanya dapat diberikan dalam perkara cerai talak.

Sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, masih terdapat anggapan bahwa istri yang mengajukan cerai gugat dianggap melepaskan hak *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Pandangan tersebut menyebabkan banyak perempuan kehilangan perlindungan hukum hanya karena merekalah yang mengajukan perceraian, padahal penyebab keretakan rumah tangga justru berasal dari kelalaian atau kesalahan suami. Oleh karena itu, penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif karena memberikan pedoman kepada hakim agar sejak awal mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur *nusyuz*, bukan hanya melihat siapa yang mengajukan gugatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif para hakim Pengadilan Agama Tembilahan telah menjadikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pedoman dalam memeriksa perkara cerai gugat. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan para hakim yang pada dasarnya memahami bahwa perempuan yang tidak terbukti *nusyuz* tetap dapat memperoleh *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Artinya, secara kelembagaan telah terdapat upaya untuk mencegah terjadinya

pengabaian hak-hak perempuan sejak proses pemeriksaan perkara berlangsung.

Namun demikian, menurut penulis, perlindungan preventif tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya beberapa kendala yang menyebabkan hak tersebut tidak selalu diberikan kepada perempuan yang sebenarnya memenuhi syarat. Kendala pertama adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak pasca perceraian. Banyak perempuan datang ke pengadilan hanya dengan tujuan memperoleh putusan cerai tanpa mengetahui bahwa mereka juga memiliki hak ekonomi yang dijamin oleh hukum. Akibatnya, tuntutan mengenai *mut'ah* dan nafkah *iddah* sering kali tidak dicantumkan dalam gugatan sehingga ruang bagi hakim menjadi terbatas.

Selain itu, peran Posbakum sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum juga belum optimal. Walaupun Posbakum telah memberikan pendampingan kepada para pencari keadilan, edukasi mengenai hak-hak perempuan masih bersifat pasif dan bergantung pada pertanyaan dari pihak yang datang berkonsultasi. Menurut penulis, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan, yaitu rendahnya literasi hukum masyarakat. Padahal apabila sejak awal perempuan telah memahami hak-haknya, maka peluang untuk

memperoleh perlindungan melalui putusan pengadilan akan semakin besar.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut sebenarnya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*'adl*). Islam tidak hanya mengatur mengenai adanya hak, tetapi juga menghendaki agar hak tersebut benar-benar diketahui dan dapat dinikmati oleh pemiliknya. Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan nilai amar *ma'ruf*, yaitu mengarahkan masyarakat kepada sesuatu yang membawa kemaslahatan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran terhadap hak seseorang. Dalam perkara cerai gugat, bentuk perlindungan represif diwujudkan melalui putusan hakim yang memberikan pemulihan terhadap hak ekonomi perempuan setelah perkawinan berakhir.

Menurut penulis, apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum represif, putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan pemulihan terhadap hak perempuan yang telah dirugikan selama perkawinan. Hakim memang telah memberikan kepastian hukum berupa putusnya perkawinan, tetapi belum memberikan perlindungan terhadap akibat ekonomi yang harus ditanggung oleh bekas istri setelah perceraian. Dengan kata lain, perlindungan hukum

yang diberikan masih bersifat formal karena hanya menyelesaikan status hukum perkawinan tanpa menyelesaikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat perceraian.

Hasil wawancara dengan para hakim menunjukkan bahwa perlindungan represif juga masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah pelaksanaan putusan setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak sedikit mantan suami yang tidak bersedia melaksanakan kewajibannya membayar mut'ah maupun nafkah iddah, terutama dalam perkara yang diputus secara verstek. Akibatnya, putusan pengadilan hanya memberikan kepastian hukum di atas kertas tanpa benar-benar menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan oleh perempuan.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif belum dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaan putusan masih bergantung pada kesukarelaan pihak yang kalah. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral dan keagamaan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, ketidakpatuhan mantan suami terhadap isi putusan sejatinya bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip tanggung jawab (*mas'uliyyah*) dalam syariat Islam.

Secara keseluruhan, berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan telah menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam memberikan perlindungan terhadap hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* bagi perempuan yang mengajukan cerai gugat. Perlindungan hukum preventif telah diwujudkan melalui pembentukan kebijakan yang memberikan pedoman kepada hakim agar lebih mengutamakan keadilan substantif daripada sekadar melihat bentuk perceraian. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui putusan hakim yang memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada bekas istri yang tidak terbukti nusyuz.

Akan tetapi, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat perbedaan implementasi antar putusan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, belum optimalnya edukasi dari Posbakum, keterbatasan hakim yang terikat pada asas *ultra petita*, serta lemahnya pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap. Menurut penulis, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak cukup hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga memerlukan sinergi antara hakim, Posbakum, para pencari keadilan, dan aparat penegak hukum agar hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* benar-benar dapat memberikan manfaat bagi perempuan sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum, termasuk dalam hukum perdata. Dalam konsep hukum perdata, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan secara tekstual, tetapi juga sebagai upaya memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak yang memiliki hubungan hukum. Dengan demikian, suatu putusan tidak dapat dikatakan adil apabila hanya memberikan kepastian hukum, tetapi mengabaikan hak salah satu pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan.

Dalam perkara perceraian, hubungan hukum antara suami dan istri memang berakhir sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, berakhirnya hubungan perkawinan tidak serta-merta menghapus seluruh akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Salah satu akibat hukum yang tetap melekat adalah kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak ekonomi bekas istri berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah* apabila syarat-syarat hukumnya terpenuhi. Oleh karena itu, keadilan dalam perkara perceraian tidak hanya diukur dari dikabulkannya gugatan cerai, tetapi juga dari sejauh mana putusan mampu mengembalikan keseimbangan hak para pihak setelah perkawinan berakhir.

Dalam perspektif hukum Islam, *mut'ah* dan nafkah *iddah* merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan setelah perceraian. Islam memandang bahwa perempuan yang telah menjalankan kewajibannya

sebagai istri tidak boleh dibiarkan menanggung seluruh akibat perceraian seorang diri, terlebih apabila perceraian terjadi karena kesalahan suami. Nilai tersebut sejalan dengan konsep keadilan dalam hukum perdata yang menempatkan setiap orang pada posisi yang sama di hadapan hukum serta memberikan hak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk perkembangan hukum keluarga di Indonesia yang berusaha mewujudkan keadilan substantif. Sebelum SEMA tersebut diterbitkan, pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam praktik peradilan agama cenderung hanya diberikan pada perkara cerai talak. Akibatnya, perempuan yang mengajukan cerai gugat sering kali kehilangan hak ekonominya meskipun penyebab perceraian berasal dari kesalahan suami. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ukuran keadilan pada saat itu masih berorientasi pada aspek formal, yaitu siapa yang mengajukan perceraian, bukan pada fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga.

Menurut penulis, kehadiran SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah menggeser orientasi tersebut. Hakim tidak lagi hanya melihat status istri sebagai penggugat, tetapi juga mempertimbangkan penyebab perceraian, ada atau tidaknya *nusyuz*, kemampuan ekonomi suami, serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan seperti ini jauh lebih sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum perdata karena hukum tidak hanya diterapkan berdasarkan bunyi norma, tetapi juga berdasarkan hubungan hukum yang nyata di antara para pihak.

Menurut analisis penulis, implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan telah mengarah pada terwujudnya keadilan dalam konsep hukum perdata, namun penerapannya masih belum konsisten. Hal tersebut terlihat dari adanya perbedaan pertimbangan hukum antar putusan meskipun kondisi faktual para pihak relatif memiliki kesamaan, yaitu istri tidak terbukti nusyuz dan perceraian lebih banyak disebabkan oleh kesalahan suami.

Penulis berpendapat bahwa ukuran keadilan dalam perkara cerai gugat seharusnya tidak lagi didasarkan pada siapa yang mengajukan perceraian, melainkan pada siapa yang menyebabkan rusaknya hubungan perkawinan dan siapa yang lebih layak memperoleh perlindungan hukum. Apabila seorang istri terpaksa mengajukan cerai karena bertahun-tahun tidak memperoleh nafkah, mengalami kekerasan, atau menjadi korban perselingkuhan, maka tindakan mengajukan gugatan bukanlah alasan untuk menghilangkan hak ekonominya.

Dengan demikian, keadilan dalam hukum perdata harus dimaknai sebagai upaya mengembalikan keseimbangan hak para pihak setelah hubungan hukum berakhir. Pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* bukan merupakan bentuk keberpihakan kepada perempuan, melainkan konsekuensi hukum atas tanggung jawab suami yang telah lahir sejak perkawinan berlangsung. Sebaliknya, apabila hak tersebut tidak diberikan kepada perempuan yang memenuhi syarat, maka tujuan keadilan belum

sepenuhnya tercapai karena pihak yang dirugikan tetap harus menanggung beban akibat perceraian seorang diri.

Oleh karena itu, menurut penulis, implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 harus dipahami bukan hanya sebagai pedoman administratif bagi hakim, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak dan keseimbangan hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan cara tersebut, putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai putusnya perkawinan, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan yang benar-benar dirasakan oleh para pencari keadilan, khususnya perempuan yang menjadi korban dalam konflik rumah tangga.

3. Teori Kepastian Hukum

Apabila ditinjau dari teori kepastian hukum dalam konsep hukum perdata, keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada dasarnya telah memberikan kepastian mengenai dasar hukum yang dapat digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat. Sebelum adanya SEMA tersebut, masih terjadi perbedaan penafsiran di lingkungan peradilan agama mengenai apakah perempuan yang mengajukan cerai gugat berhak memperoleh *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Perbedaan penafsiran tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan yang dijatuhkan sangat bergantung pada pandangan masing-masing hakim. Dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung telah memberikan

pedoman yang lebih jelas sehingga terdapat arah yang sama dalam penerapan hukum oleh seluruh hakim di lingkungan peradilan agama.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada putusan yang menjadi objek penelitian. Dalam Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Tbh, majelis hakim hanya mengabulkan gugatan perceraian tanpa memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*, meskipun fakta persidangan menunjukkan bahwa penyebab perceraian berasal dari kesalahan suami dan tidak terdapat bukti bahwa istri melakukan *nusyuz*. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PA.Tbh, majelis hakim memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* setelah mempertimbangkan bahwa istri tidak terbukti *nusyuz* serta perceraian terjadi akibat kelalaian dan kesalahan suami. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum secara otomatis menghasilkan penerapan hukum yang seragam.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam hukum perdata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan suatu aturan, tetapi juga ditentukan oleh konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan tersebut. Suatu norma dapat dikatakan memberikan kepastian hukum apabila norma tersebut diterapkan secara konsisten terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Apabila terhadap perkara yang relatif serupa masih menghasilkan putusan

yang berbeda, maka kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kepastian hukum dalam perkara cerai gugat dipengaruhi oleh ketentuan hukum acara perdata, khususnya asas *ultra petita*. Para hakim Pengadilan Agama Tembilahan menjelaskan bahwa meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2018 membuka ruang pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, hakim tetap terikat pada tuntutan yang diajukan para pihak. Ketika penggugat tidak mencantumkan tuntutan mengenai *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam petitumnya, hakim tidak dapat dengan mudah memberikan hak tersebut karena berpotensi melampaui objek sengketa yang diajukan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam perkara perdata tidak hanya bergantung pada aturan materiil, tetapi juga dipengaruhi oleh aturan hukum acara yang membatasi kewenangan hakim.

Menurut analisis penulis, keadaan tersebut memperlihatkan bahwa konsep kepastian hukum harus dipahami secara utuh. Kepastian hukum bukan sekadar adanya peraturan yang mengatur suatu hak, melainkan juga adanya mekanisme yang memungkinkan hak tersebut benar-benar dapat diterapkan dalam praktik. Apabila perempuan secara hukum memiliki hak atas *mut'ah* dan nafkah *iddah*, tetapi hak tersebut tidak dapat diberikan karena tidak dicantumkan dalam gugatan atau karena adanya hambatan pembuktian, maka kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan menjadi kurang efektif.

Di sisi lain, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak pasca perceraian menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya kepastian hukum. Banyak perempuan yang datang ke pengadilan hanya berfokus pada putusnya perkawinan tanpa mengetahui bahwa mereka juga memiliki hak ekonomi yang dapat diminta melalui gugatan. Akibatnya, hak yang sebenarnya telah dijamin oleh hukum tidak dapat diberikan karena tidak pernah dimohonkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pembentuk peraturan dan hakim, tetapi juga memerlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai subjek hukum.

Dari perspektif hukum Islam, kepastian hukum tersebut juga sejalan dengan prinsip bahwa hak-hak yang telah ditetapkan syariat harus dilaksanakan secara konsisten. *Mut'ah* dan nafkah *iddah* bukan hanya merupakan kewajiban yang lahir dari hukum positif, tetapi juga merupakan kewajiban syar'i yang bertujuan menjaga kemaslahatan perempuan setelah perceraian. Oleh karena itu, ketika hukum positif melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah mengakomodasi prinsip tersebut, maka penerapannya seharusnya dilakukan secara konsisten agar tujuan hukum Islam dan tujuan hukum nasional dapat berjalan secara selaras.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama

Tembilahan telah memberikan dasar kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan sebelum diterbitkannya kebijakan tersebut. Akan tetapi, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih dipengaruhi oleh perbedaan penerapan hakim, keterikatan pada hukum acara perdata, rendahnya kesadaran hukum para pencari keadilan, serta kendala dalam pelaksanaan putusan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kepastian hukum yang sesungguhnya, diperlukan konsistensi penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, optimalisasi peran Pos Bantuan Hukum dalam penyusunan gugatan, serta penguatan mekanisme pelaksanaan putusan agar hak *mut'ah* dan nafkah *iddah* tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga benar-benar dapat diterima oleh perempuan yang berhak memperolehnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data empiris, serta pembedahan yuridis mengenai implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan, dapat ditarik kesimpulan dalam 3 (tiga) poin utama yang menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan pada kenyataannya belum berjalan secara optimal dan masih sangat terikat pada pendekatan hukum yang bersifat formalis-positivistik. Dalam praktik peradilannya, Majelis Hakim cenderung bersikap pasif (*iudex ne procedat ex officio*) serta enggan menggunakan kewenangan hak *ex officio*-nya untuk menetapkan pemenuhan hak mut'ah dan nafkah iddah bagi istri secara otomatis apabila tuntutan tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit dalam formulasi petitum gugatan. Kesimpulan ini dibuktikan secara empiris melalui analisis komparatif terhadap tiga variasi pola putusan di Pengadilan Agama Tembilahan. Pada perkara cerai gugat murni tanpa tuntutan hak sebagaimana tertuang dalam **Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Tbh**, Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan perceraian dan sama sekali tidak membebankan kewajiban mut'ah maupun nafkah iddah secara *ex officio*, yang didasari oleh

sikap kehati-hatian hakim dalam menjaga batas kewenangan formal agar tidak melanggar asas *ultra petita*. Sementara itu, pada perkara cerai gugat dengan tuntutan hak anak saja sebagaimana terlihat dalam **Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Tbh**, Majelis Hakim hanya mengabulkan tuntutan hak asuh dan biaya pemeliharaan anak sesuai petitum, namun tetap mengabaikan pemenuhan hak mut'ah dan nafkah iddah untuk diri Penggugat (istri) sendiri karena tidak dimohonkan. Sebaliknya, pada perkara cerai gugat dengan tuntutan hak utuh sebagaimana tercermin dalam **Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PA.Tbh**, hak mut'ah dan nafkah iddah berhasil dikabulkan oleh Majelis Hakim karena Penggugat didampingi oleh Penasihat Hukum yang memformulasikan seluruh hak-hak finansial tersebut secara tegas, rinci, dan lengkap di dalam petitum gugatannya. Dengan demikian, keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan belum diposisikan sebagai norma imperatif yang secara otomatis memicu pelaksanaan hak *ex officio* hakim, melainkan keberhasilannya sangat bergantung pada inisiatif, kesadaran hukum, dan kecermatan penyusunan petitum gugatan sejak awal pengajuan perkara.

2. Dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan menghadapi berbagai kendala kompleks yang bersumber dari aspek dogmatika hukum, kondisi sosiologis masyarakat, hingga tata cara berperkara. Kendala utama

terletak pada rigiditas dan formalisme hukum acara perdata, yakni adanya benturan dogmatis antara semangat progresif SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan asas hukum acara perdata klasik, khususnya asas hakim pasif (*iudex ne procedat ex officio*) serta larangan keras memutus melampaui tuntutan (*ultra petita*) sebagaimana diatur secara tegas dalam **Pasal 178 ayat (3) HIR / Pasal 189 ayat (3) RBg**. Selain itu, terdapat hambatan berupa rendahnya literasi dan kesadaran hukum perempuan Penggugat, di mana mayoritas istri yang mengajukan cerai gugat secara mandiri (terutama melalui Pos Bantuan Hukum / Posbakum) berfokus secara pragmatis hanya untuk segera mengakhiri ikatan perkawinan akibat konflik rumah tangga, tanpa memahami apalagi menuntut hak-hak finansial pasca-perceraian yang menjadi haknya. Kendala ini diperparah oleh hambatan eksekusi dan karakteristik putusan *verstek*, mengingat mayoritas perkara cerai gugat diputus tanpa hadirnya Tergugat (suami). Dalam kondisi *verstek*, hakim mengkhawatirkan bahwa apabila hak mut'ah dan nafkah iddah dibebankan secara *ex officio* tanpa kehadiran suami untuk diuji kemampuan finansialnya, putusan tersebut berpotensi besar menjadi *non-executable* atau mandul dan tidak dapat dieksekusi secara riil di lapangan. Guna mengatasi kendala-kendala tersebut, upaya penyelesaian dilakukan melalui tiga langkah strategis: *pertama*, menerapkan progresivitas hakim dengan memperkuat paradigma *dominus litis*, di mana hakim Peradilan

Agama secara aktif menggunakan hak *ex officio* dan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berorientasi pada keadilan materiil untuk memitigasi ketidakadilan prosedur; *kedua*, mengoptimalisasikan peran Posbakum melalui peningkatan kualitas pendampingan hukum dan edukasi guna mengarahkan Penggugat memasukkan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah ke dalam draf petitum sejak awal pendaftaran; serta *ketiga*, menggiatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas dan memperkuat pengawasan struktural dari Mahkamah Agung serta Pengadilan Tinggi Agama demi mewujudkan keseragaman pemahaman dan pola putusan di seluruh lingkungan Peradilan Agama.

3. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan penjaminan hak mut'ah dan nafkah iddah bagi istri dalam perkara cerai gugat sebagaimana diamanatkan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat relevan, progresif, dan berkeadilan. Secara fundamental, kebijakan ini merupakan pengejawantahan langsung dari upaya perlindungan agama dan hukum terhadap prinsip-prinsip utama *Maqashid Syariah*, yakni *hifz al-mal* (perlindungan harta dan ketahanan ekonomi), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa dan keberlangsungan hidup), serta *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Penjaminan hak-hak finansial ini memiliki fungsi krusial untuk mencegah terjadinya pemiskinan instan (*instant impoverishment*) serta menekan fenomena feminisasi kemiskinan

yang kerap menimpa perempuan pasca-perceraian. Kebijakan tersebut juga berlandaskan pada asas kemaslahatan (*Al-Maslahah Al-Mursalah*) dan keadilan substantif, di mana penjatuhan kewajiban pembayaran mut'ah dan nafkah iddah berfungsi sebagai bentuk kompensasi, penghibur atas penderitaan batin, serta wujud penghargaan atas pengabdian panjang istri selama mengarungi masa pernikahan. Landasan filosofis ini selaras dengan teori keadilan distributif dari Aristoteles serta *difference principle* yang dikemukakan oleh John Rawls, di mana hukum dan institusi peradilan memiliki kewajiban moral dan legal untuk memberikan perlindungan khusus serta koreksi atas ketimpangan bagi pihak yang berada dalam posisi paling rentan atau tidak beruntung (*least advantaged*). Selanjutnya, dalam tradisi fikih peradilan Islam (*qadha*), hakim diposisikan sebagai penegak keadilan yang bersifat *dominus litis*, yang memiliki kewenangan penuh sekaligus kewajiban hukum untuk mengambil tindakan aktif guna menghilangkan segala bentuk kemudaratan (*al-dharar yuzal*). Dengan demikian, pembebanan hak mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, sepanjang istri tidak terbukti melakukan *nusyuz*, merupakan wujud nyata dari penegakan kemaslahatan syariat Islam yang melampaui kekakuan formalitas teks undang-undang positivistik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia**, diharapkan dapat terus memperkuat pedoman mengenai pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat berjalan lebih seragam dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. **Kepada Pengadilan Agama Tembilahan**, diharapkan agar tetap mengedepankan penerapan keadilan substantif dalam memeriksa perkara cerai gugat dengan mempertimbangkan penyebab perceraian, ada atau tidaknya *nusyuz*, kemampuan ekonomi suami, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
3. **Kepada Pos Bantuan Hukum (Posbakum)**, perlu meningkatkan fungsi edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya perempuan yang mengajukan cerai gugat, agar memahami hak-hak yang dapat dituntut setelah perceraian, termasuk hak mut'ah dan nafkah iddah. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui konsultasi yang lebih aktif, penyuluhan hukum, maupun penyediaan media informasi yang mudah dipahami.

4. **Kepada masyarakat**, khususnya pasangan yang sedang menghadapi perkara perceraian, diharapkan lebih memahami hak dan kewajiban yang timbul setelah putusnya perkawinan sehingga setiap pihak dapat memperoleh perlindungan hukum secara maksimal sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Kepada peneliti selanjutnya**, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada beberapa pengadilan agama di wilayah lain atau mengkaji efektivitas pelaksanaan putusan mengenai mut'ah dan nafkah iddah setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Manan. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana. Jakarta.

Abdul Rahman Ghazaly. 2018. *Fiqh Munakahat*. Kencana. Jakarta.

Abdurrahman al-Jaziri. 1990. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz 4*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Beirut.

Adriaan W. Bedner, dkk. (Eds.). 2012. *Kajian Sosio-Legal.* Pustaka Larasan. Denpasar.

Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.

Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Ahmad Warson Munawwir. 2002. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif. Surabaya.

Ali Yusuf As-Subki. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Amzah. Jakarta.

Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikh, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Kencana. Jakarta.

Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.

Budi Setiyono. 2017. *Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Publik*. Lembaga Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Jakarta.

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. 2018. *Kamus Istilah Hukum*. PT Balai Pustaka. Jakarta.

Cst Kansil dkk. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang.

Farkhani dkk. 2018. *Filsafat Hukum: Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*. Kafilah Publishing. Solo.

Fitri Wahyuni, dkk. 2021. *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

H. A. Fuad Said. 1994. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Pustaka Al Husna. Jakarta.

Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law and State* (diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien). Nusa Media. Bandung.

Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta.

M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern.* Graha Ilmu. Yogyakarta.

Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika. Jakarta.

Mohammad Daud Ali. 2011. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.

Muhammad Abu Zahra. 2009. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Dar al-Fikr. Beirut.

Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazi. *Fathul Qarib*. Daar al-'Ilm. Surabaya.

DR. Muhammad Syaefuddin dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. Jakarta.

Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H. dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi). UI Press. Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.

Rasuanto, Bur. 2005. *Keadilan Sosial: Pandangan John Rawls*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Salim HS. dan Erlin Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Satria Effendi. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana. Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. 2013. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (terj. Ahmad Tirmidzi dkk). Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.

Sofyan Hasan. 2018. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Setara Press. Malang.

Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.

Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Press. Yogyakarta.

Sudikno Mertukusumo. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.

Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini. *Mughni al-Muhtaj, Juz 5*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Beirut.

Titin Triana, Suhar, Ishaq. 2024. *Urgensi Pemberian Mut'ah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. CV. Aduna Abimata. Indramayu.

Yayan Sopyan. 2011. *Islam-Negara "Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional"*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Zainul Bahri. 1993. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*. Angkasa. Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

C. Jurnal-Jurnal

Ahmad Zaenal Fanani. "Keadilan Gender dalam Putusan Hakim Peradilan Agama Terhadap Hak Perempuan Pasca Perceraian". *Jurnal Konstitusi*, Volume

16, Nomor 3, 2019.

Ahmad Zaenal Fanani. "Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum". *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2017.

Ali Imron. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga". *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Volume 1, Nomor 1, 2016.

Friska Amelia, Sidik Sidik, Hilal Malarangan. "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial". *Comparativa*, Volume 4, Nomor 2, 2023.

Heniyatun dkk. "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat". *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Volume 21, Nomor 1, 2020.

Irwan Adi Cahyadi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia". *Brawijaya Law Student Journal*, Volume 1, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Lathifah Munawaroh, Suryani. "Menelisik Hak-Hak Perempuan". *KAFA'AH JOURNAL*, Volume 10, Nomor 1, Januari-Juni 2020.

Lubis, T. M., & Santosa, M. A. "The Role of Judicial Circular Letters in Indonesian Legal System". *Indonesia Law Review*, Volume 4, Nomor 2, 2012.

Maulana Ridho Al Fasil. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum". *Jurnal Usrah*, Volume 4, Nomor 2, 2023.

Muhammad In'am. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Regulasi Hukum Keluarga di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 8, Nomor 2, 2019.

Nasution, M. "Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai Instrumen Penyeragaman Hukum dalam Perkara Perdata". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 3, 2018.

Pan Mohamad Faiz. "Teori Keadilan John Rawls". *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April, 2009.

Raihan Andhika Santoso, et.al. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia". *Deposisi*, Volume 1, Nomor 4, 2023.

Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri. “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Volume 15, Nomor 1, 2021.

Siti Nur Hakimah. “Kondiloma Akuminata Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam”. *Rechten Student Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2021.

Standarda Al-Farisi. “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2018”. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume 9, Nomor 1, 2021.

Suryanandana, D., Bakri, & Putra, BSA. “Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Volume 4, Nomor 2, 2024.

Wilda Shofa. “Eksistensi Asas Perceraian Dipersulit dan Implementasinya di Pengadilan Agama”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 9, Nomor 2, 2020.

Najichah, Alfian Qodri Azizi. “Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Isteri”. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Volume 5, Nomor 1, 2020.

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). https://kbbi.web.id/perlindungan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). https://kbbi.web.id/keadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan Pengadilan Agama Tembilahan. https://pa-tembilahan.go.id.

Mahabbub Ma'afi Ramdlan. "Hukum Memberikan Mut'ah Setelah Perceraian". NU Online, diakses pada 28 Juni 2026, https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-memberikan-mut-ah-setelah-perceraian-IF6Bf.

E. Hasil Wawancara Pra-Penelitian

Zulfikar. Hasil Wawancara Pra-Penelitian dengan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan. Tembilahan, Jum'at 19 Februari 2026.

Ahmad Khatib, S.H.I., M.H. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan.

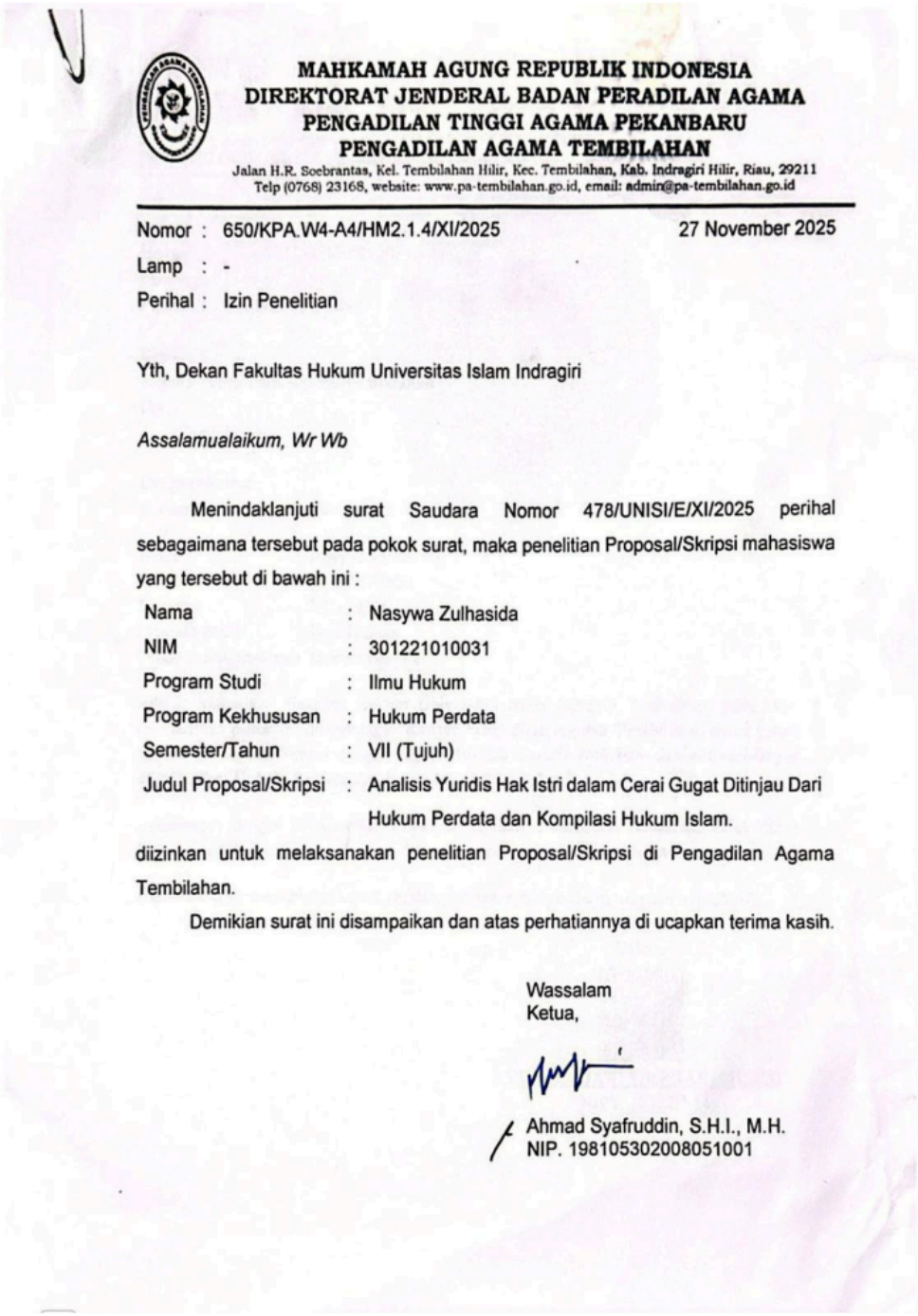
Nasihin, S.Sy. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan.

Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan.

Amry Saputra, S.H. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan.

Nasyabandi Akbar. Hasil Wawancara dengan Staf Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Tembilahan.

LAMPIRAN



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN
Jalan H.R. Soebrantas, Kel. Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Riau, 29211
Telp (0768) 23168, website: www.pa-tembilahan.go.id, email: admin@pa-tembilahan.go.id

Nomor : 650/KPA.W4-A4/HM2.1.4/XI/2025 27 November 2025
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Assalamualaikum, Wr Wb

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 478/UNISI/E/XI/2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka penelitian Proposal/Skripsi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Nasywa Zulhasida
NIM	:	301221010031
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Perdata
Semester/Tahun	:	VII (Tujuh)
Judul Proposal/Skripsi	:	Analisis Yuridis Hak Istri dalam Cerai Gugat Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

diizinkan untuk melaksanakan penelitian Proposal/Skripsi di Pengadilan Agama Tembilahan.

Demikian surat ini disampaikan dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua,

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.
NIP. 198105302008051001

Gambar 1. Surat Penelitian di Pengadilan Agama Tembilahan



REKAPITULASI PERKARA CERAI GUGAT (CG) & CERAI TALAK (CT)

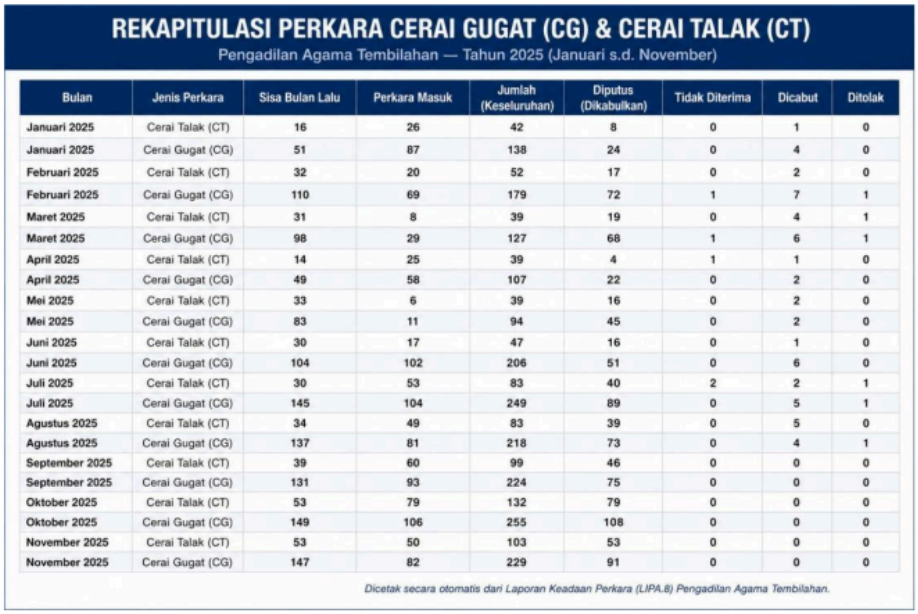
Pengadilan Agama Tembilahan — Tahun 2023

Bulan	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Jumlah	Diputus / Dikabulkan	Tidak Diterima	Dicabut	Ditolak
Januari 2023	Cerai Talak (CT)	8	43	51	39	0	1	0
	Cerai Gugat (CG)	34	114	148	69	0	4	1
Februari 2023	Cerai Talak (CT)	15	17	32	14	0	1	0
	Cerai Gugat (CG)	62	80	142	61	1	4	0
Maret 2023	Cerai Talak (CT)	17	12	29	13	1	0	1
	Cerai Gugat (CG)	76	55	131	66	2	6	0
April 2023	Cerai Talak (CT)	14	7	21	4	0	0	0
	Cerai Gugat (CG)	57	14	71	26	0	1	1
Mei 2023	Cerai Talak (CT)	17	16	33	12	1	3	0
	Cerai Gugat (CG)	42	94	136	58	1	6	0
Juni 2023	Cerai Talak (CT)	16	15	31	15	0	2	1
	Cerai Gugat (CG)	71	61	132	56	0	4	1
Juli 2023	Cerai Talak (CT)	11	17	28	12	0	1	0
	Cerai Gugat (CG)	71	56	127	61	1	5	0
Agustus 2023	Cerai Talak (CT)	14	14	28	8	0	5	0
	Cerai Gugat (CG)	60	51	111	41	0	7	0
September 2023	Cerai Talak (CT)	14	15	29	8	1	2	0
	Cerai Gugat (CG)	63	54	117	48	1	7	1
Oktober 2023	Cerai Talak (CT)	–	–	–	–	–	–	–
	Cerai Gugat (CG)	–	–	–	–	–	–	–
November 2023	Cerai Talak (CT)	13	14	27	8	0	5	0
	Cerai Gugat (CG)	78	83	161	94	0	11	1
Desember 2023	Cerai Talak (CT)	60	19	79	21	0	4	0
	Cerai Gugat (CG)	69	37	106	57	0	12	1
TOTAL		1.097	1.033	2.130	1.038	10	87	8

Dicetak secara otomatis dari Laporan Keadaan Perkara (LIPA.8) Pengadilan Agama Tembilahan.

29

Gambar 2. Laporan Peraka Cerai Gugat dan Cerai Talak Periode 2026, yang diputus Pada Pengadilan Agama Tembilahan



REKAPITULASI PERKARA CERAI GUGAT (CG) & CERAI TALAK (CT)

Pengadilan Agama Tembilahan — Tahun 2025 (Januari s.d. November)

Bulan	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Jumlah (Keseluruhan)	Diputus (Dikabulkan)	Tidak Diterima	Dicabut	Ditolak
Januari 2025	Cerai Talak (CT)	16	26	42	8	0	1	0
Januari 2025	Cerai Gugat (CG)	51	87	138	24	0	4	0
Februari 2025	Cerai Talak (CT)	32	20	52	17	0	2	0
Februari 2025	Cerai Gugat (CG)	110	69	179	72	1	7	1
Maret 2025	Cerai Talak (CT)	31	8	39	19	0	4	1
Maret 2025	Cerai Gugat (CG)	98	29	127	68	1	6	1
April 2025	Cerai Talak (CT)	14	25	39	4	1	1	0
April 2025	Cerai Gugat (CG)	49	58	107	22	0	2	0
Mei 2025	Cerai Talak (CT)	33	6	39	16	0	2	0
Mei 2025	Cerai Gugat (CG)	83	11	94	45	0	2	0
Juni 2025	Cerai Talak (CT)	30	17	47	16	0	1	0
Juni 2025	Cerai Gugat (CG)	104	102	206	51	0	6	0
Juli 2025	Cerai Talak (CT)	30	53	83	40	2	2	1
Juli 2025	Cerai Gugat (CG)	145	104	249	89	0	5	1
Agustus 2025	Cerai Talak (CT)	34	49	83	39	0	5	0
Agustus 2025	Cerai Gugat (CG)	137	81	218	73	0	4	1
September 2025	Cerai Talak (CT)	39	60	99	46	0	0	0
September 2025	Cerai Gugat (CG)	131	93	224	75	0	0	0
Oktober 2025	Cerai Talak (CT)	53	79	132	79	0	0	0
Oktober 2025	Cerai Gugat (CG)	149	106	255	108	0	0	0
November 2025	Cerai Talak (CT)	53	50	103	53	0	0	0
November 2025	Cerai Gugat (CG)	147	82	229	91	0	0	0

Dicetak secara otomatis dari Laporan Keadaan Perkara (LIPA.8) Pengadilan Agama Tembilahan.

29

Gambar 3. Laporan Peraka Cerai Gugat dan Cerai Talak Periode 2026, yang diputus Pada Pengadilan Agama Tembilahan

REKAPITULASI PERKARA CERAI GUGAT (CG) & CERAI TALAK (CT)

Pengadilan Agama Tembilahan — Tahun 2024

Bulan	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Perkara Diterima	Jumlah	Diputus / Dikabulkan	Tidak Diterima	Dicabut	Ditolak
Januari 2024	Cerai Talak (CT)	19	15	34	7	0	1	0
Januari 2024	Cerai Gugat (CG)	60	52	112	25	1	2	0
Februari 2024	Cerai Talak (CT)	26	13	39	13	1	0	0
Februari 2024	Cerai Gugat (CG)	84	43	127	41	1	2	1
Maret 2024	Cerai Talak (CT)	27	16	43	13	0	1	0
Maret 2024	Cerai Gugat (CG)	82	59	141	47	1	2	1
April 2024	Cerai Talak (CT)	30	10	40	10	0	1	0
April 2024	Cerai Gugat (CG)	90	36	126	35	1	4	0
Mei 2024	Cerai Talak (CT)	29	21	50	17	1	1	0
Mei 2024	Cerai Gugat (CG)	86	66	152	53	1	3	0
Juni 2024	Cerai Talak (CT)	31	7	38	11	0	1	0
Juni 2024	Cerai Gugat (CG)	95	26	121	37	0	4	1
Juli 2024	Cerai Talak (CT)	26	16	42	16	0	1	0
Juli 2024	Cerai Gugat (CG)	79	55	134	53	0	3	0
Agustus 2024	Cerai Talak (CT)	25	14	39	16	0	1	0
Agustus 2024	Cerai Gugat (CG)	78	51	129	55	0	5	0
September 2024	Cerai Talak (CT)	23	14	37	16	0	0	0
September 2024	Cerai Gugat (CG)	74	51	125	55	1	2	1
Oktober 2024	Cerai Talak (CT)	23	20	43	19	0	1	0
Oktober 2024	Cerai Gugat (CG)	68	69	137	59	1	7	0
November 2024	Cerai Talak (CT)	28	18	46	16	0	1	0
November 2024	Cerai Gugat (CG)	89	58	147	47	0	3	0
Desember 2024	Cerai Talak (CT)	32	7	39	22	0	1	0
Desember 2024	Cerai Gugat (CG)	97	23	120	69	0	1	1
TOTAL		1.008	842	1.850	735	8	49	8

Dicetak secara otomatis dari Laporan Keadaan Perkara (LIPA.1 & LIPA.8) Pengadilan Agama Tembilahan.

Gambar 4. Laporan Peraka Cerai Gugat dan Cerai Talak Periode 2026, yang diputus Pada Pengadilan Agama Tembilahan



Gambar 5. Wawancara Bapak Ahmad Khatib, S.H.I., M.H Hakim Pengadilan Agama Tembilahan



Gambar 6. Wawancara Bapak Aab Abdul Wahab, S.S., M.H Hakim Pengadilan Agama Tembilahan



Gambar 7. Wawancara Bapak Nasingisin., M.H Hakim Pengadilan Agama Tembilahan



Gambar 2. Wawancara Bapak Amry Saputra., S.H, M.H Hakim Pengadilan Agama Tembilahan



Gambar 2. Wawancara Nasyabandi Akbar, Staf Posbakum Pengadilan Agama Tembilahan

SKRIPSI NASYWA ZULHASIDA (301221010031).pdf

ORIGINALITY REPORT

30%	27%	22%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	6%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	5%
3	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unissula.ac.id Internet Source	1%
8	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1%
10	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
11	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
12	www.scribd.com Internet Source	<1%
13	Submitted to Fakultas Hukum Student Paper	<1%
14	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1%
15	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%

16	repository.unja.ac.id Internet Source	<1%
17	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
18	pa-bontang.go.id Internet Source	<1%
19	Allifia Hariaji, M Sifa Fauzi Yulianis. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, 2025 Publication	<1%
20	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
21	core.ac.uk Internet Source	<1%
22	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
23	etd.uinsyahada.ac.id Internet Source	<1%
24	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1%
25	Hutabarat, Nenny Lynda Caroline. "Pengaruh Pemberian gel Ekstrak Kulit Petai Terhadap Ekspresi gen Tyrosinase dan TRP1 (Studi Eksperimental in Vivo Pada Tikus Wistar Model Hiperpigmentasi Yang Terpapar uvb)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
26	Rinoa Najwa Aurora Nindha Senduk, Ariawan Gunadi. "Worker Wage Priority in Indonesian Corporate Bankruptcy Proceedings", Indonesian Journal of Law and Economics Review, 2026 Publication	<1%
27	Dimas Ginastian, Abd. Mukhsin, Mhd. Yadi Harahap. "Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa Penetapan Nafkah Wajib dan Madiyah terhadap Anak dan Istri Pasca Perceraian", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Publication	<1%
28	Submitted to UIN KH. Achmad Siddiq Jember Student Paper	<1%
29	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%

30	Submitted to UPA Perpustakaan UNTIRTA Student Paper	<1%
31	Pasaribu, Yusuf Hanafi. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
32	repository.unika.ac.id Internet Source	<1%
33	Submitted to UIN Batusangkar Student Paper	<1%
34	Wahanani, Sri Tatmala. "Analisis Hukum Terhadap Batas Usia Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
35	Yustisianto, Agus Irawan. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
36	Nuryadi. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perkara Hak Asuh Paska Perceraian Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
37	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1%
38	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III Student Paper	<1%
39	Wisesa, Kadek Agus Ambara. "Efektivitas Hak Narapidana Dalam Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Putusan Pidana Denda", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
40	Submitted to Universiti Teknologi Petronas Student Paper	<1%
41	Ah. Soni Irawan. "IMPLIKASI CERAI GUGAT TERHADAP HAK ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SHARIAH JASSER AUDA", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2023 Publication	<1%
42	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%

43	Dian Maulidah, Moh. Muhibbin, Diyan Isnaeni. "The Judge's Ex Officio Authority in Fulfilling Wife and Child Support Rights After Divorce in the Religious Court", Academia Open, 2025 Publication	<1 %
44	Lius, Muhammad Jeppry. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Tanah Berbasis Elektronik (E-Certificate) Dalam Hukum Pertanahan di Indonesia.", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
45	Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)", Open Science Framework, 2021 Publication	<1 %
46	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
47	Redaksi Profetika. "DAFTAR ISI", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2020 Publication	<1 %
48	Abidin, Muh Nur. "Diskresi Status Anak Dalam Surat Edaran, Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) Publication	<1 %
49	Damasynta, Anisya Devi Aprilia. "Kedudukan Hukum Istri Siri dan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Dalam Pembagian Waris Yang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
50	Submitted to Universitas PGRI Semarang Student Paper	<1 %
51	febryrahadian.blogspot.com Internet Source	<1 %
52	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	<1 %
53	Farouq Ali Ahmad, Rahmawati Rahmawati, Zainal Said, Fikri Fikri, Muhiddin Bakri, Rusdaya Basri. "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MESIR", AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2025 Publication	<1 %
54	Pakpahan, Risdo. "Rekonstruksi regulasi tindak pidana malpraktik tenaga kesehatan yang berbasis nilai keadilan pancasila.", Universitas Islam Sultan Agung	<1 %

(Indonesia)
Publication

55	Ningrum, Avia Surya. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual dan Pembeli Dalam Akta Jual Beli Dengan Menggunakan Sertipikat Pengganti", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
56	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
57	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
58	Hayati, Mulida. "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
59	Subroto. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
60	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
61	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
62	Shofi Mauline Athaliah Taqi, Rifqi Ridlo Phahlevy. "SEMA Number 3 of 2023 and Divorce Regulation in Sidoarjo Court", Indonesian Journal of Islamic Studies, 2025 Publication	<1 %
63	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
64	pa-sungguminasa.go.id Internet Source	<1 %
65	Fitri Maulida, Lathifah Munawaroh, Alfian Qodri Azizi. "Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat BerpisahSelama Enam Bulan Dalam Perceraian", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025 Publication	<1 %
66	Novita, Puteri Mela. "Kedudukan Waris Perdata Anak dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Konsepsi Kepastian Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %

67	Susilo, Tri Margono Budi. "Implementasi Penuntutan Tindak Pidana Umum Secara Daring di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Klaten)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
68	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
69	Julian Wiranda, Rifki. "Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'Ah", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
70	www.pasca-umi.ac.id Internet Source	<1 %
71	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
72	Amalia, Ayu Zahrina. "Peran Notaris Dalam Melindungi Eksuksi Jaminan hak Tanggungan Secara Sepihak Terhadap Debitur Wanprestasi di Kabupaten Batang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
73	Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
74	Handoko, Redy. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
75	Pujiono, Arik. "Peran Dewan Kehormatan Daerah Notaris Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pada Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
76	Septyaningrum, Putri Nugraheni. "Rekonstruksi Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
77	Fata Algerie Nasution, Mardalena Hanifah, Ulfia Hasanah. "Perbandingan Penetapan Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Pts dan Penetapan Nomor 0228/Pdt.P/2020/PA.Pkj)", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Publication	<1 %

78	Mulono Apriyanto. "TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum)", Open Science Framework, 2020 Publication	<1 %
79	Sheila Fakhria. "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan", Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2019 Publication	<1 %
80	Suwandi, Dedy. "Rekontruksi Frasa Wajib Yang Berimplikasi Terhadap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
81	Ulfa safira Soliha. "Wali Mafqud bagi Perempuan dalam Kajian Hukum Perkawinan dan Keluarga Islam di Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026 Publication	<1 %
82	fh.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
83	Darmanto, Amir. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Berdasarkan Nilai Keadilan Bermartabat", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
84	Pardi, Pardi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Kasus Pencurian Kotak Amal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Brebes", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
85	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
86	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
87	Winda Fitri, Felix Charles Dicaprio, Joseph Frederic Halim, Verensia Verensia, Bryan Imanuel Nainggolan, Ryvaldo Rajagukguk. "ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM TENTANG CERAI TALAK TERHADAP ISTRI", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2023 Publication	<1 %
88	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
89	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	

		<1%
90	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1%
91	Aprilatama, MohMisandi Yoga. "Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris Yang Tidak Melibatkan Seluruh Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/Pn.Tgl)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
92	Maria Rosalina, Shafira Putri Azhari, Najwa Tindaon, Chairunnisa Chairunnisa. "Kedudukan Gugatan Rekonvensi dalam Cerai Talak dan Cerai Gugat di Peradilan Agama", AHKAM, 2026 Publication	<1%
93	Submitted to Nguyen Tat Thanh University Student Paper	<1%
94	Widjayanti, Galuh Sekar. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Terhadap Ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
95	www.jogloabang.com Internet Source	<1%
96	Mochammad Agus Rachmatulloh. "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat", SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2022 Publication	<1%
97	Verdiana, Norasya. "Rekonstruksi Regulasi Batas Kedewasaan Atau Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
98	Dena Murdiawati, Lalu Parman, Ufran Ufran. "PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2021 Publication	<1%
99	jurnal.untirta.ac.id Internet Source	<1%
100	Andre Afrilian. "LANDASAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM TEHADAP STATUS ISTRI DALAM PERKARA SUAMI MAFQUD MELALUI PUTUSAN NOMOR 0279Pdt.G2009PA.PAS", Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara, 2023 Publication	<1%

101	Friska Amelia, Muhammad Syarif Hasyim, Besse Tenriabeng Mursyid. "IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BERDASARKAN STRATA SOSIAL", Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2024 Publication	<1%
102	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1%
103	Ahmad Syarif Fuadi, Dadin Eka Saputra, Munajah Munajah. "ANALISIS YURIDIS HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp)", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021 Publication	<1%
104	Assiatun, Anny. "Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimal Khusus Dalam Perkara Narkotika", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
105	Kholiq, Muhammad Idam. "Implikasi Hukum Terhadap Penandatanganan Akta Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan Yang di Lakukan Tidak di Hadapan Notaris (Studi Kasus Pada BPR BKK Jepara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
106	Mar'Atus, Faradina. "Pembebanan Mut'Ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan di Pengadilan Agama Cilacap", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
107	Putra, Gewsima Mega. "Rekonstruksi Regulasi Penguasaan Sumber Daya air Untuk Keperluan Pemenuhan Masyarakat Melalui Pembangunan Waduk Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
108	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	<1%
109	Abdullah, Muhamad. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Petugas Pencarian Dan Pertolongan (Rescuer) Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication	<1%
110	Chafsya, Lathfia Arrosikha. "Pengaruh Pelaporan Keberlanjutan Terhadap Hubungan Firm Size, Firm Age dan Pengungkapan SDGs (Studi Kasus Pada Perusahaan LQ45 di Indonesia)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%

111	Iksan, Adnan, Khairunnisa. "PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA", FUNDAMENTAL : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 Publication	<1 %
112	Indratno, Krisnat. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
113	Kristiono, Cucuk. "Analisa Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Homoseksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Study Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Garut No: 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn Grt)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
114	Muktar. "Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Bersumber Dari Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Hukum Islam)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
115	Nuryani, Sri. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
116	Akbar, Agung Ali. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Indramayu", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
117	Arifin, Jaenal. "Rekonstruksi Regulasi Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
118	Asichah, Siti. "Pengaruh Pemberian gel Ekstrak Bunga Telang (Clitoria Ternatea L.) Terhadap Kadar Interleukin-10 (Il-10) Dan Kadar Glutathione Peroksidase (GPx) (Studi Eksperimental in Vivo Pada Tikus Wistar Jantan Yang Dipapar Sinar UV-B)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
119	Valevi, Muhammad Redha. "Rekonstruksi Regulasi Kompetensi Absolute Peradilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Pidana Terhadap Penyelewengan Pengelola Zakat Melalui Mahkamah Syariyah di Provinsi Aceh Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
120	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %

121	Ade Arianto Asril, Anis Rifai, Arina Novizas Shebubakar. "PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2022 Publication	<1 %
122	Amin, Nasrul. "Penerapan Penentuan Nilai Limit Terhadap Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
123	Izza, Karelina Fatimatun. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-xlll/2015 Tahun 2015", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
124	Mahardeka, Triana Justitia. "Rekontruksi Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (Kredit Online) Dengan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
125	Muhammad Rifai, Norhalisa Amanda, Muhammad Rizki Zailani. "Fenomena Gugatan Perceraian : Analisis Kasus di Pengadilan Agama Pangkalan Bun", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2026 Publication	<1 %
126	Mutmainah, Siti. "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
127	Salman Al-Farisi, Ahmad Maula Hadi, Lena Ishelmiany Ziaharah. "***Child Rights Protection in Fasakh Cases Due to Apostasy: A Juridical Analysis of the Decision of the Cibadak Religious Court Number 3112/Pdt.G/2024/PA.Cbd***", Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2026 Publication	<1 %
128	Samosir, Agustinus. "Rekonstruksi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Untuk Meningkatkan Kebijakan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
129	anzdoc.com Internet Source	<1 %
130	Abrori. "Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Ag/ 2019 Tentang Sengketa Perdata Pembiayaan Musyārakah Perspektif Teori Keadilan Reinhold Zippelius", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) Publication	<1 %

131	Fatima Auliyani Almyra Syamal, Fachri Fachrudin, Muhammad Hidayat. "Tanggung Jawab Hadanah dalam Kasus Pengabaian Anak: Analisis Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia", AHKAM, 2026 Publication	<1 %
132	Jamadi. "Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
133	Leni Dwi Nurmala, Yoslan Koni. "Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2022 Publication	<1 %
134	Muhammad Ahmad Rahmatullah. "ANALISIS ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DALAM PERKARA CERAI TALAK No. 30/Pdt.G/2016/PA.Prg. DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IB", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2019 Publication	<1 %
135	Naufal, Helmi. "Kedudukan hukum akta perjanjian kawin dalam rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri di kabupaten rembang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
136	Suryandari, Wieke Dewi. "Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
137	Suyudi, Bambang. "Rekonstruksi Regulasi Pemberian Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
138	Ummul Khaira, Azhari Yahya. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
139	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	<1 %
140	Wisnu, Ary Patria. "Akibat Hukum Penjualan Tanah Hak Milik Atas Harta Bersama Oleh Suami Tanpa Persetujuan Istri (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 253/Pdt.Plw/2018/PN.Skt)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
141	Yusri. "Rekonstruksi Regulasi Pembuktian Dalam Peradilan Perdata Berbasis Pada Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024	<1 %

Publication

142	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
143	repository.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
144	Kusnadi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
145	Muhamad Ridho Anwar. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA ISTERI NUSHUZ", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2022 Publication	<1 %
146	Nandang Ihwanudin. "PEMENUHAN KEWAJIBAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA", ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2019 Publication	<1 %
147	Supriyadi Supriyadi. "Rekonstruksi hukum kewarisan anak dari perkawinan sirri di pengadilan agama", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication	<1 %
148	Syafruddin, Andi Adnan. "Rekonstruksi Regulasi Peneyelesaian Sengketa Pertanahan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
149	A., A. Habibi. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Murābahah dan Mudorobah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah al Uswah Kota Banjar.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) Publication	<1 %
150	Cici Azizah Atzahra, Ramadhan Syahmedi Siregar. "Tinjauan Hukum terhadap Persyaratan Syiqaq sebagai Alasan Perceraian pada Putusan nomor 154/Pdt.G/2024/PA. Stb", Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 2025 Publication	<1 %
151	Komarudin. "Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Yang Dilakukan Dihadapan Notaris Oleh Salah Satu Pihak Pihak (Putusan Nomor 571/Pdt/2017/Pt. Bdg)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
152	Lubis, Rahmat Husein. "Implementasi putusan Mahkamah konstitusinomor 93/PUU-X/2012 terhadap Sengketaekonomi Syariah", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2024 Publication	<1 %

153	Mohammad Kamil Ardiansyah. "Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020 Publication	<1%
154	Primaditha, Anindya Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tidak Menanggapi Penawaran Pembayaran Dalam Penyelesaian Kepailitan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Nomor 364/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.PST)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
155	Soraya Parahdina, Rahimah Tul Sa'dah, Akhmad Vizaini. "PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF IBNU QAYYIM", Mitsaqan Ghalizan, 2023 Publication	<1%
156	Suhadi. "Rekontruksi Kompilasi Hukum Islam Indonesia Perspektif Madzhab di Nusantara Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
157	Tanjung, Irwansyah. "Reconstruction of the Thinking Concept of Judges in Deciding Criminal Cases to Realize Religious Justice", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
158	Utami, Nurullita Rizqia. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Upaya Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Korupsi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
159	Yulianingsih, Sri. "Rekonstruksi Regulasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
160	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		